



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISA PELAKSANAAN REFORMASI ADMINISTRASI
PERPAJAKAN PADA KANWIL DJP JAKARTA PUSAT
PERIODE 2005-2006**

TESIS

**ARIES INDRA KURNIAWAN
0606011311**

**FAKULTAS EKONOMI
MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
DEPOK
JULI 2009**





UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISA PELAKSANAAN REFORMASI ADMINISTRASI
PERPAJAKAN PADA KANWIL DJP JAKARTA PUSAT
PERIODE 2005 - 2006**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi

**ARIES INDRA KURNIAWAN
NPM: 0606011311**

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN KEBIJAKAN PUBLIK
KEKHUSUSAN EKONOMI KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH
DEPOK
JULI 2009**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Aries Indra Kurniawan

NPM : 0606011311

Tanda Tangan : 

Tanggal : 27 Juli 2009

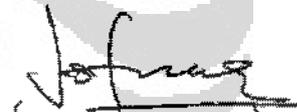
HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Aries Indra Kurniawan
NPM : 0606011311
Program Studi : Magister Perencanaan Kebijakan Publik (MPKP)
Judul Tesis : Analisa Pelaksanaan Reformasi Administrasi
Perpajakan Pada Kanwil DJP Jakarta Pusat Periode
2005 - 2006

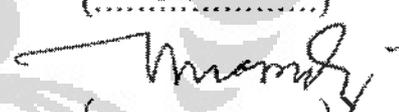
Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Master Ekonomi pada Program Studi Magister Perencanaan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

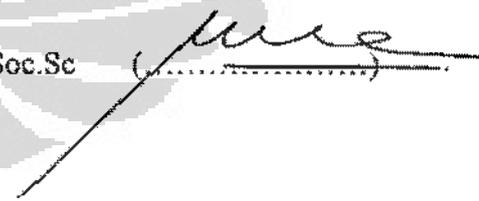
Pembimbing : Isfandiarni, S.E.,M.A.


(.....)

Ketua Sidang : Komara Djaja ,SE.MSc,PhD


(.....)

Penguji : Ringoringo H. Achmadi S.E., M.Soc.Sc


(.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 27 Juli 2009

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah S.W.T, karena karunia-Nya saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Master Ekonomi Program Pasca Sarjana Magister Perencanaan Kebijakan Publik (MPKP) pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Tesis ini dapat hadir dihadapan pembaca sebagai rangkaian proses yang amat panjang dengan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sejak saya menempuh pendidikan pada program MPKP UI ini tiga tahun yang lalu sampai dengan tiga semester terakhir perjuangan untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, adalah sebuah keharusan bagi saya untuk menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Isfandiarni, S.E.,M.A. selaku dosen pembimbing atas kesabarannya dalam memberikan masukan, bimbingan, dan diskusinya sehingga tesis ini bisa selesai.
2. Seluruh dosen-dosen dan Staf Administrasi di MPKP UI, yang telah memberikan ilmu dan bantuannya selama ini.
3. Kepada istri saya Alfia Saptiani dan anakku tersayang Shafa Kamila Khairunnisa yang selalu memberikan doa serta dukungan.
4. Kepada Bapak dan Ibu tercinta, Adik-adik, Keluarga Purwokerto serta teman-temanku satu angkatan kelas XV A, secara khusus Ibu Yayuk dan Pak Anwar, Pak Djoko, Ivan, Pak Lilik serta rekan-rekan lain, terima kasih untuk *sharing*, diskusi, semangat dan kebersamaannya.
5. Untuk semua pihak yang membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas kerelaan meluangkan waktunya bagi penyelesaian tesis ini.

Akhir kata, semoga Allah S.W.T berkenan membalas segala budi baik semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini, dengan segala kekurangannya, membawa manfaat bagi para pembaca.

Depok, Juli 2009
Penulis

Aries Indra Kurmiawan

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aries Indra Kurniawan
NPM : 0606011311
Program Studi : Magister Perencanaan Kebijakan Publik
Departemen : Ilmu Ekonomi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

"Analisa Pelaksanaan Reformasi Administrasi Perpajakan Pada Kanwil DJP Jakarta Pusat Periode 2005 - 2006"

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 27 Juli 2009

Yang menyatakan



(Aries Indra Kurniawan)

ABSTRAK

Nama : Aries Indra Kurniawan
Program Studi : MPKP
Judul : Analisa Pelaksanaan Reformasi Administrasi Perpajakan Pada Kanwil DJP Jakarta Pusat Periode 2005 – 2006

Penelitian ini dilakukan antara lain untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan reformasi administrasi perpajakan yang dilaksanakan pada Kanwil DJP Jakarta Pusat pada tahun 2005 – 2006 sebagai pilot project bentuk KPP Pratama. Pelaksanaan kebijakan ini merupakan kelanjutan dari keberhasilan pembentukan dua KPP WP Besar (*Large Taxpayer Office, LTO*) pada tahun 2002.

Penelitian ini menggunakan metode panel data yang diregresikan menggunakan *Eviews*. Analisa dibedakan menjadi dua bagian, yaitu analisa vertikal dan analisa horizontal. Analisa vertikal dilakukan dengan cara membandingkan hasil pelaksanaan reformasi administrasi perpajakan pada tahun 2005 dan 2006 dengan hasil sebelum melaksanakan modernisasi pada tahun 2003-2004. Selain itu analisa horizontal dengan cara membandingkan hasil pelaksanaan reformasi administrasi perpajakan pada Kanwil DJP Jakarta Pusat 2005 – 2006 dengan Kanwil DJP Jakarta lainnya pada tahun yang sama.

Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan kebijakan administrasi perpajakan pada KPP di Kanwil DJP Jakarta Pusat tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan realisasi penerimaan dan kepatuhan Wajib Pajak dibandingkan sebelum melaksanakan modernisasi. Kebijakan tersebut berpengaruh pada tinggi rasio belanja pegawai terhadap total belanja dan menurunkan rasio belanja barang terhadap total belanja.

Selain itu hasil penelitian ini diperoleh hasil bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan rasio belanja pegawai terhadap total belanja mempunyai hubungan positif terhadap kenaikan realisasi penerimaan pada Kanwil DJP Jakarta. Sedangkan rasio belanja barang memiliki hubungan negatif terhadap realisasi penerimaan pajak Kanwil DJP Jakarta.

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar menganalisa kebijakan administrasi perpajakan selanjutnya.

Kata Kunci: Reformasi Administrasi Perpajakan

ABSTRAC

Name : Aries Indra Kurniawan
Program : MPKP
Title : The Analysis of Tax Administration Reform at Kanwil DJP Jakarta Pusat in period 2005 - 2006

The main objective this research is to assess the tax influence on tax administration reform at Kanwil DJP Jakarta Pusat in period 2005-2006. This Regional Office is treated as a pilot project of KPP Pratama. This policy is a further implimentation of two formation of Large Taxpayer Office (LTO) in 2002.

This research is use the panel data method that regressed with Eviews. It has two different part of analysis, the vertical analysis and horizontal analysis. Vertical analysis is done by comparing between the implementation of tax reformation administration at the year 2005-2006 and implementation before modernisation at the year 2003-2004. While horizontal analysis is done by comparing between the implementation tax reformation in Kanwil DJP Jakarta Pusat at the year 2005-2006 and the other Kanwil DJP Jakarta at the same year.

Some finding from this research are as follow: (i) the implementation of tax administration policy at KPP in Kanwil DJP Jakarta Pusat doesn't have a significant influences to increase tax revenue and (ii) tax compliance prior and post of modernisation. That policy influences to the high expense ratio to total expense and reducing the operational expense ratio to total expense.

One the other hand, the level of tax compliance level and salary expense ratio with total expense has a positive relationship to the increase of Kanwil DJP Jakarta Pusat's tax revenue. While operational expense ratio has a negative relationship to the realization of Kanwil DJP Jakarta Pusat's tax revenue.

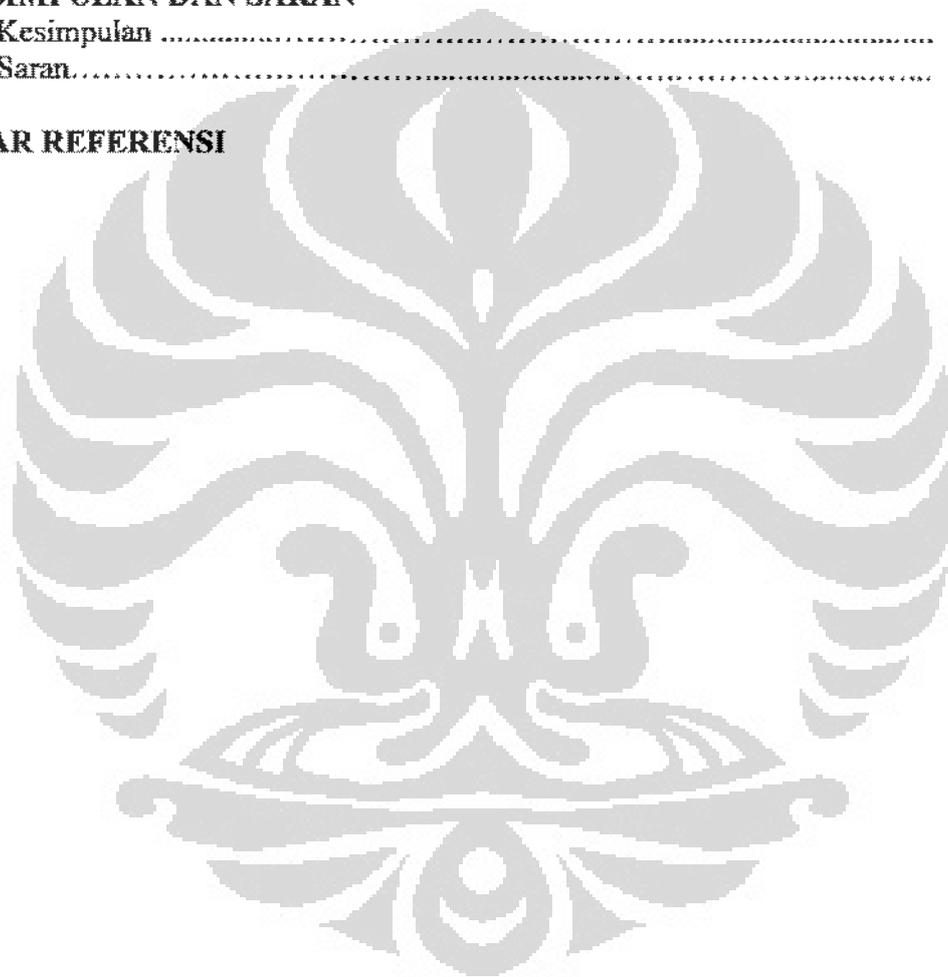
The result could be used as a base to analyse the further tax administrations policy.

Key Word : Reformation Tax Administration

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
1. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Permasalahan	9
1.3. Hipotesis	11
1.4. Tujuan Penelitian.....	12
1.5. Ruang Lingkup Penelitian	12
1.6. Manfaat Penelitian	14
1.7. Metodologi Penelitian	14
1.8. Sistematika Penulisan	15
2. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Pengertian tentang Pajak	17
2.2. Konsep Reformasi Perpajakan	19
2.3. Pengertian dan Peranan Administrasi Perpajakan	22
2.4. Kaitan Reformasi Administrasi Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak	26
2.5. Kaitan Reformasi Administrasi Perpajakan dengan Biaya Pelaksanaannya	28
3. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
3.1. Gambaran Umum Kanwil DJP Jakarta	30
3.2. Gambaran Pelaksanaan Modernisasi Pada Kanwil DJP Jakarta Pusat	32
3.3. Perbedaan Antara KPP telah Menerapkan Sistem Administrasi Perpajakan modern dengan KPP yang Belum Menerapkan	41
3.4. Gambaran Umum KPP dengan Sistem Administrasi Modern	43
3.5. Rencana Kerja Program Modernisasi Tahun 2006-2009	46
3.6. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	42
4. METODOLOGI PENELITIAN	
4.1. Kerangka Pemikiran	51
4.2. Ruang Lingkup Penelitian	52
4.3. Model dalam Penelitian	53
4.4. Data dan Sumber	55
4.5. Metode Estimasi Ekonometrika Data Panel	56

5. HASIL EMPIRIS DAN ANALISIS	
5.1 Analisa Vertikal Pelaksanaan kebijakan	64
5.1.1 Deskriptif Data	65
5.1.2 Uji Beda Secara Statistik	70
5.1.3 Analisa Regresi dengan Metode Panel Data	80
5.2 Analisa Horizontal Pelaksanaan Kebijakan	87
5.2.1 Deskriptif Data	88
5.2.2 Uji Beda Secara Statistik	91
5.2.3 Analisa Regresi dengan Metode Panel Data	96
5.3 Pembahasan Pelaksanaan Kebijakan secara Keseluruhan	100
6. KESIMPULAN DAN SARAN	
6.1 Kesimpulan	105
6.2 Saran	109
DAFTAR REFERENSI	111



DAFTAR GAMBAR

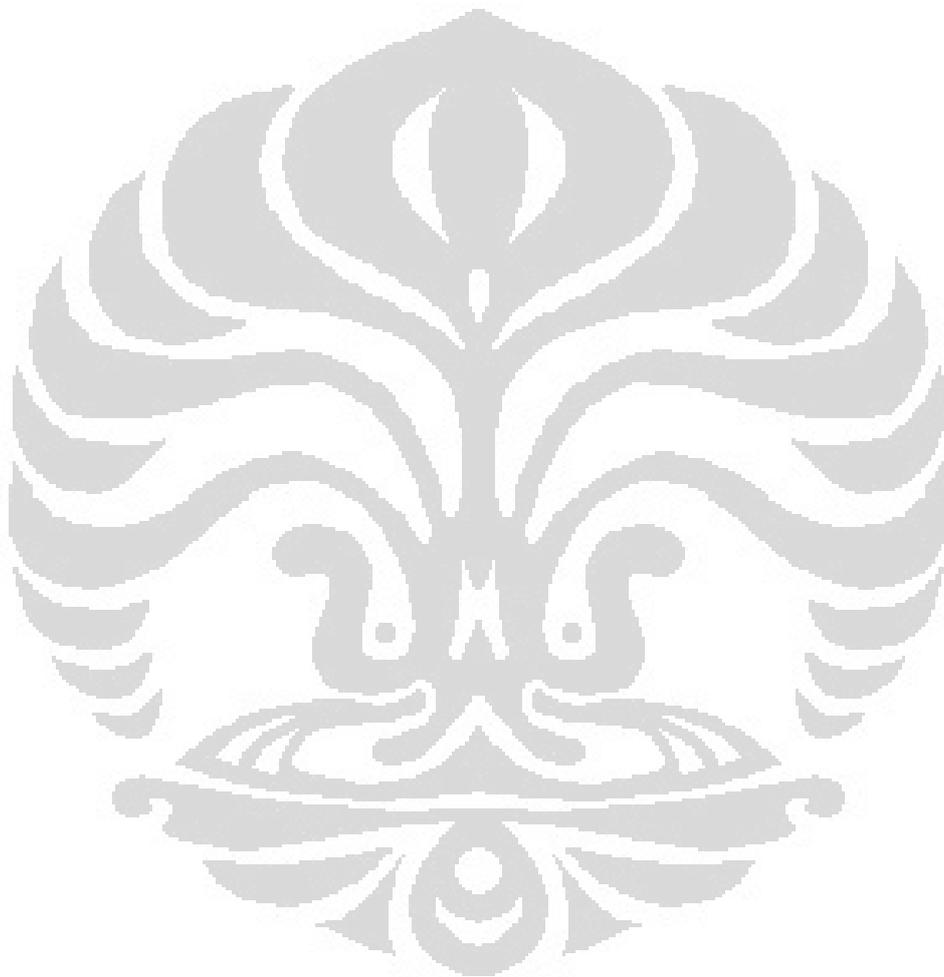
Gambar 1.1	Tax Ratio Negara Asia	3
Gambar 1.2	Flowchar Latar Belakang Masalah	8
Gambar 3.1	Struktur Organisasi Kanwil DJP Jakarta Pusat	35
Gambar 3.2	Struktur Organisasi KPP Madya Jakarta Pusat	38
Gambar 3.3	Struktur Organisasi KPP Pratama	40
Gambar 4.1	Flowchart Ruang Lingkup Penelitian	53
Gambar 5.1	Rata-rata Realisasi Penerimaan per KPP	73
Gambar 5.2	Jumlah Realisasi Penerimaan per KPP	73
Gambar 5.3	Rata-rata Kepatuhan WP per KPP	75
Gambar 5.4	Rata-rata Kepatuhan WP per KPP	75
Gambar 5.5	Rata-rata Rasio Belanja Pegawai dgn total belanja.....	77
Gambar 5.6	Rata-rata Rasio Belanja Barang dgn total belanja	78
Gambar 5.7	Total Penerimaan Pajak	88
Gambar 5.8	Rata-rata Penerimaan Pajak	89
Gambar 5.9	Rata-rata Kepatuhan Wajib Pajak	90
Gambar 5.10	Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Biaya	91
Gambar 5.11	Rata –rata Rasio Belanja Barang terhadap Total Biaya	92

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penerimaan dan Tax Ratio.....	2
Tabel 1.2	Tax Ratio di negara Asia	4
Tabel 3.1	Pembagian Unit Kerja Kanwil Provinsi DKI Jakarta	31
Tabel 3.2	Pembagian Wilayah Kerja Kanwil DJP Jakarta Pusat sebelum dan sesudah Modernisasi	33
Tabel 3.3	Kebutuhan Pegawai Pelaksanaan Modernisasi	50
Tabel 4.1	Tanda arah Koefesien Hasil Estimasi yang Diharapkan.....	55
Tabel 4.2	Data dan Sumber Data	56
Tabel 5.1	Deskriptif Data Statistik Variabel	66
Tabel 5.2	Hasil Pengujian Kolmogorov Sminov	70
Tabel 5.3	Hasil Uji beda dengan Mann-Whitney U	71
Tabel 5.4	Hasil Uji Beda Dengan Independent Sample T-Test	71
Tabel 5.5	Hasil Estimasi Analisa Vertikal	81
Tabel 5.6	Deskriptif Data Analisa Horizontal	113
Tabel 5.7	Hasil Pengujian Kolmogorov Sminov	92
Tabel 5.8	Hasil Uji beda dengan Mann-Whitney U	93
Tabel 5.9	Hasil Uji Beda Dengan Independent Sample T-Test	93
Tabel 5.10	Hasil Estimasi Data Panel	97
Tabel 5.11	Hasil ringkasan analisa vertikal dan horizontal	101
Tabel 6.1	Hasil ringkasan analisa vertikal dan horizontal	106

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Tabel 5.6. Deskriptif Data	113
Lampiran 2: Hasil Regresi Linear Analisa Vertikal	115
Lampiran 3: Hasil Regresi Linear Analisa Horizontal	120



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang berlaku di hampir berbagai negara dalam pembiayaan pengeluaran negara. Hampir semua negara di dunia mengenakan pajak kepada warga negaranya, kecuali beberapa negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang cukup besar menjadikan kekayaan sumber daya tersebut sebagai sumber penerimaan utama negara. Berdasarkan data statistik dari Asian Development Bank diperoleh keterangan bahwa rata-rata lebih dari 50% pengeluaran pemerintah (Government Expenditures) di negara-negara Asia dibiayai dengan penerimaan dari pajak, seperti Malaysia sebesar 60%, China sebesar 85%, Philipina sebesar 82% dan Vietnam sebesar 80% pada tahun 2006.

Demikian pula di Indonesia, penerimaan pajak sangat besar peranannya dalam pembiayaan pembangunan sebagaimana terlihat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya. Kondisi tersebut terjadi akibat merosotnya harga minyak bumi dan gas alam di dunia internasional dalam jangka waktu yang relatif panjang, sementara perekonomian di Indonesia pada saat itu sangat mengandalkan sumber daya alam tersebut sebagai penerimaan negara. Bila kondisi tersebut dibiarkan terus berlanjut dan pemerintah Indonesia tetap mengandalkan penerimaan migas maka akan menyebabkan defisit anggaran negara. Hal tersebut tentunya akan berdampak pada semakin besarnya pinjaman atau hutang luar negeri untuk menutupi defisit anggaran negara dan hal ini sangat tidak diharapkan. Oleh karena itu pemerintah mengambil langkah kebijakan sesuai dengan struktur penerimaan negara pada saat itu yaitu dengan mengandalkan penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan negara melalui reformasi di perpajakan (*Tax Reform*) di Indonesia.

Sejak Reformasi perpajakan (*Tax Reform*) digulirkan, Pajak memberikan kontribusi yang cukup besar dalam APBN disamping penerimaan lainnya dari sumber migas dan non-migas serta hibah.

Sebagaimana terlihat pada Tabel 1.1 terlihat bahwa rata-rata hampir 67% setiap tahunnya penerimaan pajak memberikan kontribusi terhadap APBN dan selain itu terlihat bahwa penerimaan pajak terus meningkat rata-rata sebesar 21,4% setiap tahunnya dalam penerimaan negara. Hal ini memperlihatkan bahwa betapa besar peranan pajak dalam pembiayaan pengeluaran pemerintah untuk pembangunan.

Tabel 1.1
Penerimaan Pajak dan Tax Ratio
Tahun 1994/1995 s/d 2008 ^{*)}
(dalam Miliar Rupiah)

Tahun Anggaran	Penerimaan Pajak ¹⁾	Penerimaan Bukan Pajak ²⁾	Total APBN	Persentase Penerimaan Pajak terhadap APBN	PDB ⁵⁾	Tax Ratio
1994/1995	44,442.10	21,975.90	66,418.00	66.9%	365,750.90	12.15%
1995/1996	48,686.30	24,327.60	73,013.90	66.7%	433,110.40	11.24%
1996/1997	57,339.90	30,290.40	87,630.30	65.4%	511,365.40	11.21%
1997/1998	70,934.20	41,341.30	112,275.50	63.2%	633,520.50	11.20%
1998/1999	102,394.40	55,648.00	158,042.40	64.8%	947,659.80	10.80%
1999/2000 ³⁾	125,951.00	78,481.60	204,432.60	61.6%	1,138,115.80	11.07%
2000 ⁴⁾	115,912.50	89,422.00	205,334.50	56.5%	971,502.60	11.93%
2001 ⁶⁾	185,540.90	115,058.60	300,599.50	61.7%	1,684,280.00	11.02%
2002	210,087.50	88,440.00	298,527.50	70.4%	1,863,275.00	11.28%
2003	242,048.10	98,880.20	340,928.30	71.0%	2,045,853.00	11.83%
2004	280,558.80	122,545.80	403,104.60	69.6%	2,303,031.00	12.18%
2005	347,031.10	146,888.30	493,919.40	70.3%	2,784,960.40	12.46%
2006	409,203.00	226,950.10	636,153.10	64.3%	3,338,195.70	12.26%
(LKPP)						
2007	509,462.00	210,927.00	720,389.00	70.7%	3,779,154.70	18.48%
(APBN UU.18/2006)						
2007	489,891.80	191,868.20	681,760.00	71.9%	3,804,154.70	12.88%
(RAPB-P)						
2008	583,675.60	175,649.10	759,324.70	76.9%	4,206,607.50	13.55%
(RAPBN)						

*) Perbedaan satu angka di belakang koma terhadap angka penjumlahan adalah karena pembulatan.

1) Sejak TA 1998/1999 termasuk BPHTB, sejak TA 1999/2000 termasuk PPh Migas, tetapi

2) Sejak TA 1999/2000 tidak termasuk PPh Migas dan Privatisasi.

3) Disesuaikan dengan klasifikasi baru.

4) Periode 1 April sampai dengan 31 Desember 2000 (9 bulan), PDB Disesuaikan dengan

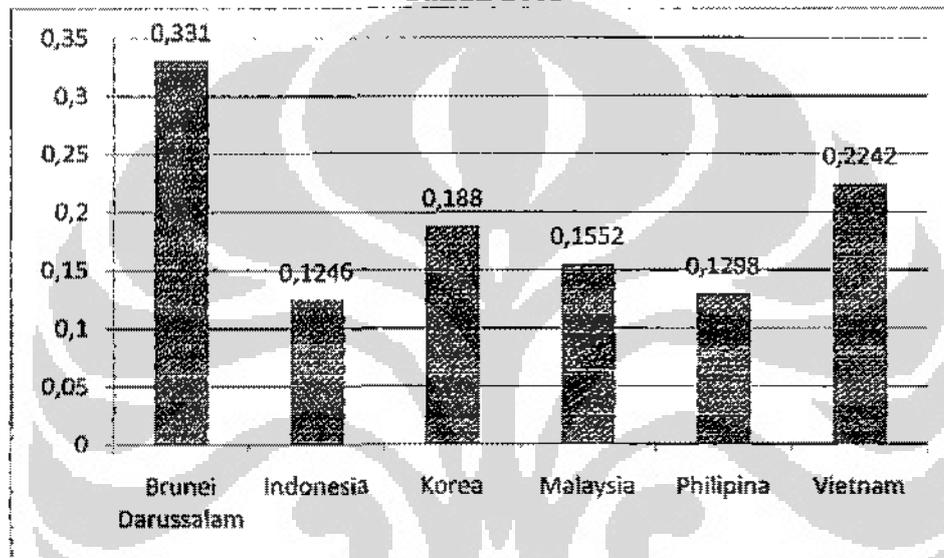
5) TA 1989/1990 - 1998/1999 menggunakan PDB Non Migas, sejak TA 1999/2000

6) Sejak tahun 2001 menggunakan PDB baru dengan cakupan (coverage) yang lebih

Penerimaan pajak yang terus meningkat dalam APBN merupakan tugas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai salah satu lembaga pemerintah di Indonesia yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pencapaian target penerimaan keuangan negara dari sektor pajak. Hal tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan R.I Nomor 464/KMK.01/2005 tentang Pedoman Strategi Dan Kebijakan Departemen

Keuangan (Road-Map Departemen Keuangan) Tahun 2005-2009. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan salah satu unit yang bertugas untuk meningkatkan penerimaan negara dengan optimalisasi penerimaan perpajakan. Penerimaan pajak yang terus meningkat diharapkan akan tercapai rasio pajak (tax ratio) yang ditargetkan, yakni 16% dari produk domestik bruto (PDB).¹

Gambar 1.1
Tax Ratio Negara-Negara Asia
Tahun 2005



Keinginan pencapaian rasio pajak mencapai 16% karena rasio pajak di Indonesia selama tahun 1994 sampai dengan tahun 2006 masih tergolong rendah, sebagaimana terlihat pada **Gambar 1.1** bahwa rasio pajak di Indonesia rata-rata sebesar 12%, jika dibandingkan dengan berbagai negara-negara di Asia. Hal ini juga dapat dilihat dengan membandingkan **Tabel 1.1** dengan **Tabel 1.2**.

Tingkat Rasio Pajak yang rendah merupakan salah satu indikator bagi Direktorat Jenderal Pajak yang menggambarkan bahwa belum optimalnya potensi penerimaan negara dari sektor perpajakan. Jumlah penduduk Indonesia yang cukup besar, lebih dari 200 juta penduduk, masih sangat potensial untuk ditingkatkan penerimannya. Hal ini disebabkan masih banyak warga negara Indonesia yang bekerja dan badan

¹ Lampiran I, KMK No. 464/Kmk.01/2005 tentang Pedoman Strategi Dan Kebijakan Departemen Keuangan (Road-Map Departemen Keuangan) Tahun 2005-2009.

usaha di Indonesia yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak, baik itu sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan Usaha. Secara keseluruhan, berdasarkan data pada tahun 2004, jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar sekitar 2,38 juta jiwa atau hanya mencapai 10% dari jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia, yaitu sebesar 23,829 juta jiwa (Sakernas BPS 2003).

Tabel 1.2
Tax Ratio di Negara Asia
(Dalam jutaan satuan mata uang tiap negara)

Negara	Tahun	Taxes	PDB	Tax Ratio
Brunei Darussalam	2003	3,426.04	11,424.19	29.99%
	2004	3,685.06	13,305.82	27.70%
	2005	5,251.54	15,864.07	33.10%
Korea	2003	135,367.20	724,675.00	18.68%
	2004	140,643.30	779,380.40	18.05%
	2005	152,371.10	810,515.90	18.80%
Malaysia	2003	64,891.00	418,769	15.50%
	2004	72,050.00	474,048	15.20%
	2005	80,594.00	519,451	15.52%
Philipina	2003	550.47	4,316.40	12.75%
	2004	604.96	4,871.55	12.42%
	2005	705.62	5,437.90	12.98%
Vietnam	2003	127,947.00	613,443.0	20.86%
	2004	155,579.00	715,307.0	21.75%
	2005	188,119.00	839,210.9	22.42%
Indonesia	2004	280,588.80	2,303,031.0	12.18%
	2005	347,031.10	2,784,960.4	12.46%

Sumber : Asian Development Bank (ADB) - Key Indicators 2007 (ditolah)

Upaya-upaya yang dilakukan DJP dalam mengoptimisasi penerimaan pajak, yaitu dengan membenahi kondisi internalnya, baik dari segi perangkat peraturan perpajakan yang menunjang kebijakan perpajakan, sumber daya manusia (SDM), organisasi, kualitas pelayanan, administrasi dan teknologi yang digunakan di seluruh unit kantor pelayanan pajak atau dikenal dengan "Reformasi Perpajakan".

Salah satu bentuk reformasi perpajakan yang tengah dilakukan oleh DJP adalah melakukan Reformasi Sistem Administrasi Perpajakan (*Administration Tax Reform*) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau lebih

dikenal "Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan". Reformasi sistem administrasi perpajakan dimulai dengan pembentukan satu Kantor Wilayah (Kanwil) dan dua Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar atau yang dikenal dengan *Large Taxpayers Office* (LTO), berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan R.I Nomor 70 /KMK.03/2002 tanggal 5 Maret 2002. Kantor tersebut merupakan *pilot project* Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan reformasi administrasi perpajakan.

Reformasi administrasi perpajakan sangat penting dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mendukung kebijakan dan peraturan perpajakan yang ada di Indonesia. Menurut pendapat Zain (1990) dalam bukunya menyebutkan bahwa berbicara masalah perpajakan ada tiga fungsi yang harus dijalankan bersama-sama dan seimbang karena ketiganya saling melengkapi satu sama lainnya. Tiga fungsi tersebut, yaitu kebijakan perpajakan (Tax Policy), Undang-Undang Perpajakan dan sistem administrasi perpajakan.²

Selain itu menurut Nowak (1970:3-6) menyatakan bahwa administrasi perpajakan merupakan kunci bagi berhasilnya pelaksanaan kebijakan perpajakan.³ Tugas administrasi perpajakan tidak membuat kebijakan atau ketentuan undang-undang, tidak memutuskan subjek pajak yang dikecualikan dari pemungutan pajak, juga tidak menentukan objek-objek pajak baru. Administrasi perpajakan perlu disusun dengan sebaik-baiknya sehingga mampu menjadi instrument yang bekerja secara efisien dan efektif dalam penyelenggaraan pemungutan pajak.

Pembentukan Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar (LTO) sebagai pilot project dalam menerapkan modernisasi sistem administrasi perpajakan di nilai cukup berhasil dalam mengamankan penerimaan negara. Keberhasilan tersebut di ukur dari kontribusi penerimaan pajak kantor tersebut yang cukup besar dibandingkan kantor pajak lainnya yang belum melaksanakan modernisasi dalam jangka waktu dua tahun dari mulai terbentuknya Kantor tersebut.

² Zain, Moh dan Kustadi Arinta, "Pembaruhan Perpajakan Nasional"; Citra Aditya Bakti, Bandung:1990

³ Mansyuri, R, "Pajak Penghasilan Lanjutan Pasca Reformasi 2000"; YP4, Jakarta:2002

Pada tahun 2002 dengan jumlah 200 Wajib Pajak, penerimaan pajak kantor ini sebesar Rp 29.492,29 milyar. Angka tersebut merupakan 19,52% dari total penerimaan pajak DJP secara nasional. Kemudian, tahun 2003 terjadi pertumbuhan sebanyak 23% menjadi Rp 36.282,09 milyar atau 20,8% dari total penerimaan pajak DJP secara nasional dan tahun 2004 terjadi penambahan 100 Wajib Pajak sehingga jumlah seluruh Wajib Pajak yang terdaftar menjadi 300 Wajib Pajak, penerimaan pajak di kantor ini meningkat mencapai Rp 49.938,78 milyar atau 24,8% dari total penerimaan pajak DJP secara nasional.

Selain itu indikator keberhasilan pembentukan Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar (LTO) tidak hanya dilihat dari sisi penerimaan saja tetapi juga dapat dilihat dari sudut pandang Wajib Pajak, yaitu melihat tingkat kepuasan Wajib Pajak tentang sistem administrasi modern di kantor tersebut. Dari hasil survey yang dilakukan oleh pihak independen, yaitu *AC Nielsen*, bahwa tingkat kepuasan Wajib Pajak mencapai nilai 81. Indeks ini melebihi rata-rata survey atas pelayanan publik di Indonesia, yaitu sebesar 75. Bahkan nilai ini melebihi indeks yang sama terhadap pelayanan pemerintah dan pelayanan umum (diantaranya perpajakan), seperti Australia (66 dan 74), Hongkong (75 dan 71), India (78 dan 78) maupun Singapura (76 dan 76).

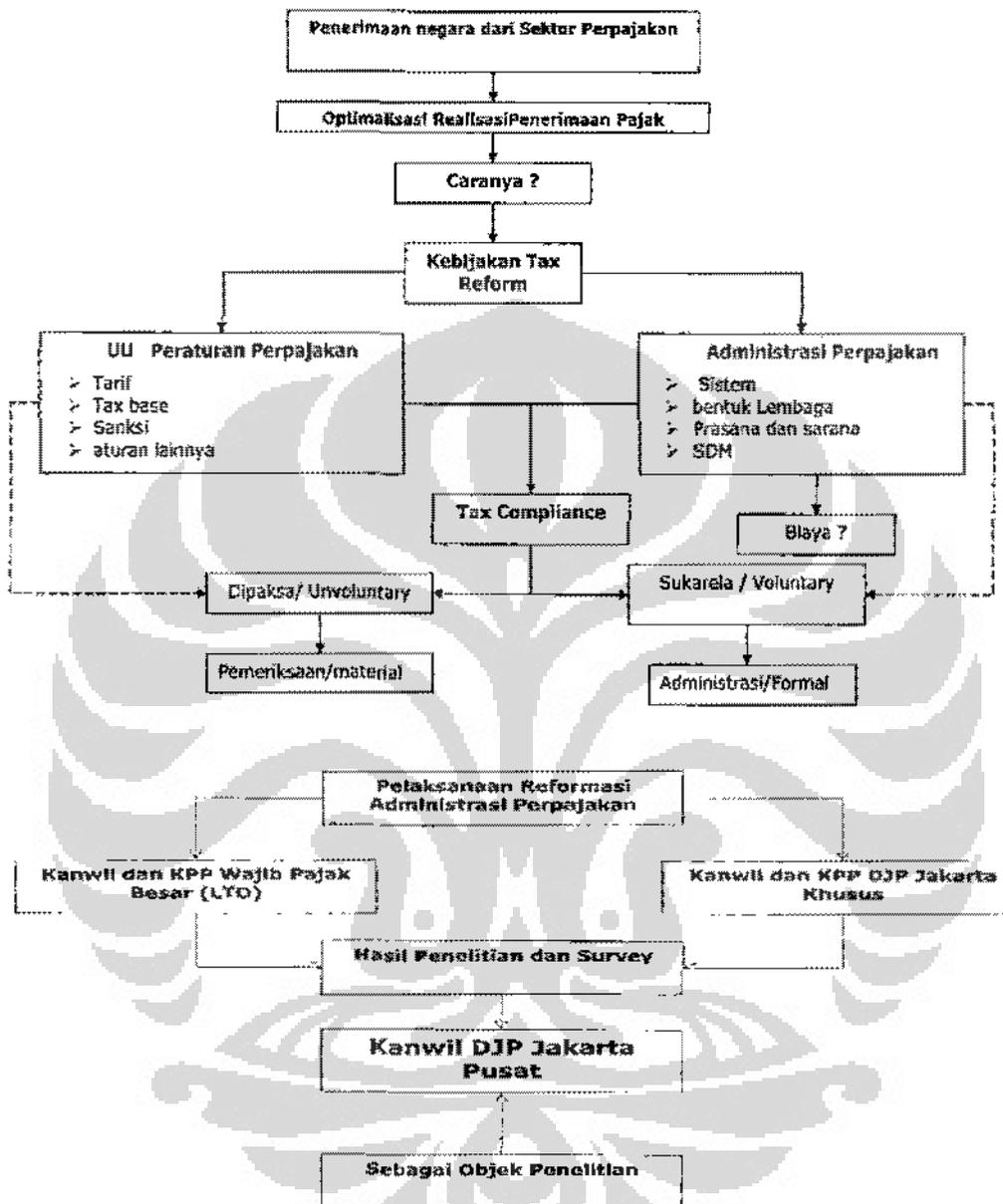
Keberhasilan Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar (LTO), sebagai pilot project pelaksanaan modernisasi sistem administrasi perpajakan, dalam mengamankan penerimaan negara dan meningkatkan tingkat kepuasan Wajib Pajak menjadi dasar awal pelaksanaan modernisasi sistem administrasi perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak yang lainnya. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.01/2004 jo. 167/KMK.01/2005 dibentuklah KPP Madya dan KPP Pratama di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat sebagai pilot project KPP Madya dan KPP Pratama melaksanakan modernisasi sistem administrasi perpajakan sebelum dilaksanakan pada KPP-KPP lainnya.

Modernisasi administrasi perpajakan dilakukan dengan pembenahan organisasi, tugas dan fungsi antara Kantor Wilayah (Kanwil) maupun KPP sebagai unit operasional perpajakan dilapangan dalam rangka pelaksanaan *Good Governance*. Dimana secara sistem dan struktur organisasi, KPP yang melaksanakan sistem administrasi modern dikelompokkan berdasarkan fungsi. Sedangkan KPP belum melaksanakan modernisasi dikelompokkan berdasarkan jenis pajak. Selain itu kantor-kantor yang melaksanakan sistem administrasi modern didukung sarana dan prasarana lebih baik, diterapkan kode etik pegawai, dan sistem penggajian dan remunerasi yang lebih baik. Hal inilah yang membedakan KPP di lingkup Kanwil DJP Jakarta Pusat dengan Kantor Pelayanan Pajak lainnya.

Secara umum, jika dilihat dari sistem dan struktur organisasi tidak ada perbedaan antara KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Pusat dengan Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar (LTO). Hal ini disebabkan keduanya telah melaksanakan sistem administrasi modern. Namun berdasarkan karakteristik Wajib Pajak yang dikelola, jenis pajak dan wilayah kerja / luas wilayah kedua KPP tersebut memiliki beberapa perbedaan. Adapun perbedaan KPP di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat dengan KPP di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) Wajib Pajak Besar (LTO), diantaranya sebagai berikut :

1. KPP di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) Wajib Pajak Besar (LTO) hanya mengelola Wajib Pajak besar secara nasional sedangkan KPP di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat mengelola Wajib Pajak menengah ke bawah secara regional, yaitu hanya Wajib Pajak di wilayah Jakarta Pusat.
2. KPP di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) Wajib Pajak Besar (LTO) hanya mengadministrasikan WP jenis badan usaha, sedangkan KPP di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat mengadministrasikan seluruh jenis WP, yaitu badan usaha dan orang pribadi, sehingga jenis pajak yang diperoleh juga akan berbeda.

Gambar 1.2
Flowchart Alur Berpikir Latar Belakang Masalah



Perbedaan-perbedaan akibat perubahan sistem administrasi modern tersebut diatas, yaitu sistem dan struktur organisasi, prasarana dan sarana, karakteristik Wajib Pajak dan lainnya diharapkan akan memberikan pengaruh dalam meningkatkan pencapaian penerimaan pajak bagi KPP tersebut. Pengaruh dari pelaksanaan sistem administrasi perpajakan dapat dianalisa dari dua cara, yaitu secara vertikal, yaitu perbedaan sebelum dan sesudah melaksanakan sistem administrasi modern, dan secara horizontal,

yaitu membandingkan KPP yang telah melaksanakan dengan KPP yang belum melaksanakan.

Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian dan analisa lebih lanjut mengenai pengaruh penerapan sistem administrasi modern pada Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Wilayah Jakarta Pusat terhadap realisasi penerimaan pajaknya.

1.2. Permasalahan

Reformasi sistem administrasi perpajakan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak merupakan salah satu kerangka kebijakan jangka menengah pemerintah dalam melaksanakan "*Good Governance*", "*Clean Governance*" dan pelayanan prima kepada masyarakat. Secara garis besar, salah satu tujuan yang hendak dicapai oleh reformasi administrasi perpajakan, yaitu tercapainya tingkat kepatuhan perpajakan (Tax Compliance) yang tinggi. Dengan tercapainya tujuan tersebut diatas diharapkan memberikan pengaruh terhadap optimalisasi penerimaan pajak.

Hal tersebut diatas didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Chaizi Nasucha pada tahun 2003 yang dikutip dari penulisan Sofyan (2005)⁴ bahwa dengan menggunakan analitic hierarchy process (AHP) dan obyek penelitian organisasi Direktorat Jenderal Pajak yang terdiri dari 19 Kanwil dan 173 KPP di seluruh Indonesia diperoleh salah satu kesimpulan dari penelitiannya adalah bahwa reformasi administrasi perpajakan mempunyai pengaruh besar terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Selain itu hasil penelitian yang dilakukan oleh Sofyan sendiri, dengan objek penelitian KPP LTO, menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara faktor-faktor struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi dan budaya organisasi dalam modernisasi terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

⁴ Sofyan, Marcus Taufan. Skripsi berjudul "Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Tahun 2004", STAN:2005

Namun berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tunjung (2004)⁵ menyimpulkan bahwa kebijakan pembentukan KPP Wajib Pajak Besar (LTO) belum efektif dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan (Tax Compliance) dan dalam realisasi pencapaian target penerimaan pajak kantor tersebut. Namun kebijakan pembentukan KPP Wajib Pajak Besar (LTO) lebih efisien dengan menggunakan ukuran rasio antara biaya pemungutan dengan realisasi penerimaan pajak.

Berkaitan dengan masalah efisiensi biaya yang berkaitan dengan kebijakan reformasi administrasi perpajakan, penelitian lainnya yang dilakukan Irawaty (2007)⁶ dengan obyek penelitian seluruh KPP di Indonesia periode tahun 2006 dan menggunakan metode analistik Stochastic Frontier dan Cost-to-Yield ratio diperoleh hasil, yaitu bahwa secara keseluruhan KPP di Indonesia memiliki efisiensi yang tinggi. Berdasarkan metode Cost-to-Yield ratio disimpulkan bahwa rata-rata KPP yang memiliki tingkat efisiensi cukup tinggi dipengaruhi reformasi administrasi perpajakan, tetapi jika dilihat dari metode Stochastic Frontier disimpulkan tidak ada perbedaan antara KPP modern dengan tidak modern dalam pengelolaan biaya.

Berdasarkan semua penelitian tersebut diatas bahwa ada sedikit perbedaan dalam kesimpulan dihasilkan. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh waktu penelitian, objek penelitian, data variabel yang digunakan dalam penelitian dan metode penelitian yang digunakan. Secara garis besar dari penelitian-penelitian tersebut menjelaskan bahwa kebijakan reformasi administrasi perpajakan yang dilaksanakan pemerintah saat ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga penerimaan pajak juga meningkat. Meskipun tingkat biaya atas pelaksanaan tersebut cukup besar akan tetapi efisiensi antara biaya pengumpulan pajak dengan penerimaan pajak cukup tinggi sehingga kebijakan ini terus dilanjutkan karena dinilai

⁵ Tunjung, M, Tesis berjudul "Analisis Efektifitas dan Efisiensi atas kebijakan pembentukan Kantor Pelayanan Wajib Pajak Besar (LTO) sebagai upaya peningkatan kinerja Direktorat Jenderal Pajak tahun 2002-2003": FEUI, Depok:2004

⁶ Irawaty, Shanty, Tesis berjudul "Pengukuran Efisiensi Biaya Administrasi Pajak Pada Kantor-Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia Tahun 2006", FEUI, Depok:2007.

cukup berhasil. Hal ini sesuai dengan pendapat Ter-minassian (1997) tentang cara pengumpulan penerimaan pajak di negara berkembang yang menyatakan bahwa Kebijakan sistem administrasi perpajakan yang sederhana sangat dibutuhkan untuk memastikan terjaminnya terkumpulnya pendapatan negara dari pajak. Hal ini mencegah terjadinya komplikasi yang timbul antara biaya administrasi dengan permasalahan dalam pengamanan tingkat kepatuhan. Hal tersebut sama saja dengan kerugian yang sangat mungkin terjadi (*potential loss*). Ada dua tujuan utama dari administrasi perpajakan, yaitu untuk menerapkan peraturan perpajakan secara seragam untuk mencapai penerimaan negara yang maksimal dengan biaya pengumpulan pajak (*collection cost*) yang minimal, serta untuk mencapai tingkat kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) dari Wajib Pajak.⁷

Oleh karena itu yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah setelah melaksanakan kebijakan modernisasi administrasi perpajakan pada KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Pusat selama periode 2005 dan 2006 terdapat peningkatan terhadap realisasi penerimaan pajak dan tingkat kepatuhan sukarela wajib pajak serta menurunkan tingkat rasio biaya pengumpulan pajak (*collection cost tax ratio*) dibandingkan sebelum melaksanakannya?
2. Bagaimanakah pengaruh kepatuhan wajib pajak, tingkat biaya pengumpulan (*collection cost*) dan kebijakan modernisasi administrasi perpajakan terhadap realisasi penerimaan pajak?

1.3. Hipotesis

Hipotesis yang dibentuk untuk menduga jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada rumusan masalah adalah :

1. Diduga dengan pelaksanaan kebijakan reformasi administrasi perpajakan pada KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Pusat akan memberikan pengaruh secara signifikan terhadap pencapaian peningkatan realisasi penerimaan pajak, Kepatuhan Wajib Pajak dan

⁷ Ter-Minassian, Teresa; Fiscal Federalism in Theory and Practise, Charles L. Vehorn And Ehtisham Ahmad, Tax Administration, IMF, Washington D.C.

efisiensi biaya pengumpulan pajak (*Cost Collection Tax*) dibandingkan sebelumnya. Dirumuskan sebagai berikut :

H_0 : Kebijakan reformasi administrasi perpajakan tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap faktor-faktor tersebut.

H_1 : Kebijakan reformasi administrasi perpajakan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap faktor-faktor tersebut.

2. Diduga kepatuhan Wajib Pajak, tingkat biaya pengumpulan dan kebijakan reformasi administrasi memiliki pengaruh positif terhadap realisasi penerimaan pajak. Dirumuskan sebagai berikut :

H_0 : Kepatuhan Wajib Pajak, tingkat biaya pengumpulan dan kebijakan reformasi administrasi tidak memiliki pengaruh positif terhadap realisasi penerimaan pajak.

H_1 : Kepatuhan Wajib Pajak, tingkat biaya pengumpulan dan kebijakan reformasi administrasi memiliki pengaruh positif terhadap realisasi penerimaan pajak.

1.4. Tujuan Penelitian

Dalam Penulisan ini, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai yaitu

1. Mengetahui dampak pelaksanaan reformasi administrasi perpajakan terhadap realisasi penerimaan pajak, kepatuhan wajib pajak dan tingkat biaya pengumpulan pajak pada KPP di lingkungan DJP Jakarta Pusat dibandingkan sebelum melaksanakannya (analisa vertikal) dan KPP yang belum melaksanakan di wilayah Jakarta (analisa horizontal).
2. Mengetahui pengaruh kepatuhan Wajib Pajak dan tingkat biaya pengumpulan pajak serta kebijakan reformasi administrasi perpajakan terhadap realisasi penerimaan pajak.

1.5. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Penelitian ini akan menganalisa mengenai pengaruh kebijakan reformasi Administrasi Perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Wilayah Jakarta terhadap realisasi penerimaan pajak pada tahun 2005 -2006. Hal ini disebabkan KPP di Kanwil DJP Jakarta Pusat merupakan pilot project

kebijakan reformasi administrasi dengan pembentukan KPP Pratama dan KPP Madya sebelum diterapkan pada KPP lainnya di seluruh wilayah Indonesia. Pemilihan waktu penelitian pada tahun 2005 dan 2006 disebabkan pelaksanaan kebijakan reformasi administrasi perpajakan pada KPP di Kanwil DJP Jakarta Pusat dilaksanakan keseluruhan pada tahun 2005 dan sampai dengan tahun 2006 dikarenakan pada tahun 2007 kebijakan ini telah diterapkan pada seluruh KPP di wilayah Jakarta sehingga tidak dapat dibandingkan.

Selain itu pembahasan dalam penelitian ini akan sangat luas karena banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak. Oleh karena itu peneliti akan membatasi penelitian terhadap beberapa faktor yang mempengaruhi penerimaan yang disesuaikan dengan pengaruh ditimbulkan kebijakan reformasi administrasi perpajakan, yaitu :

1. Penerimaan Pajak KPP terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) non migas, PPh migas, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak lainnya. Oleh karena itu penulis membatasi pada penerimaan pajak PPh non migas dan PPN.
2. Dalam mengukur tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Tax Compliance), banyak ukuran yang dapat digunakan dalam mengukurnya. Dalam penulisan ini, penulis mengukur tingkat kepatuhan Wajib Pajak dengan salah satu cara, yaitu membandingkan SPT Tahunan yang di lapor Wajib Pajak dengan Jumlah Wajib Pajak per jenis pajak (kepatuhan formal).
3. *Cost Collection* terdiri dari tiga unsur yaitu biaya pegawai, biaya barang dan biaya modal. Ketiga jenis biaya tersebut mempunyai unsur yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti menghitung *Collection Cost* dari dua unsur yaitu biaya pegawai dan biaya barang dengan menggunakan rasio antara kedua biaya tersebut dengan total biaya.

Waktu observasi yang dipilih adalah tahun 2005 sampai dengan 2006. Jumlah KPP yang diobservasi meliputi seluruh KPP yang berada di wilayah Jakarta pada saat observasi. Metode yang digunakan dengan membandingkan dengan KPP yang telah melaksanakan reformasi

administrasi perpajakan, yaitu Kanwil DJP Jakarta Pusat sebelum dan sesudah melaksanakannya (analisa vertikal) dan KPP Kanwil DJP Jakarta lainnya yang belum melaksanakannya (analisa horizontal). Pemilihan Kanwil DJP Jakarta lainnya penelitian ini dikarenakan Kanwil DJP Jakarta lainnya memiliki persamaan beberapa faktor dengan KPP Kanwil DJP Jakarta Pusat, seperti luas wilayah kerja, karakter Wajib Pajak, faktor perekonomian dan kemudahan perolehan data.

1.6. Manfaat Penulisan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara tidak langsung kepada para pembaca tentang pelaksanaan reformasi administrasi perpajakan di Indonesia. Selain itu penulisan ini dapat dijadikan bahan penulisan lebih lanjut mengenai upaya pencapaian penerimaan pajak.

1.7. Metodologi Dan Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metodologi yang digunakan untuk mengetahui besar pengaruh antara reformasi administrasi perpajakan, kepatuhan pajak (compliance) dan *Collection Cost* adalah dengan menggunakan statistik dan ekonometrik.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peneliti mencoba membuat model ekonometrik analisis yang digunakan dari fungsi tersebut, yaitu :

- Penerimaan Pajak = Fungsi (Kepatuhan, Biaya, Modernisasi)
- $Real_j = \beta_0 + \beta_n Patuh_{nj} + \beta_{n+1} Biaya_j + \beta_{n+2} Md_j + \epsilon$

Keterangan :

$Real_j$	= Realisasi Penerimaan pajak per KPP
β_0	= Konstanta/Intercept
β_n	= Koefisien dari Kepatuhan Wajib Pajak
β_{n+1}	= Koefisien dari Biaya (Collection cost)
β_{n+2}	= Koefisien dari dummy Variabel Kebijakan
ϵ	= Error term
$Patuh_{nj}$	= Kepatuhan WP tiap KPP
$Biaya_j$	= Collection Cost tiap KPP
Md_j	= Kebijakan reformasi administrasi perpajakan

Penerimaan pajak dihitung dengan realisasi penerimaan pajak tiap KPP di wilayah Jakarta. Kepatuhan WP dianalisis dengan analisis kuantitatif yaitu dengan menghitung tingkat kepatuhan formal dari Wajib Pajak, yaitu Jumlah SPT yang lapor dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di tiap KPP. Collection Cost terdiri dua bagian, yaitu total biaya yang dikeluarkan untuk biaya belanja pegawai dan biaya belanja barang. Modernisasi merupakan dummy variabel, yaitu jika $Md = 0$ maka KPP tersebut belum modernisasi dan jika $MD=1$ maka KPP tersebut telah modernisasi.

1.8. Sistematika Penulisan

Penulisan Tesis ini akan terbagi dalam 5 Bagian, dimana tiap-tiap bagian sebagai penunjang pembahasan permasalahan secara keseluruhan, adapun Bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

I. Pendahuluan.

Dalam Bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penulisan, ruang lingkup dan batasan penulisan, manfaat penulisan, hipotesa, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

II. Tinjauan Literatur

Bab ini akan memaparkan kajian pustaka berkaitan dengan penulisan tesis yang antara lain berkaitan dengan teori perpajakan, teori Administrasi perpajakan.

III. Gambaran Umum Data dan Fakta Objek Penelitian

Bab ini akan menjelaskan tentang gambaran umum setiap KPP di wilayah Jakarta yang dikelompokkan berdasarkan Kantor Wilayah. Selain itu akan dijelaskan karakteristik dasar KPP/Kanwil yang telah melaksanakan Modernisasi.

IV. Analisis pengaruh pelaksanaan reformasi sistem administrasi perpajakan pada KPP di Wilayah Jakarta.

Bab ini akan membahas tentang hasil pengujian terhadap hipotesa penelitian dengan menggunakan model-model pengujian seperti yang dijelaskan dalam metode penelitian dalam Bab I.

V. Kesimpulan dan Rekomendasi

Dalam Bab ini akan disimpulkan mengenai keseluruhan hasil penelitian dan memberikan beberapa rekomendasi bagi Direktorat Jenderal Pajak guna meningkatkan penerimaan pajak.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Tentang Perpajakan

Setiap negara dalam menjalankan pemerintahannya memerlukan dana yang cukup besar dalam membiayai pengeluaran negara, yaitu biaya pembangunan. Sumber pendapatan masing-masing negara berbeda-beda tergantung dari sumber yang dimiliki negara yang bersangkutan. Di Indonesia yang menjadi sumber pendapatan negara adalah pajak.

Pajak sebagai sumber pendapatan negara, hal ini sangat sesuai dengan pengertian dan definisi pajak di rumuskan oleh beberapa ahli. Diantaranya Soemitro(1988) mendefinisikan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikular ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.⁷

Definisi lain diberikan oleh Andriani dikutip dari Mansyuri (2002) mendefinisikan pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang menurut perundang-undangan tanpa mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk yang tujuannya untuk digunakan membiayai pengeluaran publik sehubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.⁸

Sedangkan menurut Sommerfeld dalam buku *"An Introduction to Taxation"* dikutip dari Mansyuri (2002) menyatakan bahwa *"A tax can be defined meaningfully as any nonpenal yet compulsory transfer of resource from private to the public sector, levied on the basis of predetermined criteria and without receipt of a specific benefit of equal, in order to accomplish some of a nation's economic and social objectives."*⁹

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas, ada beberapa unsur-unsur dalam pengertian pajak, yaitu:

⁷ Safri Nurmanto, "Pengantar Perpajakan", Kelompak Yayasan Obor, Jakarta; 2003

⁸ R.Mansyuri, "Pajak Penghasilan Lanjutan Pasca Reformasi 2000", YP4, Jakarta; 2002

⁹ R.Mansyuri, *Ibid*

1. Iuran kepada negara, merupakan keikutsertaan warga negara kepada negara dalam pembangunan
2. Yang dapat dipaksakan, artinya bahwa pajak merupakan kewajiban yang dapat dipaksakan bagi warga negara yang mempunyai kemampuan sesuai peraturan undang-undang.
3. Yang terutang berdasarkan undang-undang. Artinya bahwa Ada kepastian dalam hukum mengenai kriteria-kriteria yang dikenakan pajak, seperti subjek pajak, objek pajak, tarif pajak dan kriteria yang lainnya.
4. Tanpa mendapat prestasi kembali langsung (tegen prestasi). Artinya, bahwa warga negara tidak akan mendapatkan timbal jasa secara langsung dari pajak yang dibayarkan.
5. Untuk digunakan membiayai pengeluaran publik sehubungan dengan tugas negara menyelenggarakan pemerintahan. Artinya bahwa Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dari beberapa pengertian dan unsur tersebut di atas mengenai pajak sebagai sumber pendapatan negara, pajak juga memiliki beberapa fungsi dalam kehidupan negara dan masyarakat. Adapun fungsi-fungsi pajak tersebut, adalah sebagai berikut :¹⁰

1. Fungsi budgetair, yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai undang-undang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.
2. Fungsi regulierend, merupakan fungsi dimana pajak-pajak akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan. Pajak digunakan sebagai alat kebijaksanaan.
3. Fungsi demokrasi, yaitu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong-royong, termasuk kegiatan pemerintah dan

¹⁰ Safri Nurmanto, OPcit.

pembangunan. Fungsi ini sering dikaitkan dengan hak seseorang untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah apabila ia telah melakukan kewajibannya membayar pajak, bila pemerintah tidak memberikan pelayanan yang baik, pembayar pajak bisa melakukan protes (*complaint*) secara langsung maupun tidak langsung.

4. Fungsi distribusi, yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.

2.2. Konsep Reformasi Perpajakan (*Tax Reform*)

Reformasi perpajakan yang baik sangat penting dalam membangun pondasi perpajakan nasional yang efektif, efisien serta kokoh. Selain itu pemungutan pajak pun harus dilakukan berdasarkan prinsip/asas perpajakan dan kriteria pemungutan yang baik sehingga tujuan pemungutan pajak dapat dicapai dan diwujudkan. Oleh karena itu, otoritas perpajakan secara terus-menerus melakukan perbaikan dan pembaruan (reformasi) terhadap sistem perpajakan sehingga menjadi semakin ideal.

Reformasi perpajakan perlu dilakukan karena adanya sistem perpajakan yang didesain secara tidak tepat sehingga akan berakibat menimbulkan berbagai masalah antara lain penerimaan pajak yang tidak efisien, distorsi ekonomi sebagai akibat dari beban pajak yang berlebihan, ketidakadilan, dimana rakyat yang berpenghasilan rendah membayar pajak yang lebih besar, sementara rakyat yang berkecukupan membayar pajak yang relatif lebih kecil. Selain karena kelemahan administrasi perpajakan, kondisi ini juga disebabkan oleh kompleksnya Undang-Undang Perpajakan dan prosedurnya, lemahnya sistem informasi yang ada, korupsi dan intervensi politik.

Radian (1980) menyatakan reformasi perpajakan pada dasarnya merupakan perbaikan (*improvement*) menuju keadaan perpajakan yang lebih baik. Reformasi menuntut perubahan menuju paradigma baru yang dianggap ideal karena adanya perubahan kehidupan di segala bidang termasuk politik, ekonomi dan sosial. Dalam hal ini reformasi perpajakan sebagai bagian dari

kebijakan publik yang meliputi dari dua aspek, yaitu formulasi kebijakan dalam bentuk peraturan dan pelaksanaan dari peraturan itu sendiri.¹¹

Williamson (1994: 60) menyatakan bahwa reformasi perpajakan meliputi perluasan basis perpajakan, perbaikan administrasi perpajakan, mengurangi terjadinya penghindaran dan manipulasi pajak, serta mengatur pengenaan pada asset yang berada di luar negeri.

Aviliani (2003: 27) berpendapat bahwa tujuan utama reformasi perpajakan adalah untuk menegakkan kemandirian ekonomi dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengerahkan kemampuan sendiri. Secara bertahap, pajak diharapkan bisa mengurangi ketergantungan utang luar negeri. Dalam hal ini, reformasi perpajakan akan menjadikan sistem yang berlaku menjadi lebih sederhana, yang mencakup penyederhanaan jenis pajak, tarif pajak dan pembayaran pajak. Meliputi pula pembenahan aparatur perpajakan yang menyangkut prosedur, tata kerja, disiplin dan mental. Dengan reformasi perpajakan secara menyeluruh, diharapkan jumlah wajib pajak akan semakin luas serta beban pajak akan makin adil dan wajar, sehingga mendorong wajib pajak untuk membayar kewajibannya dan menghindarkan diri dari aparat pajak yang mengambil keuntungan untuk kepentingan pribadi.

Menurut Bank Dunia (*World Bank*), reformasi perpajakan di negara-negara berkembang dapat merupakan suatu komponen dari reformasi fiskal sebagai penyesuaian struktural (*structural adjustment*) untuk mengurangi distorsi insentif ekonomi dan akibat dari ketidakefisienan dan ketidakadilan alokasi sumber daya. Walau pola pemajakan antar negara dapat berbeda karena faktor ekonomi, sosial, budaya dan histori. Namun pada umumnya suatu sistem perpajakan (*tax system*) yang kurang baik didesain atau difungsikan secara kurang tepat dapat menimbulkan berbagai masalah, yaitu:

1. Ketidak cukupan penerimaan
2. Distorsi yang mengurangi kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi.

¹¹ Pandiangan,Liberti, "Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan",Gramedia, Jakarta:2008

3. Ketidakadilan dalam pemerataan beban pajak baik horizontal maupun vertikal
4. Kompleksitas administrasi.

Sehubungan dengan beberapa masalah tersebut, berdasarkan *World Bank* dalam *Lessons of tax Reform (1991:17-27)* mengemukakan bahwa pembaruan perpajakan (*Tax Reform*) pada umumnya diarahkan untuk mencapai beberapa sasaran, yaitu:

1. Untuk mengatasi ketimpangan fiskal dan penerimaan pajak yang tidak memadai (*fiscal imbalance and insufficient tax revenue*). Sistem perpajakan yang baik adalah sistem perpajakan yang mampu menghasilkan penerimaan yang cukup, stabil, fleksibel dan berkelanjutan.
2. Mencegah timbulnya distorsi dalam alokasi sumber daya yang dapat menurunkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi, pajak sering kali menciptakan distorsi dalam ekonomi dengan mengurangi pendapatan riil dari masyarakat. Penurunan dalam pendapatan riil sering disebut sebagai biaya efisiensi ekonomi dari pajak. Sistem pajak yang dirancang dan diterapkan secara tidak baik akan mendorong perusahaan atau individu untuk melakukan penghindaran dan penggelapan pajak sehingga akan semakin menciptakan kesalahan dalam alokasi sumber daya. Oleh karena itu reformasi perpajakan harus mampu mengurangi biaya efisiensi dari pajak.
3. Ketentuan atau ketetapan yang tidak memadai untuk mewujudkan keadilan sistem pajak yang tidak layak akan menciptakan beban pajak (*tax burden*) yang tinggi. Dalam banyak negara berkembang, pajak efektif dari penduduk yang kaya adalah cukup lemah. Hal ini akan menyebabkan keadilan horizontal dan vertikal menjadi terganggu. Untuk itu, maka reformasi perpajakan harus mampu memastikan bahwa struktur pajak menjadi lebih adil baik secara horizontal maupun vertikal.
4. Memperkuat administrasi perpajakan dan meminimalisasi biaya administrasi perpajakan serta meningkatkan kepatuhan.

Gill dikutip dari Mansyury (2002) menyatakan bahwa suatu sistem penerimaan negara yang mengurus masalah pajak perlu direformasi dengan sedikitnya 4 (empat) alasan utama, yaitu :¹²

1. Ketika hukum dan kebijakan pajak menciptakan potensi peningkatan penerimaan pajak, jumlah aktual pajak yang mengalir ke kas negara tergantung pada efisiensi dan efektivitas administrasi penerimaan negara.
2. Kualitas dari administrasi penerimaan pajak mempengaruhi iklim investasi dan pengembangan sektor swasta.
3. Administrasi perpajakan secara rutin kerap muncul dalam daftar teratas organisasi dengan kasus korupsi tertinggi.
4. Reformasi perpajakan diperlukan untuk memungkinkan sistem perpajakan mengikuti perkembangan terbaru dalam aktivitas bisnis dan pola penghindaran pajak yang semakin canggih.

Keberhasilan pelaksanaan reformasi perpajakan dapat diukur dengan beberapa parameter, antara lain apakah reformasi perpajakan yang dilaksanakan mampu meningkatkan kinerja ekonomi dan mempengaruhi ukuran pemerintahan, apakah struktur perpajakan yang baru mempengaruhi desentralisasi pemerintahan dan mampu bertahan lama, dan terakhir bagaimana suatu reformasi perpajakan dapat memberikan kontribusi terhadap kemakmuran dan kestabilan demokrasi. Reformasi perpajakan dilakukan untuk mewujudkan terpenuhinya penerimaan pajak pada sistem dan administrasi perpajakan yang adil, efisien, serta dapat meminimalisasi benturan dengan pertumbuhan perekonomian yang terkait melalui fungsi pengaturan.

2.3. Pengertian dan Peranan Administrasi Perpajakan

Tujuan pemerintah melakukan pemungutan pajak adalah untuk mengumpulkan penerimaan negara guna membiayai kegiatan pemerintah. Dalam pemungutan dan pengelolaan pajak, pemerintah tidak boleh

¹² R.Mansyuri, *OPCit*

mengabaikan kepentingan masyarakat, artinya kegiatan tersebut jangan sampai menghambat pertumbuhan ekonomi. Pemungutan yang terlalu tinggi akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, terutama pada negara berkembang seperti Indonesia ini.

Seperti diketahui, sistem perpajakan suatu negara harus mencerminkan tujuan ekonomi, politik dan sosial dari pemerintahnya. Dengan demikian administrasinya harus pula mampu melaksanakannya secara adil dan berdaya guna. Administrasi pajak sebagai suatu sistem merupakan subsistem dari keuangan negara. Sedangkan keuangan negara merupakan suatu subsistem dari administrasi negara dan administrasi negara pun merupakan subsistem dari kehidupan kenegaraan pada umumnya. Dengan demikian, setiap sistem merupakan suatu subsistem dari sistem yang lebih luas sehingga satu dengan lainnya saling terkait dalam suatu lingkungan yang kompleks.

Faktor yang menunjang keberhasilan pengelolaan pajak adalah administrasi pajak, yang tentunya harus efisien dan efektif. Administrasi pajak yang baik harus meliputi tiga aspek yaitu:

- a. Fungsi,
- b. Sistem, dan
- c. Lembaga.

Ketiga aspek tersebut tidak dapat dipisahkan atau berdiri sendiri. Mansury (2002) menyatakan bahwa : "*Tax Administration is the key to tax policy*" Administrasi perpajakan merupakan salah satu unsur pokok dalam suatu sistem perpajakan. Menurutnya administrasi perpajakan mengandung tiga hal pokok yaitu :

1. Suatu instansi atau badan yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan pemungutan pajak.
2. Orang-orang yang terdiri dari pejabat dan pegawai yang bekerja pada instansi perpajakan yang secara nyata melaksanakan kegiatan pemungutan pajak.
3. Proses kegiatan penyelenggaraan pemungutan pajak yang ditatalaksanakan sedemikian rupa, sehingga dapat mencapai sasaran

yang telah digariskan dalam kebijakan perpajakan, berdasarkan sarana hukum yang ditentukan oleh undang-undang perpajakan dengan efisien.

Selain itu, penerimaan pajak yang dihasilkan dipengaruhi oleh baik kebijakan perpajakan maupun administrasi perpajakan. Perhatian utama dari kebijakan perpajakan adalah untuk menjamin elastisitas atau responsifitas realisasi penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dan ini bergantung pada bagaimana penetapan dasar pengenaan pajak (*tax base*) dan tarif pajak. Sedangkan administrasi perpajakan mengasumsikan dasar pengenaan pajak dan tarif telah ditetapkan sebagaimana mestinya dan berupaya semaksimal mungkin untuk menjamin potensi penerimaan pajak dapat direalisasikan dengan efektif dan efisien. Sebagaimana yang dikutip oleh Mansury (2002) dalam bukunya dasar-dasar bagi terselenggaranya administrasi perpajakan yang baik, meliputi :

- a. Kejelasan dan kesederhanaan dari ketentuan undang-undang yang memudahkan bagi administrasi dan memberikan kejelasan bagi Wajib Pajak.
- b. Kesederhanaan akan mengurangi penyeludupan pajak. Kesederhanaan dimaksud, baik dalam perumusan yuridis, yang memberikan kemudahan untuk dipahami, maupun kesederhanaan untuk dilaksanakan oleh aparat dan untuk dipatuhi pajaknya oleh Wajib Pajak.
- c. Reformasi dalam bidang perpajakan yang realistis harus mempertimbangkan kemudahan tercapainya efisiensi dan efektivitas administrasi perpajakan, semenjak dirumuskannya kebijakan perpajakan.
- d. Administrasi perpajakan yang efisien dan efektif perlu disusun dengan memperhatikan penataan, pengumpulan, pengolahan dan pemanfaatan informasi tentang Subyek dan Obyek Pajak.

Selain itu Tait (1988) mengatakan bahwa di negara berkembang administrasi perpajakan seringkali merupakan kebijakan perpajakan. Di kebanyakan negara, hal krusial yang penting dari keefektifan administrasi

perpajakan kadang kala terlalu dipandang ketika pernyataan-pernyataan ambisius dibuat tentang efisiensi, kesamaan, netralitas serta dampak dari alternatif pajak lain yang berpengaruh pada tabungan, motivasi kerja serta pengambilan resiko.¹³ Pandangan Tait ini lebih menonjolkan tentang kesamaan antara administrasi perpajakan dengan kebijakan perpajakan di negara berkembang, termasuk di Indonesia.

Nowak (1970) berpendapat bahwa administrasi perpajakan merupakan kunci bagi berhasilnya pelaksanaan kebijakan perpajakan. Tugas administrasi perpajakan tidak membuat kebijakan atau ketentuan undang-undang, tidak memutuskan Subjek Pajak serta tidak menentukan objek pajak tetapi administrasi pajak perlu disusun dengan sebaik-baiknya sehingga mampu menjadi instrumen yang bekerja secara efisien dan efektif dalam penyelenggaraan pemungutan pajak sesuai dengan hukum pajak positif.

Berkaitan dengan administrasi pajak yang baik di negara-negara berkembang, laporan Bank Dunia menyatakan sebagai berikut:

"The best tax administration is not simply one that collects the most revenue. How that revenue is raised - that is, the effect of the revenue-generation effort on equity, on the political fortunes of governments, and on the level of economic welfare - may be equally important"

Menurut Shome (1995), Kebijakan perpajakan dan administrasi perpajakan sangatlah berkaitan. Sementara kebijakan perpajakan diharapkan memiliki orientasi dinamis untuk merespon perubahan-perubahan yang cepat dalam perekonomian, administrasi perpajakan itu sendiri diharapkan berkembang dalam suatu dinamika internal untuk mendukung penerapan atau implementasi kebijakan perpajakan secara efektif. Dalam mendesain suatu kebijakan perpajakan yang sukses, harus diperhatikan kendala administratif dan ukuran-ukuran untuk mengembangkan administrasi perpajakan sehingga dapat membantu implementasi kebijakan perpajakan tersebut. Secara sederhana keterkaitan ini dapat digambarkan sebagai berikut, kebijakan perpajakan yang idealis menyebabkan administrasi

¹³ Tait, Alan A. , "Value Added Tax, *International Practise and Problems*", IMF, Washington D.C.;1988

perpajakan menjadi lebih rumit, sementara administrasi perpajakan yang tidak efektif melemahkan efektivitas kebijakan.

Bird (1992) berpendapat makin baik desain sistem perpajakan dan persamaan perlakuan serta makin kuatnya administrasi perpajakan adalah jalan satu-satunya untuk mengatasi penghindaran/ penggelapan pajak. Hal-hal utama yang sangat dibutuhkan untuk reformasi perpajakan adalah keinginan nyata dari pemerintah untuk mengarahkan serta kebijakan dan administrasi perpajakan yang diinstitutional-kan dengan baik.¹⁴

2.4. Kaitan Reformasi Administrasi Perpajakan Dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Pada dasarnya salah satu sasaran reformasi administrasi perpajakan adalah mendorong kepatuhan wajib pajak secara sukarela yang pada gilirannya akan meningkatkan kinerja pemungutan pajak. Pemberian denda terhadap pelanggar pajak bukan merupakan sasaran administrasi perpajakan. Kepatuhan sukarela dapat ditingkatkan apabila administrasi berhasil menetapkan bahwa ketidakpatuhan dapat terdeteksi dan denda dapat diterapkan secara efektif.

Menurut Tax Glossary dikutip dari Mansyury (2002) mengatakan bahwa "*Tax Compliance is the degree to which tax payers respond to their statutory duty to declare their income for calculation of income tax, sales tax, etc, and to pay the tax due in timely manner*". Sedangkan menurut Roth, Scholz dan White berpendapat tentang kepatuhan, "*Compliance with reporting requirement means that tax payer files all require tax returns at proper time and that the returns accurately report tax liability in accordance with the internal revenue code, regulation, and court decision applicable at the time return is filled*"

Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa kepatuhan pajak merupakan tingkat dimana wajib pajak memberikan respon yang baik terhadap kewajiban perpajakannya. Respon tersebut dilakukan dengan

¹⁴ Bird, Richard M. "Tax Policy and Economic Development", John Hopkins University Press Baltimore & London; 1992

mengungkapkan penghasilan/pendapatannya secara benar dan kemudian menentukan berapa besarnya pajak terhutang, serta membayarnya secara tepat waktu. Namun, pada kenyataannya tidak semua wajib pajak patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Ketidapatuhan ini dapat berupa penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan/atau penyelundupan pajak (*tax evasion*). Dengan demikian, jelas bahwa salah satu tolok ukur untuk menunjukkan baik atau buruknya administrasi pajak adalah dengan mengukur tinggi atau rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak (*taxpayer's compliance*).

Menurut Surjoputro dan Widodo dikutip dari Mansyury(2002), pada hakekatnya kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi perpajakan yang meliputi *tax service* dan *tax enforcement*. Langkah-langkah perbaikan administrasi diharapkan dapat mendorong kepatuhan wajib pajak melalui dua cara yaitu pertama, wajib pajak patuh karena mendapatkan pelayanan yang baik, cepat, dan menyenangkan serta pajak yang mereka bayar akan bermanfaat bagi pembangunan bangsa. Kedua, Wajib Pajak akan patuh karena sanksi berat akibat pajak yang tidak mereka laporkan yang terdeteksi oleh sistem informasi dan administrasi perpajakan serta kemampuan *crosschecking* informasi dengan instansi lain.

Reformasi administrasi mempunyai kunci penting untuk meningkatkan kinerja sektor publik yang meliputi ekonomi, produktivitas, efisiensi dan efektivitas khususnya melalui perubahan kultur administrasi. Bird dan Jantscher menyebutkan bahwa berdasarkan pengalaman negara-negara berkembang ada tiga muatan pokok yang dibutuhkan untuk keberhasilan reformasi administrasi perpajakan, yaitu :¹⁵

1. Struktur pajak perlu disederhanakan untuk kemudahan, kepatuhan dan administrasi.
2. Strategi reformasi yang cocok untuk kondisi khusus masing masing negara harus dikembangkan.

¹⁵ Bird, Richard M and Milka Casanegra de Jantscher, 1992, *Improving Tax Administration In Developing Countries*, International Monetary Fund.

3. Ada komitmen politik yang kuat terhadap peningkatan administrasi perpajakan.

Bird dan Casanegra (1992) juga menyatakan sangat besarnya jurang kepatuhan (*tax gap*), yaitu selisih antara penerimaan yang sesungguhnya dengan pajak potensial dilihat dari tingkat kepatuhan dari masing-masing sektor perpajakan. Penyebab *tax gap* terutama lemahnya administrasi perpajakan. Keberhasilan pengumpulan pajak hanyalah merupakan akibat semakin sempitnya jurang kepatuhan. Semakin patuh rakyat membayar pajak berarti jurang kepatuhan semakin sempit dan berarti pemungutan pajak lebih berhasil. Sebaliknya, semakin lebar jurang kepatuhan maka semakin sedikit pajak yang berhasil dikumpulkan. Upaya mengurangi kesenjangan kepatuhan dilakukan melalui penyempurnaan sistem administrasi perpajakan. Rendahnya *tax ratio* menunjukkan terdapatnya kesenjangan yang tajam dimana hal ini terkait erat dengan administrasi pajak. Masalah lemahnya administrasi perpajakan dialami oleh banyak negara sedang berkembang.

2.5. Kaitan Reformasi Administrasi Perpajakan Dengan Biaya Pelaksanaannya

Keinginan pemerintah untuk melaksanakan kebijakan reformasi administrasi perpajakan untuk meningkatkan penerimaan pajak memiliki konsekuensi yang cukup besar terhadap biaya/ cost yang harus dikeluarkan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

James dan Nobes menyatakan bahwa biaya administrasi seharusnya meliputi semua biaya dari penggunaan sumber daya sektor publik untuk mengoperasikan setiap jenis pajak. Biaya tersebut terdiri dari upah dan gaji pegawai serta akomodasi dan material yang digunakan. Sementara para ahli ekonomi lainnya secara sederhana mendefinisikan biaya administrasi sebagai seluruh biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengadministrasikan pajak.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi biaya administrasi pajak. Musgrave (1989) menyatakan bahwa biaya administrasi per dollar

pendapatan akan meningkat seiring dengan peningkatan kompleksitas peraturan pajak. Inilah yang mengakibatkan mengapa biaya administrasi Pajak Penghasilan akan lebih besar dibandingkan dengan pajak atas gaji (*Payroll Tax*).

Parthasarathi Shome (1992) mengungkapkan bahwa biaya administrasi pajak sangat dipengaruhi oleh beberapa kompleksitas proses administrasi itu sendiri. Dinyatakan bahwa semakin kompleks kegiatan pengadministrasian akibat pentingnya menjamin kebenaran pelaporan dari pembayar pajak dengan adanya berbagai peraturan pembebasan, pengurangan biaya dan penetapan beragam tarif maka semakin kurang efektif administrasi pajak dalam mengumpulkan potensi penerimaan. Dan sejalan dengan itu, efisiensi akan terus menurun akibat meningkatnya biaya pemungutan yang harus dikeluarkan.

Sebagai salah satu unsur pokok sistem perpajakan, administrasi perpajakan memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemungutan pajak terutama untuk mendukung kebijakan perpajakan (*tax policy*) yang ditetapkan oleh pemerintah. Ter-Minassian (1997) berpendapat tentang bagaimana dana pajak yang terkumpul diorganisasikan di negara berkembang serta negara-negara lain yang dalam tahap transisi ke arah orientasi ekonomi pasar, kebijakan sistem perpajakan serta administrasi yang sederhana akan sangat dibutuhkan untuk memastikan terjaminnya terkumpulnya pendapatan negara dari pajak. Terjadinya komplikasi akan berakibat timbulnya biaya administratif serta permasalahan dalam pengamanan tingkat kepatuhan. Hal tersebut sama saja dengan kerugian yang sangat mungkin terjadi (*potential loss*). Sangatlah penting untuk menanamkan dalam ingatan kita bahwa dua tujuan utama dari administrasi perpajakan adalah untuk menerapkan peraturan perpajakan secara seragam untuk mencapai penerimaan negara yang maksimal dengan biaya pengumpulan pajak (*collection cost*) yang minimal, serta untuk mencapai tingkat kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) dari WP.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

3.1. Gambaran Umum Kanwil DJP Jakarta

Jakarta, sebagai ibukota negara Republik Indonesia, memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, yaitu sebesar 8,96 juta jiwa (susenas 2006), dan tingkat PDRB yang cukup besar, yaitu sebesar Rp 501,85 trilyun rupiah (2006), merupakan potensi bagi penerimaan pajak. Hal ini merupakan tugas bagi Direktorat Jendral Pajak untuk menggali dan mengoptimalisasi penerimaan pajak dari wilayah ini.

Dalam mengoptimalisasi pencapaian penerimaan pajak dari provinsi DKI Jakarta, DJP membagi wilayah kerja dalam beberapa Kantor Wilayah (Kanwil) sesuai dengan pembagian wilayah administrasi provinsi Jakarta. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pengawasan dan pelaksanaan dalam mengoptimalisasi penerimaan pajak, sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.473/KMK.01/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Berdasarkan KMK tersebut diatas, provinsi DKI Jakarta dibagi menjadi 5(lima) Kantor Wilayah, yaitu :

1. Kantor Wilayah DJP Jakarta I (Jakarta Pusat)
2. Kantor Wilayah DJP Jakarta II (Jakarta Barat)
3. Kantor Wilayah DJP Jakarta III (Jakarta Selatan)
4. Kantor Wilayah DJP Jakarta IV (Jakarta Timur)
5. Kantor Wilayah DJP Jakarta V (Jakarta Utara)

Kelima Kanwil Jakarta tersebut memiliki wilayah kerja berdasarkan kotamadya, yaitu Kanwil DJP Jakarta Pusat memiliki wilayah kerja mencakup kotamadya Jakarta Pusat, Kanwil DJP Jakarta Barat memiliki wilayah kerja kotamadya Jakarta Barat, dan seterusnya sesuai dengan nama kanwil tersebut.

Dalam pelaksanaan kerjanya dalam mengoptimalisasi penerimaan pajak dan mempermudah pengawasannya, setiap kanwil dibantu dan terbagi menjadi

beberapa unit kerja KPP, Karikpa dan KPPBB, sebagaimana terlihat dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Pembagian Unit kerja Kanwil Provinsi DKI Jakarta
Berdasarkan KMK No.443/KMK.01./2001

No.	Kanwil Jakarta Pusat	Kanwil Jakarta Timur	Kanwil Jakarta Selatan	Kanwil Jakarta Utara	Kanwil Jakarta Barat
1	KPP Jakarta Gambir Satu	KPP Jakarta Matraman	KPP Jakarta Setiabudi Satu	KPP Jakarta Penjaringan	KPP Jakarta Palmerah
2	KPP Jakarta Gambir Dua	KPP Jakarta Jatinegara	KPP Jakarta Setiabudi Dua	KPP Jakarta Pademangan	KPP Jakarta Gregoj
3	KPP Jakarta Gambir Tiga	KPP Jakarta Pulo Gadung	KPP Jakarta Tebet	KPP Jakarta Tanjung Priok	KPP Jakarta Taman Sari Satu
4	KPP Jakarta Sawah Besar	KPP Jakarta Cakung Satu	KPP Jakarta Kebayoran Baru Satu	KPP Jakarta Koja	KPP Jakarta Taman Sari Dua
5	KPP Jakarta Kemayoran	KPP Jakarta Cakung Dua	KPP Jakarta Kebayoran Baru Dua	KPP Jakarta Kelapa Gading	KPP Jakarta Tambora
6	KPP Jakarta Cempaka Putih	KPP Jakarta Kramat Jati	KPP Jakarta Kebayoran Lama	KPP Jakarta	KPP Jakarta Cengkareng
7	KPP Jakarta Menteng Satu	KPPBB Jakarta Timur Satu	KPP Jakarta Mampang Prapatan	KPPBB Jakarta Utara Satu	KPP Jakarta Kebun Jenuk
8	KPP Jakarta Menteng Dua	Karikpa Jakarta Satu	KPP Jakarta Pancoran	KPPBB Jakarta Utara Dua	KPPBB Jakarta Barat Satu
9	KPP Jakarta Senen		KPP Jakarta Cilandak	Karikpa Jakarta Empat	KPPBB Jakarta Barat Dua
10	KPP Jakarta Tanah Abang Satu		KPP Jakarta Pasar Minggu		Karikpa Jakarta Tujuh
11	KPP Jakarta Tanah Abang Dua		KPPBB Jakarta Selatan Satu		Karikpa Jakarta Delapan
12	KPPBB Jakarta Pusat Satu		KPPBB Jakarta Selatan Dua		
13	KPPBB Jakarta Pusat Dua		KPPBB Jakarta Selatan Tiga		
14	Karikpa Jakarta Lima		Karikpa Jakarta Dua		
15	Karikpa Jakarta Enam		Karikpa Jakarta Tiga		

Dari ketiga jenis unit kerja KPP mempunyai tugas masing-masing dalam mengoptimalkan penerimaan pajak, yaitu :

1. Unit kerja KPP mempunyai tugas untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, yaitu Pajak penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai serta Pajak lainnya, kecuali Pajak Bumi dan Bangunan, dengan cara melakukan ekstensifikasi Wajib Pajak dan menerima laporan SPT dari Wajib Pajak.
2. Unit kerja Karikpa bertugas untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dengan melakukan pemeriksaan terhadap SPT yang dilaporkan oleh Wajib Pajak di KPP.

3. Unit kerja KPPBB bertugas mengoptimalkan penerimaan pajak dari jenis Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah dan bangunan yang dimiliki oleh para Wajib Pajak.

Dengan demikian para Wajib Pajak akan menemui ketiga unit kerja tersebut dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan jenis pajaknya.

3.2. Gambaran Pelaksanaan Modernisasi pada Kanwil DJP Jakarta Pusat

Keberhasilan Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar (LTO), sebagai pilot project pelaksanaan modernisasi sistem administrasi perpajakan, dalam mengamankan penerimaan negara dan meningkatkan tingkat kepuasan Wajib Pajak, menjadi dasar awal pelaksanaan modernisasi sistem administrasi perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak yang lainnya.

Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.01/2004 jo. 167/KMK.01/2005 dibentuklah KPP Madya dan KPP Pratama di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat sebagai pilot project dibentuknya kantor pelayanan pajak dengan sistem administrasi modern, yaitu dibentuknya KPP Madya (MTO) dan KPP Pratama (STO). Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tersebut, terdapat beberapa perubahan yang terjadi pada Kanwil DJP Jakarta Pusat, diantaranya sebagai berikut :

1. Jenis dan wilayah kerja KPP

Pelaksanaan modernisasi pada Kanwil DJP Jakarta Pusat memberikan dampak perubahan pada jenis dan wilayah kerja KPP sebagaimana terdapat pada **Tabel 3.2**.

Berdasarkan **Tabel 3.1** dan **Tabel 3.2**. terlihat ada perbedaan bentuk dan wilayah kerja KPP pada Kanwil DJP Jakarta Pusat sebelum dan sesudah melaksanakan modernisasi administrasi perpajakan. Perbedaan tersebut antara lain, adalah :

- a. Perubahan jenis KPP, sebelum modernisasi Kanwil DJP Jakarta Pusat terbagi dalam tiga jenis KPP, yaitu KPP, Karikpa dan

KPPBB (Tabel 3.1). Setelah modernisasi, Kanwil DJP Jakarta Pusat terbagi dalam dua jenis KPP, yaitu KPP Madya dan KPP Pratama (Tabel 3.2).

Tabel 3.2
Pembagian wilayah Kerja Kanwil DJP Jakarta Pusat
Sebelum dan Sesudah Modernisasi

Sebelum Modernisasi		Setelah Modernisasi	
Nama KPP	Wilayah Kerja	Nama KPP	Wilayah Kerja
KPP Jakarta Gambir Satu	1. Kel. Gambir	KPP Pratama Jakarta Gambir Satu	1. Kel. Gambir
KPP Jakarta Gambir Dua	2. Kel. Kebon Kelapa	KPP Pratama Jakarta Gambir Dua	1. Kel. Cideng
KPP Jakarta Gambir Tiga	1. Kel. Cideng	KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga	2. Kel. Petojo Selatan
KPP Jakarta Gambir Tiga	2. Kel. Petojo Sefatan	KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga	1. Kel. Petojo Utara
KPP Jakarta Menteng Satu	1. Kel. Petojo Utara	KPP Pratama Jakarta Gambir Empat	2. Kel. Duri Pulo
KPP Jakarta Menteng Satu	2. Kel. Duri Pulo	KPP Pratama Jakarta Menteng Satu	1. Kel. Kebon Kelapa
KPP Jakarta Menteng Dua	1. Kel. Kebon Sirih	KPP Pratama Jakarta Menteng Dua	1. Kel. Kebon Sirih
KPP Jakarta Menteng Dua	2. Kel. Gondangdia	KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga	1. Kel. Menteng
KPP Jakarta Tanah Abang Satu	1. Kel. Menteng	KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu	2. Kel. Pegangsaan
KPP Jakarta Tanah Abang Dua	2. Kel. Pegangsaan	KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua	3. Kel. Cikini
KPP Jakarta Tanah Abang Dua	3. Kel. Cikini	KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga	1. Kel. Gondangdia
KPP Jakarta Tanah Abang Dua	4. Kel. Cikini	KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga	1. Kel. Karet Tengsin
KPP Jakarta Senen	1. Kel. Karet Tengsin	KPP Pratama Jakarta Senen	1. Kel. Petamburan
KPP Jakarta Cempaka Putih	2. Kel. Bendungan Hilir	KPP Pratama Cempaka Putih	2. Kel. Kebon Kacang
KPP Jakarta Kemayoran	3. Kel. Gelora	KPP Pratama Jakarta Kemayoran	3. Kel. Kebon Melati
KPP Jakarta Sawah Besar	1. Kel. Petamburan	KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu	4. Kel. Kampung Bali
KPP Jakarta Sawah Besar	2. Kel. Kebon Kacang	KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua	1. Kel. Bendungan Hilir
KPP Jakarta Sawah Besar	3. Kel. Kebon Melati	KPP Madya Jakarta Pusat	2. Kel. Gelora
KPP Jakarta Sawah Besar	4. Kel. Kampung Bali	KPP Madya Jakarta Pusat	1. Kec. Senen
			1. Kec. Cempaka Putih
			2. Kec. Jahar Baru
			1. Kec. Kemayoran
			1. Kel. Gunung Sahari Utara
			2. Kel. Mangga Dua Sefatan
			1. Kel. Karini
			2. Kel. Karang Anyar
			3. Kel. Pasar baru
			Ketamadya Jakarta Pusat

b. Pembagian Wilayah Kerja, berdasarkan Tabel 3.2 ada beberapa KPP mengalami perbedaan wilayah kerja sebelum modernisasi dengan setelah modernisasi, diantaranya adalah KPP Jakarta Sawah Besar, KPP Jakarta Gambir Satu, KPP Jakarta Menteng Satu dan KPP Jakarta Tanah Abang Satu. Dimana setelah modernisasi luas wilayah kerja KPP tersebut menjadi lebih sempit dibandingkan sebelumnya. Hal ini menimbulkan efek dengan penambahan beberapa KPP baru, yaitu KPP Pratama Jakarta Gambir Empat, KPP Pratama Sawah Besar Dua dan KPP Pratama Tanah Abang Tiga, dengan wilayah kerjanya

adalah pecahan wilayah tersebut. Selain itu modernisasi memberikan satu tambahan KPP, yaitu KPP Madya Jakarta Pusat dengan wilayah kerjanya lebih luas.

2. Struktur Organisasi

Pelaksanaan modernisasi administrasi perpajakan pada Kanwil DJP Jakarta Pusat selain memberikan dampak perubahan pada jenis KPP, juga berdampak terhadap struktur organisasi pada kanwil tersebut dan unit kerjanya. Adapun perubahan struktur organisasi setelah modernisasi adalah sebagai berikut :

A. Kantor Wilayah (Kanwil)

Modernisasi administrasi perpajakan melaksanakan pembenahan organisasi, tugas dan fungsi antara Kanwil dan KPP dalam rangka pelaksanaan *good governance* dengan menghilangkan duplikasi pelayanan, yaitu memperjelas area kerja dan tanggung jawab.

Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi :

- a. pemberian bimbingan dan evaluasi pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pajak;
- b. pengamanan rencana kerja dan rencana penerimaan di bidang perpajakan;
- c. bimbingan konsultasi dan pembinaan penggalian potensi perpajakan serta pemberian dukungan teknis komputer;
- d. pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data serta penyajian informasi perpajakan;
- e. penyiapan dan pelaksanaan kerjasama perpajakan, pemberian bantuan hukum serta bimbingan pendataan dan penilaian;

- f. bimbingan pemeriksaan dan penagihan, serta pelaksanaan dan administrasi penyidikan;
- g. bimbingan pelayanan dan penyuluhan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
- h. penyelesaian keberatan dan pengurangan, serta pelaksanaan urusan banding dan gugatan;
- i. pembetulan surat ketetapan pajak dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar;
- j. pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah.

Gambar 3.1.
Struktur Organisasi Kanwil DJP Jakarta Pusat



Adapun susunan organisasi Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat sebagaimana pada Gambar 3.1, terdiri dari :

- a. **Bagian Umum;**
Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan bantuan hukum.
- b. **Bidang Dukungan Teknis dan Konsultasi;**
Bidang Dukungan Teknis dan Konsultasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan teknis komputer, bimbingan konsultasi, bimbingan penggalan potensi

- perpajakan, pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, serta penyajian informasi perpajakan.
- c. Bidang Kerjasama, Pendataan, Penilaian, dan Pengenaan;
Bidang Kerjasama, Pendataan, Penilaian, dan Pengenaan mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kerjasama perpajakan, melaksanakan bimbingan pendataan dan penilaian, serta bimbingan dan pemantauan pengenaan pajak.
- d. Bidang Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak;
Bidang Pemeriksaan, penyidikan dan Penagihan Pajak mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis pemeriksaan dan penagihan pajak, pemantauan pemeriksaan dan penagihan pajak, penelaahan hasil pelaksanaan pekerjaan pejabat fungsional pemeriksa pajak, bantuan penagihan, serta pelaksanaan administrasi penyidikan termasuk pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan.
- e. Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat;
Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pemantauan penyuluhan dan pelayanan perpajakan, melaksanakan urusan hubungan pelayanan masyarakat, serta melaksanakan penyuluhan dan pelayanan perpajakan yang menjadi tanggungjawab Kantor Wilayah.
- f. Bidang Pengurangan, Keberatan, dan Banding;
Bidang Pengurangan, Keberatan, dan Banding mempunyai tugas melaksanakan urusan penyelesaian keberatan, pembetulan Ketetapan Pajak, pengurangan atau pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar, keberatan PBB dan pengurangan BPHTB, pengurangan sanksi administrasi, proses banding, proses gugatan, dan Peninjauan Kembali.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok jabatan fungsional, mempunyai tugas melakukan pemeriksaan Wajib Pajak atas kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

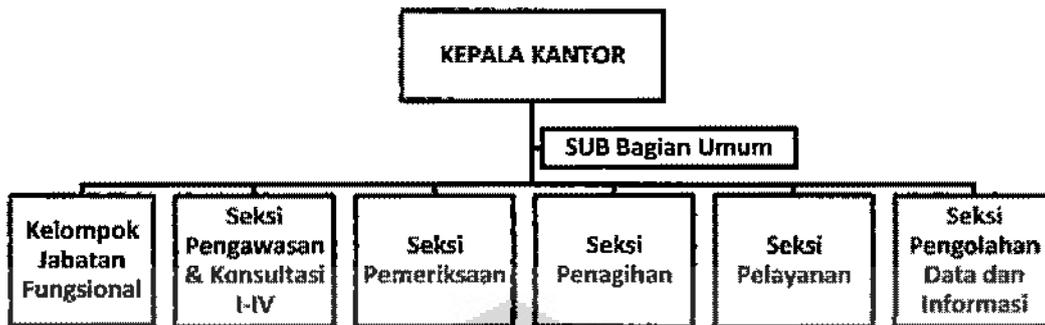
B. Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat

KPP Madya mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPP Madya menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, serta penyajian informasi perpajakan;
- b. penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
- c. pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
- d. penyuluhan perpajakan;
- e. penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
- f. pelaksanaan pemeriksaan pajak;
- g. pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak;
- h. pelaksanaan konsultasi perpajakan;
- i. pelaksanaan intensifikasi;
- j. pelaksanaan administrasi KPP Madya

Adapun susunan struktur organisasi KPP Madya Jakarta Pusat sebagaimana pada **Gambar 3.2**, terdiri dari :

Gambar 3.2
Struktur Organisasi KPP Madya Jakarta Pusat



- a. Subbagian Umum, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga.
- b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi, mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing, serta penyiapan laporan kinerja.
- c. Seksi Pelayanan, mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, dan penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, serta melakukan kerjasama perpajakan.
- d. Seksi Penagihan, mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.
- e. Seksi Pemeriksaan, mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah

Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

- f. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, serta Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV, masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, melakukan rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, serta melakukan evaluasi hasil banding.
- g. Kelompok jabatan fungsional, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Kantor Pelayanan Pajak Pratama

KPP Pratama mempunyai tugas hampir sama dengan KPP Madya, yaitu melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun beberapa fungsi dan tugas yang dilaksanakan KPP Pratama, yaitu :

- a. pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan;

- b. pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
- c. pelaksanaan registrasi wajib pajak;
- d. pelaksanaan ekstensifikasi;
- e. pelaksanaan administrasi KPP Pratama.

Dengan demikian ada beberapa perbedaan struktur organisasi KPP Pratama sebagaimana pada Gambar 3.3 dengan KPP Madya, yaitu :



- a. Seksi Pengolahan Data dan Informasi, mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing, pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta penyiapan laporan kinerja.

- b. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan, mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, penilaian objek pajak dalam rangka ekstensifikasi.

3.3. Perbedaan Antara KPP Telah Menerapkan Sistem Administrasi Perpajakan Modern dengan KPP yang Belum Menerapkan.

Sejak reformasi administrasi perpajakan pada tahun 2001, terdapat dua jenis sistem administrasi perpajakan yang diterapkan pada kantor-kantor pelayanan pajak di Indonesia. Kantor pelayanan pajak yang sudah direformasi menerapkan sistem administrasi perpajakan modern sedangkan yang belum masih menerapkan sistem administrasi yang lama.

Ada beberapa alasan mengapa dilakukan modernisasi terhadap sistem administrasi perpajakan, diantaranya yaitu :

1. Sebelum modernisasi pelayanan perpajakan di suatu kantor dilakukan beberapa seksi (berdasarkan jenis pajak). Hal ini mengakibatkan para Wajib Pajak harus menemui beberapa seksi untuk meminta penjelasan perihal kewajiban perpajakannya sehingga terkadang Wajib Pajak enggan untuk bertanya dan melaporkan pajaknya dengan tidak benar.
2. Proses kerja yang dilakukan secara umum masih secara manual sehingga dalam menyelesaikan suatu pekerjaan membutuhkan waktu yang cukup lama.
3. Organisasi di setiap unit kerja berbasis jenis pajak, sehingga terkesan adanya dikotomi pelayanan antar jenis pajak sehingga pengetahuan petugas pajak tidak berkembang, yaitu aparat pajak yang berada di seksi PPN akan memahami betul masalah PPN, tetapi tidak mengetahui sama sekali masalah PPh.
4. Sistem informasi yang diterapkan cenderung terbatas kepada kebutuhan dan tidak ada integritas informasi yang dapat dijadikan bahan untuk ekstensifikasi dan intensifikasi dalam mengoptimalkan penerimaan pajak.

5. Belum adanya standar perilaku pegawai dan budaya kerja profesional dalam melaksanakan tugas sehingga produktifitas pegawai masih harus ditingkatkan lagi.

Dari beberapa alasan tersebut diatas dikembang konsep modernisasi perpajakan, yaitu pelayanan prima, pengawasan insentif dan Good Governance. Modernisasi administrasi yang akan dilakukan pada dasarnya meliputi :

1. Restrukturisasi organisasi, yaitu merubah struktur organisasi berdasarkan fungsi dan membuat segmentasi Wajib Pajak yang dikelola.
2. Penyempurnaan proses kerja melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi yang sederhana, mudah dimengerti dan efisien.
3. Penyempurnaan manajemen sumber daya manusia yang berbasis kompetensi dan mengedepankan pelayanan prima kepada publik.

Dari ketiga dasar tersebut, pelaksanaan modernisasi memiliki tujuan, yaitu :

1. Tercapainya tingkat kepatuhan pajak yang tinggi
2. Tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi.
3. Tercapainya produktifitas pegawai yang tinggi.

Dari konsep dasar dan tujuan modernisasi administrasi perpajakan tersebut diatas, ada beberapa faktor dan aspek yang membedakan sistem administrasi perpajakan sebelum dan sesudah modernisasi, yaitu

1. Struktur dan Organisasi

Sebelum modernisasi organisasi dipisahkan berdasarkan jenis pajak, yaitu seksi Tata Usaha, seksi PPh Badan, Seksi PPh Orang Pribadi dan Seksi PPN serta seksi lainnya. Setelah modernisasi organisasi dipisahkan berdasarkan fungsi, yaitu fungsi Pelayanan, fungsi Pengawasan dan Konsultasi (waskon) dan fungsi lainnya. Selain itu sebelum modernisasi dalam satu Kanwil terdiri dari beberapa unit kerja, yaitu KPP, Karikpa

dan KPPBB. Setelah modernisasi, ketiga unit kerja tersebut dilebur menjadi satu unit kerja, yaitu KPP Pratama.

2. Informasi dan teknologi

Sebelum modernisasi proses kerja masih manual sehingga memerlukan waktu lebih lama. Setelah modernisasi proses kerja berbasis komputer dalam “Case management” sehingga proses kerja dapat lebih cepat dan adanya e-SPT dan e-Registration memberikan kemudahan bagi para Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan melaporkan pajaknya.

3. Pelayanan dan Pengawasan

Sebelum modernisasi pelayanan dan pengawasan dilaksanakan oleh masing-masing seksi sehingga membutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar dalam melayani dan mengawasi seorang wajib pajak. Setelah modernisasi pelayanan dan pengawasan setiap jenis pajak berada pada satu fungsi, dimana setiap Wajib Pajak diawasi dan dilayani oleh seorang Account Representative (AR). Selain itu tersedia “complain center” yang menerima masukan dari Wajib Pajak dalam memperbaiki dan menjaga pelayanan yang baik bagi Wajib Pajak.

4. Sumber Daya Manusia

Sebelum modernisasi para pegawai tidak terikat oleh kode etik dan belum ada pemberian insentif berbasis kinerja. Setelah modernisasi para pegawai terikat oleh kode etik dan pemberian remunerasi yang lebih baik berdasarkan kinerja serta adanya pelatihan, mapping dan fit and profer test bagi pegawai untuk lebih berkualitas.

3.4. Gambaran Umum KPP dengan Sistem Administrasi Modern.

Dalam implementasinya KPP modern dibedakan menjadi tiga jenis KPP yang didasari oleh level dan jenis Wajib Pajak, jenis pajak yang dikelola, kegiatan dan organisasi, wilayah kerja dan kontribusinya terhadap penerimaan, yaitu :

1. **KPP Wajib Pajak Besar (LTO)**

KPP ini mengelola Wajib Pajak skala besar secara nasional dengan jenis badan dan terbatas jumlahnya. Di KPP ini tidak ada kegiatan ekstensifikasi, karena jumlah Wajib Pajaknya sudah tetap sekitar 200-300 Wajib Pajak yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak. Jika ada penambahan Wajib Pajak, sumbernya berasal dari seluruh KPP secara nasional. Jenis pajak yang dikelola hanya PPh, PPN dan PPnBM serta Bea Materai.

2. **KPP Madya (MTO)**

KPP ini mengelola Wajib Pajak besar jenis badan dalam skala regional (lingkup Kantor Wilayah) dan terbatas jumlahnya. Seperti halnya KPP LTO, KPP ini tidak ada kegiatan ekstensifikasi. Jumlah Wajib Pajak sudah ditetapkan berdasarkan Ketetapan Direktur Jenderal Pajak, yaitu sekitar 200 -500 Wajib Pajak. Jika Wajib Pajak ini ditambah maka Wajib Pajak diambil dari KPP dalam satu Kantor Wilayah. Jenis pajak yang dikelola sama dengan KPP LTO, yaitu hanya PPh, PPN dan PPnBM serta Bea Materai.

3. **KPP Pratama (STO)**

KPP ini mengelola Wajib Pajak menengah ke bawah, yakni jenis WP badan diluar yang dikelola KPP LTO dan KPP Madya, ditambah Wajib Pajak Orang Pribadi. Di KPP ini terdapat kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak sehingga jumlahnya WP-nya dapat selalu bertambah. Jenis pajak yang dikelola semuanya, yaitu PPh, PPN, PPnBM, Bea Materai, PBB dan BPHTB. Kedudukan dan wilayah kerjanya lebih sempit, yaitu tingkat kecamatan atau beberapa kelurahan.

Berdasarkan level dan jenis Wajib Pajak, jenis pajak yang dikelola, kegiatan dan organisasi, wilayah kerja dan kontribusinya terhadap penerimaan dari ketiga KPP memiliki perbedaan, tetapi berdasarkan sarana dan prasarana, pola kerja dan pelayanan tidak berbeda. Adapun Keunggulan sarana dan

prasarana, pola kerja dan pelayanan yang diberikan oleh KPP Modern, adalah sebagai berikut:

1. Tempat Pelayanan Terpadu

Untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, dibentuk pelayanan terpadu di setiap KPP. Dinamakan pelayanan terpadu karena Wajib Pajak dapat melaporkan atau menyerahkan berkas semua jenis perpajakan perpajakan pada satu tempat, tidak terpisah-pisah menurut jenis pajak (One Stop Service). Selain itu tempat pelayanan ini telah terintegrasi sistem komputerisasi, sehingga mempermudah proses kerja dan dapat mempermudah dalam proses pengawasan pelayanan kepada Wajib Pajak.

2. Account Representative

Salah satu ciri dari KPP Modern adalah adanya Account Representative (AR). AR memiliki tugas pengawasan terhadap kewajiban Wajib Pajak dan memberikan penjelasan mengenai informasi yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak terkait hak dan kewajiban perpajakannya. Selain itu AR dapat menjadi jembatan atau mediator antara Wajib Pajak dengan KPP. AR juga harus melakukan pemutakhiran data Wajib Pajak dengan membuat profile tiap Wajib Pajak.

3. Complain Center dan Call Center

KPP Modern memberikan pelayanan Complain Center kepada Wajib Pajak yang digunakan untuk menampung keluhan-keluhan Wajib Pajak atas pelayanan yang tidak puas diberikan oleh KPP. Hal ini dibentuk untuk menciptakan keterbukaan DJP dalam memperbaiki pelayanan dan pelaksanaan tugas.

Selain itu disediakan pula Call Center bagi para Wajib Pajak. Sarana ini dapat digunakan oleh Wajib Pajak untuk memperoleh informasi prosedur, peraturan dan pelayanan perpajakan.

4. Website dan e-system perpajakan.

Setiap KPP Modern harus memiliki website, dimana website ini digunakan untuk mempermudah masyarakat/Wajib Pajak dalam memperoleh informasi dan pelayanan perpajakan.

Selain itu dengan berbasis teknologi sama dengan website, dikembangkan e-system perpajakan, yaitu e-Registration dan e-SPT. Masing-masing e-system dikembangkan untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada Wajib Pajak. Adapun manfaat system tersebut, sebagai berikut :

- a) Sistem e-Registration dapat digunakan untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak oleh masyarakat. Sarana ini untuk mempermudah dan mempercepat masyarakat dalam mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, dimana saja dan kapan saja.
- b) Sistem e-SPT, merupakan sistem yang dapat digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakannya. Dengan adanya sistem ini Wajib Pajak dapat dengan mudah untuk melaporkan kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dan e-SPT mempermudah Wajib Pajak dalam menghitung kewajibannya karena perhitungannya dihitung secara otomatis dan lengkap. Selain itu e-SPT bermanfaat bagi KPP, yaitu efisiensi terhadap penggunaan kertas dan mempercepat proses perekaman basis data perpajakan.

3.5. Rencana Kerja Program Modernisasi Tahun 2006-2009

Sebagai konsekuensi dari program yang sifatnya berkesinambungan, rencana kerja program modernisasi perlu senantiasa disesuaikan dengan kondisi maupun perkembangan organisasi, lingkungan, teknologi (informasi), sosial, dan ekonomi yang terjadi. Perubahan yang terjadi tidak akan merubah spirit atau jiwa modernisasi itu sendiri, tetapi lebih merupakan penyesuaian akan adanya hambatan-hambatan yang tak terelakkan ataupun tuntutan-tuntutan

(internal maupun eksternal) yang harus segera dipenuhi. Adapun fokus kegiatan utama program modernisasi untuk tahun 2006-2009 adalah :

1. Kelanjutan penerapan sistem Administrasi Perpajakan Modern
2. Pembentukan Data Processing Center
3. Pembentukan Call Center dan Complain Center
4. Pengembangan dan Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia modern.

3.5.1 Kelanjutan Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Rencana penerapan sistem administrasi perpajakan modern pada seluruh kantor operasional pajak secara bertahap adalah sebagai berikut :

- 2007 Modernisasi KPP Pratama pada seluruh Kanwil Jakarta dan Jawa Barat I dan III (Jabodetabek)
- 2008 Modernisasi KPP Pratama pada seluruh Kanwil Jawa, Bali, dan Sumatera (selain Jabodetabek)
- 2009 Modernisasi KPP Pratama pada seluruh Kanwil Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua

Dengan dibentuknya KPP Madya pada seluruh Kanwil, maka diharapkan kontribusi penerimaan pajak dari kantor modern akan bisa mencapai 90% dari penerimaan nasional

3.5.2. Pembentukan Data Processing Center (DPC)

Alasan atau keuntungan dari Data Processing Center :

- Dengan sentralisasi perekaman data, pekerjaan yang sama akan dikerjakan oleh satu unit, sehingga akan lebih efektif dan efisien.
- Akurasi dan konsistensi data dapat ditingkatkan.
- KPP bisa lebih fokus pada pekerjaan melayani dan mengawasi WP.
- Pelayanan secara keseluruhan bisa ditingkatkan.
- Pengawasan bisa lebih efektif dengan adanya ketersediaan data yang berkualitas, akurat, dan tepat waktu.

Disadari bahwa pembentukan *Data Processing Center* bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Sebagai *pilot project*, akan dibentuk 2 DPC pada tahun 2006 dengan jadwal sebagai berikut :

- a) Kanwil LTO, Kanwil DJP Jakarta Khusus, dan Kanwil DJP Jakarta Pusat pada bulan Juni 2006
- b) Kanwil Jawa Bagian Timur I, II dan III) pada bulan Desember 2006.

3.5.3. Pembentukan Call Center dan Complain Center

Call Center dan Complain Center adalah salah satu contoh dari program modernisasi yang baru diformulasikan pada tahun 2005, atau belum terpikirkan pada tahun 2004. Ide ini muncul pada pertengahan tahun 2005 dan semakin mengkrystal setelah adanya studi banding ke dan Selandia Baru. Kemudian dibentuklah Call Center dan Complain Center sebagai pilot project di Jakarta pada akhir 2006.

Alasan atau keuntungan dari Call Center dan Complain Center :

- a) Masyarakat saat ini sangat mementingkan kepraktisan dan efisiensi penggunaan telpon semakin meningkat untuk urusan bisnis.
- b) Tanpa adanya Call Center, petugas pajak di kantor operasional banyak disibukkan menjawab telepon.
- c) Dengan sentralisasi penerimaan telepon, pekerjaan yang sama akan dikerjakan oleh satu unit, sehingga akan lebih efektif dan efisien.
- d) Akurasi dan konsistensi dapat ditingkatkan.
- e) Pelayanan dan pengawasan secara keseluruhan bisa ditingkatkan.
- f) KPP bisa lebih fokus pada pekerjaan melayani dan mengawasi WP (secara langsung).
- g) Good governance dengan penanganan complaints.

Fungsi utama yang ditangani Call Center dan Complain Center :

- a) Pelayanan (konfirmasi, prosedur, peraturan, materi perpajakan, dll)
- b) Penanganan Complaint Wajib Pajak.

Bentuk dan pelaksanaan dari Call Center dan Complain Center :

- a) Sentralisasi penerimaan complaint dan desentralisasi penanganan complaint.
- b) Penggunaan toll free number.
- c) Dilengkapi dengan Complaint Management Service.

3.5.4. Pengembangan dan Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia modern

Modernisasi administrasi perpajakan sejauh ini masih berkuat pada perubahan pada aspek organisasi, sistem dan prosedur, sarana dan prasarana. Salah satu komponen terpenting, yaitu aspek sumber daya manusia, baru sedikit tersentuh reformasi. Secara lebih spesifik, reformasi manajemen sumber daya manusia baru meliputi 3 aspek :

- Adanya fit and proper test, yaitu hanya pegawai dengan kualifikasi tertentu yang dapat bertugas pada kantor modern
- Penerapan kode etik secara tegas dan konsisten
- Pemberian tunjangan khusus (Remunerasi) yang lebih besar dibandingkan remunerasi standar pegawai sebelumnya.

Selain itu kebutuhan SDM dalam rangka pelaksanaan modernisasi juga meningkat, sebagaimana dilihat pada Tabel 3.3.

Kebutuhan SDM sangat besar tentunya harus diimbangi produktifitas dan kinerja yang baik. Saat ini produktivitas atau kinerja para pegawai belum terukur secara baik. Hubungan antara kinerja pegawai dan sistem kompensasi belum ada. Demikian juga halnya dengan sistem mutasi dan promosi yang belum sepenuhnya dikaitkan dengan kinerja ataupun prestasi pegawai. Untuk melakukan hal itu semua, dibutuhkan perombakan besar-besaran di bidang manajemen sumber daya manusia.

Tabel 3.3
Kebutuhan Pegawai Pelaksanaan Modernisasi
Tahun 2005 - 2009

Awal 2005		29,194
Tahun 2005 - Mid	(222)	29,416
Tahun 2005 - End	(5)	29,421
Tahun 2006	(943)	30,364
Tahun 2007	285	30,079
Tahun 2008	(3,056)	33,135
Tahun 2009	(1,239)	34,374
Jumlah	(5,180)	

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah job classification, termasuk di dalamnya job description dan job expectation untuk seluruh jenis pekerjaan yang ada, baik itu di kantor pusat, maupun di kantor wilayah dan kantor pelayanan.

Langkah selanjutnya adalah penentuan standar kinerja, atau baseline, untuk masing-masing jenis pekerjaan. Jika semua ini telah tersedia, maka pengukuran kinerja untuk individual, atau masing-masing pegawai, telah bisa dilakukan. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, kinerja pegawai nantinya juga akan ditentukan oleh kinerja unit kerja pegawai yang bersangkutan.

Langkah terakhir adalah pengkaitan yang jelas antara kinerja pegawai dengan sistem kompensasi sedemikian rupa sehingga ada perbedaan perlakuan dalam hal pemberian reward bagi pegawai dengan produktivitas yang lebih baik. Reward ini harus terwakili baik dalam bentuk uang (gaji pokok, tunjangan, dll) maupun dalam bentuk lainnya, misalnya jenjang karir yang lebih jelas, dalam hal ini sistem mutasi dan promosi yang lebih transparan dan jelas.

BAB IV METODOLOGI PENELITIAN

4.1. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini digunakan untuk menilai pengaruh reformasi administrasi perpajakan berdasarkan penelitian sebelumnya. Adapun hasil penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan Tunjung pada tahun 2004 dengan objek penelitian KPP Wajib Pajak Besar (LTO). Dari hasil penelitiannya mengenai efektifitas dan efisiensi terbentuk KPP LTO diperoleh kesimpulan bahwa KPP LTO, sebagai pilot project KPP modern, dalam pelaksanaannya selama periode 2002 – 2003 dinilai cukup efektif untuk dilanjutkan kepada KPP lainnya. Hal ini di lihat dari segi struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi, budaya organisasi dan kepuasan Wajib Pajak. Selain itu hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa pembentukan KPP LTO efektif meningkatkan pertumbuhan penerimaan pajak dan mendorong penerapan *good governance* serta memiliki efisiensi yang cukup tinggi. Tetapi pembentukan KPP LTO dinilai belum cukup efektif meningkatkan kepatuhan perpajakan dan merealisasikan target penerimaan pajak KPP tersebut karena tingkat kepatuhan dan pencapaian target penerimaan belum mencapai 100%.
2. Penelitian lainnya dilakukan oleh Sofyan tahun 2005 dengan objek penelitian yang sama, yaitu KPP LTO. Dari hasil penelitiannya ada pengaruh positif dan signifikan antara faktor-faktor struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi dan budaya organisasi dalam modernisasi terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
3. Penelitian lainnya dilakukan oleh Irawaty tahun 2007. Obyek penelitian yang dilakukannya adalah seluruh KPP di Indonesia periode tahun 2006. Metode penelitian ini berbeda dengan dua penelitian sebelumnya diatas. Penelitian ini bertujuan melihat efisiensi biaya pelaksanaan reformasi administrasi pajak dengan menggunakan

metode analistik *Stochastic Frontier* dan *Cost-to-Yield ratio*. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil, yaitu Secara keseluruhan KPP di Indonesia memiliki efisiensi yang tinggi. Tetapi secara rata-rata KPP yang memiliki tingkat efisiensi cukup tinggi dipengaruhi reformasi administrasi perpajakan jika dilihat metode *Cost-to-Yield ratio*. Namun jika dilihat dari metode *Stochastic Frontier* disimpulkan tidak ada perbedaan antara KPP modern dengan tidak modern dalam pengelolaan biaya.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang tersebut diatas, dapat disimpulkan dengan berbagai macam obyek, periode tahun penelitian dan metode yang digunakan memberikan hasil penelitian yang hampir sama, yaitu reformasi administrasi pajak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan dan efisiensi biaya.

Oleh karena itu penelitian ini dilakukan juga untuk melihat pengaruh reformasi administrasi perpajakan terhadap realisasi penerimaan pajak dengan menggunakan objek penelitian, periode dan metode berbeda berdasarkan penelitian sebelumnya.

4.2. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini, ada dua analisa yang dilakukan, yaitu analisa vertikal dan horizontal (Gambar 4.1). Dengan demikian ada dua ruang lingkup yang ada dalam penelitian ini.

1. Dalam analisa vertikal, penelitian ini mencakup deskripsi data, uji beda dan regresi atas variabel-variabel dalam penelitian ini pada Kantor Kelayanan Pajak (KPP) di Kantor Wilayah (Kanwil) Jakarta Pusat tahun 2003-2006. Dimana periode tahun 2003-2004 digunakan sebagai data KPP di Kanwil DJP Jakarta Pusat sebelum dilaksanakan modernisasi dan periode tahun 2005-2006 digunakan sebagai data setelah modernisasi sebagaimana tujuan dari penelitian ini.
2. Dalam analisa horizontal, penelitian ini juga mencakup deskripsi data, uji beda dan regresi atas variabel-variabel penelitian ini pada

KPP di Kanwil Jakarta seluruhnya periode tahun 2005-2006. Pengambilan periode tahun ini berdasarkan pelaksanaan modernisasi pada KPP di Kanwil DJP Jakarta Pusat telah dilaksanakan secara menyeluruh, sedangkan Kanwil DJP Jakarta lainnya belum melaksanakannya.

Gambar 4.1
Flowchart Ruang Lingkup Penelitian



4.3. Model dalam penelitian

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Irawaty (2007), model yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$Real = \beta_0 + \beta_1 Patuh + \beta_2 Bi_PGW + \beta_3 Bi_Brg + \varepsilon_u \quad [4.1]$$

dimana:

- I = indeks untuk KPP di Kanwil
- T = indeks untuk waktu
- Real = Realisasi penerimaan pajak tiap KPP
- Patuh = Perbandingan SPT yang dilapor dengan Jumlah WP
- Bi_Pgw = Rasio Belanja Pegawai terhadap total belanja Tiap KPP
- Bi_Brg = Rasio Belanja barang terhadap total belanja Tiap KPP

Definisi variable yang digunakan pada penelitian ini, sebagai berikut:

1. Real adalah realisasi total penerimaan pajak untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Variabel ini merupakan faktor utama

dalam model yang akan diukur. Realisasi total penerimaan pajak terdiri dari beberapa jenis penerimaan pajak, yaitu Pajak Penghasilan (PPh) non migas, PPh migas, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak lainnya. Supaya ada kesamaan (homogenitas) antara obyek penelitian yang satu dengan yang lain maka realisasi total penerimaan pajak terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) non migas, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak lainnya. Perbedaan ini disebabkan adanya penerapan sistem administrasi pada obyek penelitian.

2. Patuh adalah variabel kepatuhan Wajib Pajak menggunakan rasio jumlah lembar SPT Tahunan yang telah dilaporkan terhadap jumlah Wajib Pajak yang terdaftar. Ukuran yang digunakan variabel kepatuhan ini adalah kuantitatif dan formal. Hal ini disebabkan untuk mendapatkan ukuran secara kualitatif dan material tidak dapat dilakukan karena keterbatasan data yang diperoleh. Tujuan digunakan variabel ini dalam model adalah melihat pengaruhnya terhadap realisasi total penerimaan pajak.
3. Bi_PGW adalah variabel belanja pegawai menggunakan rasio belanja pegawai terhadap total belanja setiap KPP. Total belanja pegawai setiap KPP berbeda disebabkan strata jabatan, pangkat dan golongan pegawai serta jumlah pegawai. Untuk menghasilkan estimasi yang lebih akurat biaya gaji digunakan rata-rata tertimbang biaya gaji dikalikan jumlah pegawai, tetapi hal merupakan keterbatasan dalam penulisan ini karena tidak tersedianya data tersebut sehingga kondisi ini menjadi keterbatasan interpretasi hasil estimasi.
4. Bi_Brg adalah variabel belanja barang menggunakan rasio belanja barang terhadap total belanja setiap KPP. Selain biaya gaji, biaya yang dikeluarkan KPP meliputi biaya belanja barang dan biaya belanja modal. Total biaya belanja barang adalah jumlah biaya yang digunakan dalam belanja operasional atau

administrasi kantor, seperti biaya surat menyurat, biaya cetak, alat tulis kantor, bahan bakar, daya/energi dan jasa serta material lainnya. Sedangkan total biaya belanja modal merupakan total biaya yang dikeluarkan dalam aktiva tetap, seperti tanah, peralatan dan mesin dan belanja fisik lainnya. Dalam model ini total biaya modal tidak diperhitungkan karena adanya keterbatasan dalam penilaian/rekapitulasi aktiva tetap, sehingga hanya memasukkan biaya belanja barang. Kaitan kedua biaya, biaya gaji dan biaya barang, berkaitan dengan biaya pengumpulan pajak (Cost of tax collection) terhadap penerimaan pajak.

Dengan mengetahui variabel model tersebut diatas, maka tanda dan arah koefisien hasil estimasi yang diharapkan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1.

Tanda arah koefisien hasil estimasi yang diharapkan

Variabel independen	Tanda Arah koefisien
Patuh	+
Bi_PGw	+
Bi_Brg	+

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam penelitian ini adalah adanya keterbatasan data yang dapat diperoleh dan belum diperhitungkannya kontribusi beberapa unit kantor lain yang memiliki peranan dalam proses administrasi perpajakan terhadap realisasi penerimaan pajak KPP lainnya, seperti Karikpa, Kanwil dan KPP-PBB. Hal ini disebabkan sulitnya menghitung besarnya proporsi dan kontribusi unit kantor-kantor tersebut terhadap KPP lainnya sehingga diasumsikan bahwa kontribusi dan pengaruh relatif sama besar terhadap KPP lainnya.

4.4. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan adalah data sekunder dari 44 Kantor Pelayanan Pajak. Sumber data untuk masing-masing variabel adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2. Data dan Sumber Data

Variabel independen	Satuan	Sumber
SPT PPh Badan dan Orang Pribadi	Lembar	Direktorat Jenderal Pajak
WP PPh Badan dan Orang Pribadi	Orang/badan Usaha	Direktorat Jenderal Pajak
Biaya Gaji dan Biaya Barang Tiap KPP	Rupiah	Direktorat Jenderal Pajak

4.5. Metode Estimasi Ekonometri Data Panel

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah panel data. Regresi panel data adalah regresi yang menggunakan gabungan data *cross section* dan *time series*. Pengolahan dengan menggunakan panel data memberikan beberapa keuntungan diantaranya :¹⁶

1. Data dapat lebih bersifat heterogen dan mikro karena *cross section*.
2. Kombinasi antara *cross section* dan *time series*, panel data akan lebih informatif, bervariasi, menghasilkan kolinieritas yang rendah antar variabel, derajat kebebasan yang lebih besar, dan lebih efisien.
3. Data panel lebih cocok untuk meneliti perubahan dinamis.
4. Panel data dapat mendeteksi dan menghitung dampak lebih baik daripada *time series* murni atau *cross section* murni
5. Panel data lebih bisa digunakan untuk meneliti perilaku yang lebih kompleks daripada *time series* murni atau *cross section* murni.
6. Dengan data yang sangat banyak akan meminimalkan bias yang mungkin terjadi jika kita mengagregatkan individu atau perusahaan menjadi agregat yang lebih luas.

¹⁶ Nacrowi dan Usman, "Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan", FEUI:2006

4.5.1. Pemilihan model

Estimasi panel data dapat dilakukan dengan pendekatan Fixed Effect maupun Random Effect, yang diuraikan sebagai berikut:¹⁷

1. *Fixed Effect*

a. Semua koefisien konstan sepanjang waktu dan individu.

Model mengasumsikan bahwa intersep dan koefisien slope konstan sepanjang waktu dan individu, dan *error term* menjelaskan perbedaan intersep dan koefisien slope sepanjang waktu dan individu tersebut. Regresi dilakukan dengan mengkombinasikan data *time series* dan *cross section* (pooled). Estimasi yang dilakukan yaitu dengan regresi *Ordinary Least Square* (OLS). Cara ini disebut *pooled regression* atau *common effect*. Dengan demikian, dalam model ini tidak ada efek individu.

b. Koefisien slope konstan tetapi intersep bervariasi sepanjang individu

Model yang mengasumsikan adanya perbedaan intersep sepanjang individu ini dikenal sebagai model regresi *fixed effect*. Istilah *fixed effect* berasal dari kenyataan bahwa meskipun intersep berbeda sepanjang individu, namun masing-masing intersep individu tidak bervariasi atau tetap sepanjang waktu (*time invariant*). Selain itu model juga mengasumsikan bahwa koefisien slope konstan sepanjang waktu dan individu. Estimasi yang dilakukan yaitu dengan teknik variabel *dummy* untuk individu. Selanjutnya, karena penggunaan *dummy* untuk estimasi *fixed effect* itu, maka literatur menyebutnya teknik *Least Square Dummy Variables* (LSDV). Dengan demikian dalam model ini ada efek individu.

Software Eviews 5.1 telah menyediakan program estimasi model data panel dengan teknik *fixed effect* tersebut. Dalam persamaan umum:

$$Y_{it} = \beta_{0i} + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \mu_{it} \quad [4.2]$$

dimana: *i* menyatakan individual ke-*i*

¹⁷ Widarjono, Agus, "Ekonometrika, Teori dan Aplikasi edisi 2", Ekonisia, Yogyakarta: 2007

t menyatakan waktu ke- t

Pada perkembangannya, dapat pula memasukkan unsur *time effect*, sehingga intersep individu tidak konstan lagi sepanjang waktu. Pengaruh *time effect* itu dihitung dengan menambahkan variabel *dummy* untuk waktu.

2. *Random Effect*

Metode panel data dengan pendekatan *fixed effect* di atas mempunyai masalah dalam hal *degree of freedom* jika ada banyak individu dalam regresi. Pertanyaan yang timbul adalah jika variabel *dummy* menunjukkan kekurangan pengetahuan tentang model yang sebenarnya, mengapa tidak menyatakan ketidaktahuan tersebut melalui *disturbance term* μ_{it} . Oleh karena itulah dikenal metode panel data dengan pendekatan *random effect*.

Ide dasar diawali dengan persamaan [4.2] di atas dengan β_{it} tidak diasumsikan tetap, tetapi β_{it} diasumsikan variabel *random* dengan nilai rata-rata β_i (tidak ada indeks i) dan nilai intersep untuk individu dinyatakan: $\beta_{it} = \beta_i + \varepsilon_{it}$; $i = 1, 2, \dots, N$, dimana: ε_{it} adalah *random error term*, dengan nilai rata-rata nol dan *variance* σ^2 .

Berdasarkan asumsi umum dalam *random effect* tersebut, *individual error component* tidak berkorelasi satu sama lain dan tidak autokorelasi antar *cross section* maupun *time series*. Perbedaan antara *fixed effect* dengan *random effect* adalah pada *fixed effect* masing-masing *cross sectional unit* mempunyai nilai intersep sendiri yang tetap, sedangkan pada *random effect* intersep β_i menyatakan nilai rata-rata semua intersep *cross sectional unit* dan *error component* ε_{it} menyatakan *deviasi (random)* dari intersep individu terhadap nilai rata-rata tadi. ε_{it} tidak secara langsung dapat diobservasi, dan ε_{it} dikenal juga sebagai *unobservable* atau *latent variable*.

Berdasarkan koefisien korelasi didapat dua hal yaitu: (i) untuk suatu *cross sectional unit* tertentu, nilai korelasi antara *error term* pada dua

titik waktu yang berbeda tetap sama tanpa mempedulikan seberapa jauh jarak dua periode waktu tersebut. Hal ini berbeda dengan skema first-order [AR(1)], dimana korelasi antara dua periode menurun terhadap waktu; (ii) struktur korelasi tersebut sama untuk semua cross sectional unit atau identik untuk semua individu. Dalam hal ini, jika struktur korelasi tersebut tidak diperhitungkan dan mengestimasi dengan OLS, maka hasil estimasi tidak efisien. Oleh karena itu, metode estimasi yang digunakan untuk *random effect* adalah *Generalized Least Square* (GLS).

Jika metode estimasi menggunakan OLS, maka ada beberapa asumsi dasar yang harus dipenuhi agar parameter hasil estimasi bersifat *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE). *Best* jika memiliki variance terkecil, linier jika linier dalam parameter dan *unbiased* jika nilai rata-rata β estimasi harus mendekati atau sama dengan nilai β sesungguhnya. Asumsi dasar dimaksud adalah:

1. Model regresi linier, yaitu linier dalam parameter
2. Variabel penjelas diasumsikan *nonstochastic (nonrandom)*, sehingga nilai suatu variabel penjelas tetap pada pengambilan sampel yang diulang.
3. *Conditional mean value* dari *disturbance* adalah nol
4. Homokedastis, yaitu variance dari *disturbance* sama atau tidak bervariasi untuk semua observasi
5. Tidak ada autokorelasi antar *disturbance*
6. *Covariance* antara *disturbance* dan variabel penjelas adalah nol, dengan maksud *disturbance* dan variabel penjelas tidak berkorelasi
7. Jumlah observasi harus lebih besar daripada jumlah parameter yang diestimasi
8. Adanya variasi dari nilai suatu variabel penjelas, maksudnya nilai variabel penjelas dalam sampel tertentu seharusnya tidak semua sama

9. Spesifikasi model regresi sudah benar, maksudnya tidak ada masalah *spesification bias* atau *spesification error*
10. Tidak ada *perfect multikolinieritas*, maksudnya tidak ada hubungan linier yang sempurna diantara variabel penjelas satu dengan lainnya.

Parameter hasil estimasi yang baik mempunyai sifat efisien dan konsisten. Parameter hasil estimasi dikatakan efisien jika parameter tersebut minimum *variance unbiased*. Sedangkan parameter hasil estimasi dikatakan konsisten, jika ketika jumlah sampel meningkat hingga mendekati batas limit, parameter itu konvergen terhadap nilai populasi sesungguhnya atau dengan kata lain nilai parameter tersebut mendekati nilai populasi sesungguhnya. Pengujian atas asumsi yang digunakan dilakukan pada tiga asumsi yaitu uji multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji heterokedastisitas.

4.5.2. Pengujian Model

4.5.2. 1. Uji pemilihan model

1. Uji F

Uji F digunakan untuk melihat apakah ada pengaruh efek individu atau tidak di dalam model. Nilai F statistik adalah sebagai berikut:

$$F = \frac{(RSS_1 - RSS_2) / m}{(RSS_2) / (n - k')} \quad [4.3]$$

dimana:

RSS_1 = sum square residual dari hasil estimasi common effect, no weight

RSS_2 = sum square residual dari hasil estimasi fixed effect, no weight

M = jumlah restriksi

N = jumlah observasi (NT)

T = jumlah data waktu atau time series

k' = jumlah parameter dalam model fixed effect, yaitu jumlah individu (N) ditambah jumlah variabel penjelas (k), maka $n-k'$ sama dengan $[NT-(N+k)]$,

dan juga sama dengan (NT-N-k)

2. Uji Hausman

Uji Hausman adalah uji untuk memilih antara model random effect dan fixed effect. Pertimbangan utama dalam memilih *random effect* atau *fixed effect* adalah apakah *unobserved effect* (c_i) dan variabel penjelas (x_{it}) berkorelasi atau tidak. *Fixed effect* konsisten jika c_i dan x_{it} berkorelasi, sedangkan *random effect* tidak konsisten jika c_i dan x_{it} berkorelasi (Wooldridge, 2002). Seperti halnya dalam Gujarati (2003), bahwa jika diasumsikan *unobservable variable* (ε_i) dan variabel penjelas tidak berkorelasi maka *random effect* lebih tepat digunakan. Sedangkan jika ε_i dan variabel penjelas berkorelasi, maka *fixed effect* lebih tepat digunakan.

Tes untuk memilih antara model *random effect* dan *fixed effect* yaitu tes yang dikembangkan Hausman (1978) yang dikenal dengan Hausman Tes. Nilai Hausman statistik adalah sebagai berikut :

$$H = (\sigma_{FE} - \sigma_{RE})' [A \text{ var}((\sigma_{FE}) - A \text{ var}((\sigma_{RE})))]^{-1} (\sigma_{FE} - \sigma_{RE}) \quad [4.4]$$

T statistik dari Tes Hausman ini mempunyai distribusi asimtotik chi-square (χ^2). Hipotesis nol pada Tes Hausman yaitu estimator *fixed effect* dan *random effect* tidak berbeda secara substansial. Jika Hausman statistik $>$ *chi-square* (χ^2) tabel, maka H_0 ditolak. Kesimpulannya adalah *random effect* tidak tepat digunakan, sehingga lebih baik menggunakan *fixed effect*. Pada Eviews 5.1 Hausman statistik diperoleh dengan estimasi *cross section random*, kemudian *view-fixed/random effect testing-correlated random effect-Hausman test*.

4.5.1.2. Uji asumsi OLS

1. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas merupakan salah satu uji asumsi dasar. Uji multikolinieritas dapat dilakukan salah satunya dengan melihat nilai *variance inflating factor* (VIF). Menurut Gujarati (2003), *rule of thumb* untuk VIF yaitu: jika nilai VIF dari suatu variabel melebihi 10, maka variabel tersebut berkolinieritas tinggi, atau dengan kata lain terdapat korelasi yang tinggi antara suatu variabel penjelas dengan satu atau lebih variabel penjelas lainnya. Dengan demikian, jika nilai VIF > 10 maka model terindikasi masalah multikolinieritas.

2. Uji Langrange Multiplier (Uji LM)

Uji LM digunakan untuk menguji apakah terjadi masalah heterokedastisitas atau tidak pada estimasi *fixed effect*.

Hipotesa dalam tes ini adalah :

H₀ : Homokedastis

H₁ : Heterokedastis

Nilai LM statistik adalah sebagai berikut :

$$LM = \frac{T}{2} \left[\frac{\sum_{i=1}^n \sigma_i^2}{\sigma^2} - 1 \right]^2$$

dimana:

T = jumlah data waktu atau time series

σ_i^2 = *variance residual* persamaan ke-i pada kondisi persamaan yang lebih restriksi (homokedastis), melalui *eviews* didapatkan dari residual covariance matrix setiap persamaan (dari hasil estimasi *fixed effect, no weight*)

σ^2 = *sum square residual* persamaan sistem pada kondisi persamaan lebih restriksi (dari hasil estimasi *fixed effect, no weight*)

Nilai *chi-square* tabel (χ^2 tabel) menggunakan *degree of freedom* sebesar N-1, dimana N adalah jumlah individu atau *cross section*, serta level signifikansi (α) sebesar 10%, 5%, 1%. Hipotesis nol pada

uji LM adalah $\sigma_i^2 = \sigma^2$, $i = 1, \dots, n$, yaitu *variance* sama (homokedastis). Jika nilai LM > nilai *chi-square* tabel (χ^2 tabel), maka H_0 ditolak, hal ini berarti ada masalah heterokedastisas. Estimator yang lebih baik untuk keadaan tersebut adalah menggunakan prosedur *cross section weights* dan/atau dengan opsi *white cross section*.

3. Uji Autokorelasi

Secara harfiah autokorelasi berarti adanya korelasi antara anggota observasi satu dengan yang lainnya terjadi jika ada korelasi antara anggota observasi dengan observasi lain yang berlainan waktu. Dalam kaitannya dengan asumsi metode OLS, autokorelasi merupakan korelasi antara satu variabel gangguan dengan variabel gangguan lain. Sedangkan salah satu asumsi penting metode OLS berkaitan dengan variabel gangguan adalah tidak adanya hubungan antara variabel gangguan satu dengan variabel gangguan lain.

Menurut Gujarati, uji autokorelasi dapat dilakukan dengan membandingkan nilai statistik Durbin Watson yang dihitung dengan nilai batas atas (dU) dan nilai batas bawah (dL) dari tabel Durbin Watson. Selang kepercayaan yang didapat dari hasil pengujian mencakup 5 daerah yaitu: (1) antara 0 dan dL, menunjukkan ada autokorelasi positif; (2) antara dL dan dU, menunjukkan tidak ada keputusan; (3) antara dU dan 4-dU, menunjukkan tidak ada autokorelasi; (4) antara 4-dU dan 4-dL, menunjukkan tidak ada keputusan; (5) antara 4-dL dan 4 menunjukkan ada autokorelasi negatif. Autokorelasi akan menyebabkan koefisien estimasi dalam model menjadi tidak konsisten dan tidak bias, tetapi mempunyai *variance* yang besar, sehingga penafsiran tidak efisien. Salah satu cara untuk mengatasi autokorelasi yang disarankan Gujarati adalah dengan penambahan AR(1) dalam estimasi persamaan model.

BAB V

HASIL EMPIRIS DAN ANALISIS

Bab hasil empiris dan analisis ini berisi analisis hasil dan pembahasan berdasarkan langkah-langkah metodologi penelitian dalam menjawab pertanyaan dari permasalahan penelitian ini. Dalam bab ini akan membahas implikasi pelaksanaan kebijakan modernisasi administrasi perpajakan pada Kanwil DJP Jakarta Pusat, melalui dua analisis, yaitu analisis vertikal dan analisis horizontal terhadap realisasi penerimaan pajak, tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan belanja pegawai serta belanja barang. Secara garis besar bab ini terdiri dari pengujian model, hasil estimasi dan pembahasan sesuai dengan teori dan studi literatur serta penelitian terdahulu.

5.1. Analisa Vertikal Pelaksanaan Kebijakan

Dalam analisa ini dilakukan bertujuan untuk menjawab pertanyaan dari permasalahan dalam penelitian ini mengenai pengaruh pelaksanaan kebijakan modernisasi administrasi perpajakan pada Kanwil DJP Jakarta Pusat terhadap variabel-variabel dalam penelitian ini. Analisa vertikal ini dilakukan dengan membandingkan KPP pada Kanwil DJP Jakarta Pusat sebelum dan melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yaitu modernisasi administrasi perpajakan.

Cara dan metode yang digunakan dalam analisa ini adalah mendeskripsikan data variabel-variabel, yaitu realisasi penerimaan pajak, kepatuhan Wajib Pajak dan biaya pengumpulan pajak (Tax Collection Cost) sebelum dan sesudah pelaksanaan kebijakan tersebut. Kemudian melakukan Uji Beda untuk melihat pengaruh implikasi kebijakan terhadap variabel-variabel dalam penelitian serta melakukan regresi untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antar variabel-variabel dalam penelitian ini.

Namun sebelum melakukan cara dan metode dalam penelitian ini, peneliti melakukan penyesuaian terhadap data-data yang akan dianalisa. Hal ini disebabkan adanya perbedaan jumlah KPP pada Kanwil DJP Jakarta Pusat

antara sebelum dan sesudah pelaksanaan modernisasi. Perbedaan jumlah KPP tersebut disebabkan adanya pemecahan wilayah kerja, yaitu sebelum modernisasi dua wilayah kerja diawasi oleh satu KPP kemudian setelah modernisasi dua wilayah kerja tersebut diawasi menjadi dua KPP, dimana KPP tersebut membawahi masing-masing satu wilayah kerja. Oleh karena itu untuk lebih melihat pengaruh modernisasi maka peneliti melakukan penyesuaian data-data KPP-KPP tersebut menyesuaikan dengan format KPP sebelum modernisasi. Namun demikian ada satu KPP yang terbentuk akibat modernisasi tidak dapat disesuaikan, yaitu KPP Madya Jakarta Pusat. Hal ini disebabkan peneliti tidak dapat memperoleh secara detail data-data Wajib Pajak KPP ini untuk dikembalikan ke KPP sebelumnya sehingga KPP ini dikeluarkan dalam penelitian ini tetapi keberadaan tidak diabaikan.

5.1.1. Deskriptif Data

Deskriptif data merupakan langkah awal dalam penelitian ini. Tujuan dari deskriptif data adalah merangkum data-data atas variabel-variabel dalam penelitian berdasarkan nilai statistik, yaitu jumlah total (sum), nilai rata-rata (Mean), ukuran dispersi (std.Deviation), nilai tengah (Median) dan jumlah observasi. Nilai-nilai statistik tersebut nantinya akan berguna untuk langkah selanjutnya dalam penelitian ini.

Sebelum melakukan uji beda akan disajikan deskriptif data statistik dari variabel-variabel yang digunakan dalam analisis, terlihat pada Tabel 5.1. Dari Tabel 5.1 ada empat faktor yang dapat digambarkan berdasarkan sistem administrasi kantor sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian ini. Gambaran yang didapat dari Tabel tersebut adalah sebagai berikut :

1. Realisasi Penerimaan Pajak.

Faktor ini dapat digambarkan melalui variabel Real. Berdasarkan Tabel 5.1, realisasi penerimaan pajak Kanwil DJP Jakarta Pusat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu realisasi penerimaan pajak sebelum

modernisasi, yaitu tahun 2003 dengan tahun 2004, dan realisasi penerimaan pajak setelah modernisasi, yaitu tahun 2005 dan tahun 2006.

Tabel 5.1
Deskriptif Data Statistik Variabel
Kanwil DJP Jakarta Pusat
Tahun 2003-2006
¹ Dalam milyar

tahun modern			real ¹	patuh	Bi_pgw	Bi_brg
2003	nonModern	Sum	Rp 5.375,91			
		Mean	Rp 488,72	37,85%	56,80%	43,20%
		Median	Rp 319,79	29,07%	56,90%	43,10%
		Std. Deviation	Rp 279,26	14,06%	5,06%	5,06%
		N	11	11	11	11
2004	nonModern	Sum	Rp 7.695,68			
		Mean	Rp 690,51	35,11%	47,14%	30,84%
		Median	Rp 671,50	32,19%	54,75%	34,37%
		Std. Deviation	Rp 377,84	11,77%	20,36%	11,40%
		N	11	11	11	11
2005	modern	Sum	Rp 6.299,88			
		Mean	Rp 572,72	30,76%	64,25%	29,67%
		Median	Rp 455,40	28,50%	67,09%	31,25%
		Std. Deviation	Rp 310,85	6,16%	13,86%	6,61%
		N	11	11	11	11
2006	modern	Sum	Rp 8.040,37			
		Mean	Rp 730,94	31,36%	65,88%	25,57%
		Median	Rp 555,06	28,14%	69,01%	25,61%
		Std. Deviation	Rp 406,01	8,41%	13,05%	4,77%
		N	11	11	11	11
Total	nonModern	Sum	Rp 12.971,57			
		Mean	Rp 589,62	36,48%	51,97%	37,02%
		Median	Rp 567,98	32,08%	56,64%	41,37%
		Std. Deviation	Rp 340,27	12,73%	15,30%	10,68%
		N	22	22	22	22
	modern	Sum	Rp 14.340,24			
		Mean	Rp 651,83	31,06%	65,07%	27,62%
		Median	Rp 524,65	29,28%	68,16%	27,80%
		Std. Deviation	Rp 362,03	7,20%	13,16%	6,01%
		N	22	22	22	22

Berdasarkan data statistik tersebut terlihat bahwa total realisasi penerimaan pajak pada Kanwil DJP Jakarta Pusat mengalami kenaikan setiap tahunnya, yaitu sebesar 2.219,75 milyar rupiah pada tahun 2004 atau meningkat sebesar 41,29% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2005 penerimaan turun sebesar (1.295,79) milyar rupiah (-17,06%) dan

kembali meningkat 1.740,49 milyar rupiah pada tahun 2006 (27,63%) dari tahun sebelumnya.

Penurunan realisasi yang terjadi pada tahun 2005 disebabkan ditariknya beberapa WP badan besar pada KPP Kanwil DJP Jakarta Pusat sebelumnya ke KPP Madya Jakarta Pusat setelah modernisasi. Dimana kontribusi realisasi penerimaan KPP Madya Jakarta Pusat pada tahun 2005 cukup besar, yaitu 4.137,05 milyar rupiah. Dengan demikian pada tahun 2005 sebenarnya tidak terjadi penurunan karena jumlah penerimaan KPP Madya pada tahun tersebut lebih besar daripada penurunannya.

Jika dilihat dari rata-rata penerimaan (Mean) dengan nilai tengah jumlah realisasi penerimaan (Median) dalam Tabel 5.1, terlihat bahwa Kanwil DJP Jakarta Pusat sebelum dan setelah modernisasi memiliki tingkat rata-rata (Mean) lebih besar daripada nilai median. Dengan demikian sebagian besar masing-masing KPP pada Kanwil DJP Jakarta Pusat sebelum dan sesudah modernisasi memiliki jumlah realisasi penerimaan pajak di bawah nilai rata-rata realisasi penerimaan Kanwil ini dan hanya sebagian kecil masing-masing KPP pada Kanwil ini memiliki jumlah realisasi penerimaan berada di atasnya. Sedangkan jika dilihat ukuran dispersi (Std.Deviation), terlihat bahwa Kanwil DJP Jakarta Pusat setelah modernisasi memiliki tingkat ukuran lebih besar daripada sebelumnya. Dengan demikian perbedaan jumlah realisasi penerimaan antara KPP yang satu dengan KPP lainnya setelah modernisasi cukup besar, yaitu dua kali nilai ukuran dispersinya.

2. Kepatuhan Wajib Pajak.

Faktor ini dapat digambarkan melalui variabel Patuh. Seperti halnya pada faktor penerimaan, berdasarkan Tabel 5.1 tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP Jakarta Pusat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu sebelum modernisasi, yaitu tahun 2003 dengan tahun 2004, dan setelah modernisasi, yaitu tahun 2005 dan tahun 2006. Berdasarkan data statistik tersebut terlihat nilai rata-rata kepatuhan Kanwil DJP Jakarta Pusat

sebelum modernisasi menurun cukup besar yaitu sebesar 2,74% dari tahun sebelumnya, sedangkan setelah modernisasi, kepatuhan Wajib Pajak pada tahun 2006 mengalami sedikit kenaikan, yaitu sebesar 0,06% dari tahun sebelumnya. Kenaikkan atau penurunan dalam variabel ini belum dapat dijelaskan secara rinci mengapa terjadi karena perlu penelitian lebih dalam lagi terhadap faktor yang mempengaruhi variabel ini, yaitu jumlah WP terdaftar dan jumlah WP yang melaporkan kewajibannya.

Akan tetapi bila dibandingkan antara nilai Mean dengan Median, terlihat bahwa sebagian besar tingkat kepatuhan WP KPP pada Kanwil DJP Jakarta Pusat, baik sebelum dan setelah modernisasi, berada dibawah nilai rata-rata tingkat kepatuhan WP. Dengan demikian sebagian besar rata-rata tingkat kepatuhan masing-masing KPP yang berada pada Kanwil DJP Jakarta Pusat berada dibawahnya nilai rata-rata tersebut dan hanya sebagian kecil berada diatasnya. Tetapi ukuran dispersi KPP pada Kanwil DJP Jakarta Pusat setelah modernisasi lebih kecil daripada sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan rata-rata kepatuhan KPP setelah modernisasi yang satu dengan KPP lainnya lebih kecil dari sebelumnya.

3. Belanja Pegawai

Pada Tabel.5.1 faktor ini dapat digambarkan melalui variabel Bi_{Pgw} . Berdasarkan data statistik terlihat rata-rata pengeluaran belanja pegawai terhadap total pengeluaran belanja KPP pada Kanwil DJP Jakarta Pusat pada tahun 2003-2006 cukup tinggi, yaitu diatas 50% dari total belanja yang dikeluarkan, dibandingkan rata-rata belanja lainnya. Terutama rata-rata pengeluaran belanja pegawai pada Kanwil DJP Jakarta Pusat setelah modernisasi pada tahun 2005 dan 2006 rata-rata pengeluaran belanja pegawai, yaitu diatas 60% dari total belanja yang dikeluarkan. Hal ini disebabkan adanya pemberian remunerasi lebih besar kepada pegawai-pegawai KPP pada Kanwil DJP Jakarta Pusat setelah modernisasi.

Jika dilihat dari rata-rata (Mean) dengan nilai tengah (Median) rasio belanja pegawai dalam Tabel 5.1, terlihat bahwa Kanwil DJP Jakarta Pusat sebelum dan setelah modernisasi memiliki nilai rata-rata (Mean) lebih kecil dibandingkan nilai Mediannya. Dengan Demikian terlihat bahwa sebagian besar masing-masing KPP pada Kanwil DJP Jakarta Pusat baik sebelum dan setelah modernisasi memiliki rasio belanja pegawai lebih tinggi dari rata-rata rasio belanja pegawai keseluruhan. Selain itu dilihat dari Std. Deviation rasio belanja pegawai Kanwil DJP Jakarta Pusat setelah modernisasi lebih kecil dibandingkan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa rasio belanja pegawai terhadap total belanja pada KPP Kanwil DJP Jakarta Pusat setelah modernisasi jauh lebih besar dari sebelumnya.

4. Belanja Barang

Faktor ini dapat digambarkan melalui variabel Bi_BRG . Berdasarkan data statistik tersebut terlihat rata-rata pengeluaran belanja barang terhadap total belanja pada Kanwil DJP Jakarta Pusat cenderung menurun setiap tahunnya. Penurunan rasio belanja barang setiap tahunnya berbanding terbalik dengan faktor belanja pegawai. Hal ini dapat terjadi karena pembandingan rasio kedua variabel ini sama dan berkaitan. Dengan demikian jika kedua rasio ini (rasio belanja barang dan belanja pegawai) dijumlahkan maka tidak akan lebih dari 100%. Jika jumlah kedua tidak mencapai 100% maka sisanya merupakan belanja lainnya.

Jika dilihat dari rata-rata rasio belanja barang (Mean) dengan nilai tengah rasio belanja barang (Median), terlihat bahwa selisih kedua nilai tersebut tidak memiliki perbedaan yang cukup besar pada Kanwil DJP Jakarta Pusat setelah modernisasi dibandingkan sebelumnya. Dengan demikian sebagian besar rata-rata rasio belanja pegawai masing-masing KPP di Kanwil DJP Jakarta pusat berada sedikit lebih tinggi diatas nilai rata-rata.

5.1.2. Uji Beda Data Secara Statistik

Setelah mengetahui deskriptif variabel data, langkah selanjutnya adalah melakukan uji beda terhadap variabel-variabel tersebut. Uji ini bertujuan untuk melihat apakah terdapat persamaan antara nilai rata-rata variabel bebas suatu kelompok dengan nilai rata-rata variabel bebas kelompok lainnya. Dalam hal ini dilakukan perbandingan variabel bebas antara Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang dikelompokkan berdasarkan sistem administrasi perpajakan. Pengujian ini dilakukan dengan bantuan perangkat pengolah data SPSS ver.16.

Prosedur pertama adalah melakukan mengidentifikasi apakah data sampel tergolong data yang berdistribusi normal atau tidak dengan menggunakan uji Kolmogorov Sminov. Data dikategorikan sebagai data berdistribusi normal bila $p < \alpha$ 5%. Hasil pengujian Kolmogorov Sminov sebagai berikut :

Tabel.5.2
Hasil Pengujian Kolmogorov Sminov
Analisa Vertikal Kanwil DJP Jakarta Pusat

		real	patuh	Bi_pgw	Bi_brg
Most Extreme Differences	Absolute	.136	.273	.636	.636
	Positive	.136	.045	.636	.091
	Negative	-.091	-.273	.000	-.636
	Kolmogorov-Sminov Z	.452	.905	2.111	2.111
	Asymp. Sig. (2-tailed)	.987	.387	.000	.000

a. Grouping Variable: modem

Dari hasil pengujian pada **Tabel 5.2** diperoleh hasil bahwa data variabel Penerimaan Pajak (Real) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Patuh) memiliki distribusi normal sehingga uji beda atas variabel ini akan menggunakan uji *Independent Sample T Test*. Sedangkan Belanja pegawai (Bi_Pgw) dan Belanja barang (Bi_Brg) tidak memiliki distribusi normal sehingga uji beda atas variabel tersebut menggunakan uji *Mann-Whitney U test*.

Setelah mengetahui distribusi normal data-data dan metode yang digunakan dalam uji beda tersebut, maka dilakukan uji beda tersebut dengan hasil sebagai berikut :

Tabel.5.3
Hasil Uji beda dengan Mann-Whitney U

Test Statistics ^a		
	Bi_pgw	Bi_brg
Mann-Whitney U	94.000	97.000
Wilcoxon W	347.000	350.000
Z	-3.474	-3.404
Asymp. Sig. (2-tailed)	.001	.001

a. Grouping Variable: modern

Tabel 5.4
Hasil Uji Beda Dengan Independent Sample T-Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-Test for Equality of Means					95% Confidence Interval of the Difference	
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	Lower	Upper
real	Equal variances assumed	.280	.589	-.587	42	.560	-.62212E10	1.0593E11	-2.7598E11	1.5158E11
	Equal variances not assumed			-.587	41.840	.560	-.62212E10	1.0593E11	-2.7603E11	1.5158E11
pajak	Equal variances assumed	6.433	.015	1.733	42	.089	.0542219	.0311802	-.0087024	.1171459
	Equal variances not assumed			1.733	33.100	.091	.0542219	.0311802	-.0092010	.1176445

Berdasarkan hasil uji beda pada Tabel 5.3 dan Tabel 5.4 diatas dapat digunakan untuk menjawab hipotesa penelitian ini, yaitu :

- Diduga dengan pelaksanaan kebijakan reformasi administrasi perpajakan pada KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Pusat akan memberikan pengaruh secara signifikan terhadap pencapaian peningkatan realisasi penerimaan pajak, Kepatuhan Wajib Pajak dan biaya pengumpulan pajak (*Cost Collection Tax*) dibandingkan sebelumnya. Dirumuskan sebagai berikut :

H_0 : Kebijakan reformasi administrasi perpajakan tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap faktor-faktor tersebut.

H_1 : Kebijakan reformasi administrasi perpajakan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap faktor-faktor tersebut.

Dari hasil statistik tersebut terlihat bahwa signifikansi variabel realisasi penerimaan pajak (Real) lebih besar dari tingkat kepercayaan α 5%. Hal ini berarti secara statistik menerima H_0 , yaitu kebijakan administrasi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap peningkatan realisasi penerimaan pajak.

Sedangkan untuk kepatuhan WP (patuh) dan belanja pegawai (Bi_Pgw) serta biaya belanja barang (Bi_Brg) memiliki signifikansi lebih kecil dari tingkat kepercayaan α 5%. Dengan demikian menolak H_0 dan menerima H_1 , yaitu kebijakan administrasi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, belanja pegawai dan biaya belanja barang.

Dari hasil hipotesa tersebut dapat di analisa keempat faktor tersebut sebagai berikut :

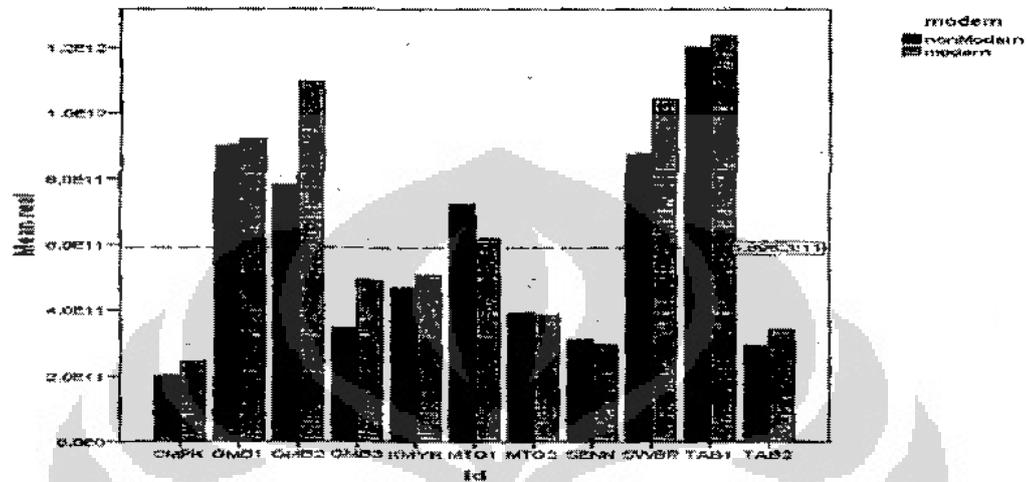
1. Faktor Realisasi Penerimaan Pajak

Pelaksanaan kebijakan administrasi perpajakan pada KPP di Kanwil DJP Jakarta Pusat belum memperlihatkan perkembangan yang cukup signifikan dalam meningkatkan realisasi penerimaan pajak. Jika dilihat dari total penerimaan, total realisasi penerimaan pajak KPP di Kanwil DJP Jakarta Pusat setelah modernisasi meningkat sebesar 1.368,67 (10,55%) dari sebelumnya. Selain itu rata-rata realisasi penerimaan pajak Kanwil DJP Jakarta Pusat setelah modernisasi lebih besar daripada sebelumnya, namun demikian secara statistik tidak ada perbedaan. Dengan demikian akan ditelaah terjadinya pertumbuhan realisasi penerimaan pajak pada Kanwil DJP Jakarta Pusat setelah modernisasi dengan **Gambar 5.1** dan **Gambar 5.2**.

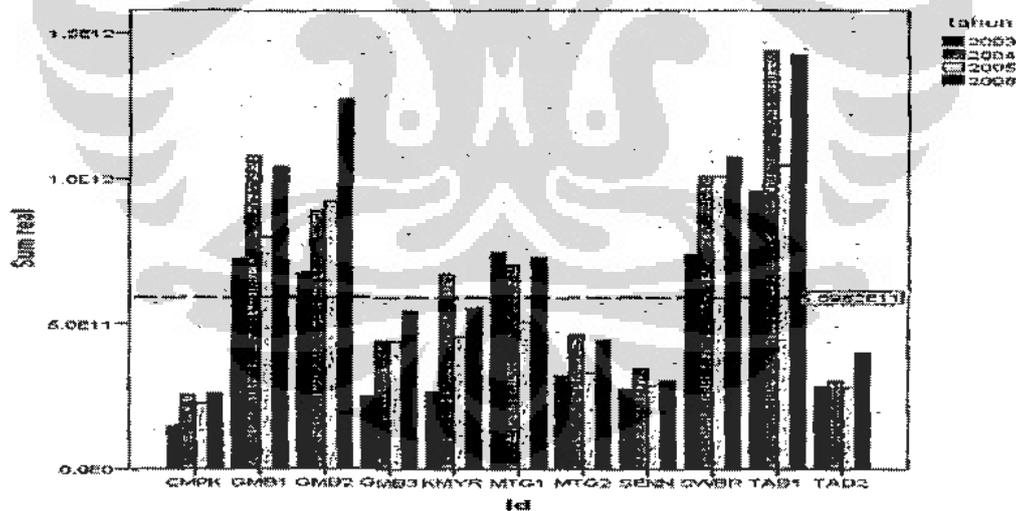
Dari **Gambar 5.1** terlihat bahwa hampir sebagian besar KPP di Kanwil DJP Jakarta Pusat mengalami peningkatan rata-rata realisasi penerimaan pajak setelah melaksanakan modernisasi. Hanya beberapa KPP yang mengalami penurunan rata-rata realisasi penerimaan pajak

setelah modernisasi, yaitu KPP Jakarta Menteng Satu, KPP Jakarta Menteng Dua dan KPP Senen.

Gambar 5.1
Rata-rata Realisasi Penerimaan per KPP
Kanwil DJP Jakarta Pusat
Berdasarkan Bentuk



Gambar 5.2
Jumlah Realisasi Penerimaan per KPP
Kanwil DJP Jakarta Pusat
Periode 2003-2006



Selain itu, berdasarkan **Gambar 5.1** terlihat bahwa meski terdapat peningkatan namun peningkatan tersebut tidak cukup besar, hanya beberapa KPP yang memiliki rata-rata peningkatan yang cukup besar, yaitu KPP Jakarta Gambir Dua dan KPP Jakarta Gambir Tiga serta

KPP Sawah Besar. Disini juga terlihat bahwa peningkatannya yang terjadi pada tiap KPP masih dibawah garis rata-rata realisasi penerimaan sebelum modern (589,62 milyar rupiah).

Penurunan yang terjadi rata-rata yang terjadi pada KPP, sebagaimana terlihat pada **Gambar 5.1**, diakibatkan penurunan realisasi penerimaan pajak yang terjadi pada tahun 2005 (lihat **Gambar 5.2**). Dari **Gambar 5.2** terlihat bahwa hampir secara keseluruhan KPP pada kanwil DJP Jakarta Pusat mengalami penurunan realisasi penerimaan pajak pada tahun 2005. Hal ini disebabkan pada tahun ini merupakan awal pelaksanaan kebijakan modernisasi pada Kanwil tersebut, sehingga kemungkinan terjadi masa transisi dalam persiapan pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain itu penurunan penerimaan dapat terjadi karena berpindahnya beberapa WP badan KPP Pratama ke KPP Madya semakin menambah penurunan yang terjadi pada tahun tersebut.

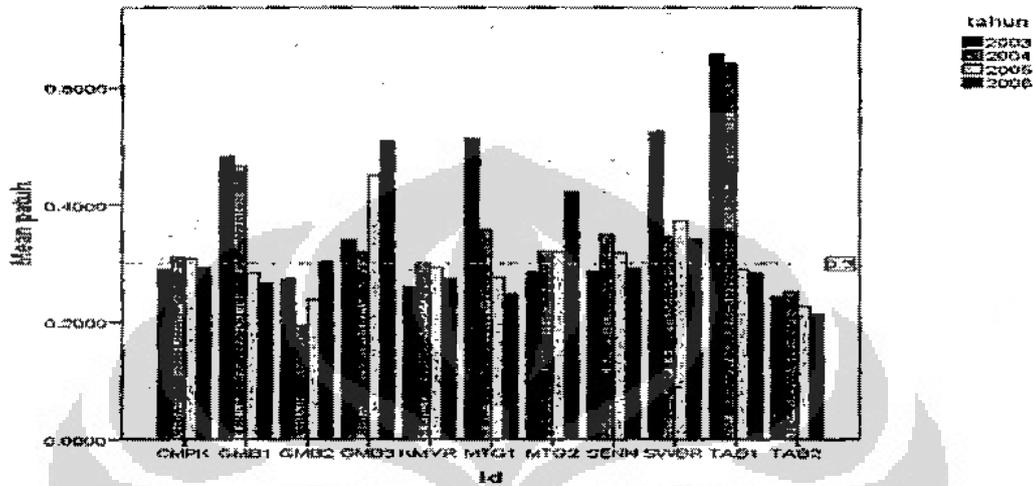
Dengan demikian berdasarkan **Gambar 5.1** dan **Gambar 5.2** disimpulkan bahwa pelaksanaan modernisasi ternyata belum memberikan pengaruh signifikan secara rata-rata terhadap peningkatan realisasi penerimaan pada KPP di Kanwil DJP Jakarta Pusat setelah melaksanakannya. Hal ini dikarenakan adanya masa proses transisi dari perubahan sistem dan kebijakan.

2. Faktor Kepatuhan Wajib Pajak,

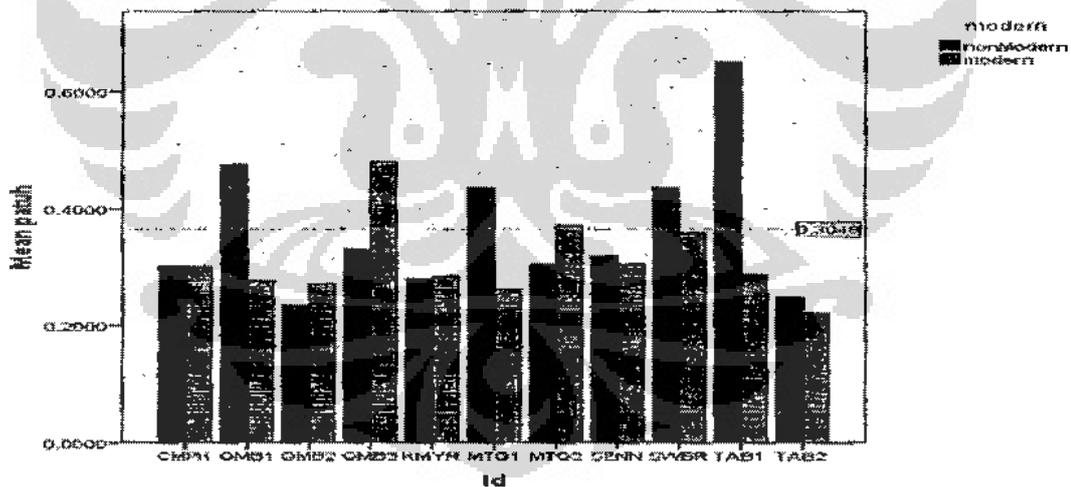
Berdasarkan hasil uji beda di atas adalah kebijakan administrasi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dibandingkan sebelumnya. Artinya secara statistik terdapat perbedaan yang signifikan secara rata-rata tingkat kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP Jakarta Pusat sebelum dan sesudah modernisasi. Namun dari hasil data deskriptif statistik menunjukkan terjadi penurunan rata-rata kepatuhan Wajib Pajak Pada Kanwil DJP Jakarta Pusat setelah melaksanakan modernisasi. Hal ini tidak sesuai dengan salah tujuan

pelaksanaan kebijakan administrasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Gambar 5.3
Rata-rata Kepatuhan WP per KPP
Kanwil DJP Jakarta Pusat
Periode 2003-2006



Gambar 5.4
Rata-rata Kepatuhan WP per KPP
Kanwil DJP Jakarta Pusat



Sebagaimana terlihat pada Gambar 5.3 dan Gambar 5.4, Hampir secara keseluruhan tingkat rata-rata kepatuhan Wajib Pajak di KPP Kanwil DJP Jakarta Pusat setelah modernisasi mengalami penurunan hingga dibawah garis rata-rata tingkat kepatuhan sebelum modern,

yaitu 36,48%. Hanya beberapa KPP setelah modernisasi mengalami peningkatan rata-rata kepatuhan Wajib Pajak meningkat dari sebelumnya, yaitu KPP Jakarta Gambir Dua, KPP Jakarta Gambir Tiga dan KPP Jakarta Menteng Dua serta KPP Jakarta Kemayoran.

Selain itu berdasarkan **Gambar 5.4**, terlihat bahwa penurunan rata-rata tingkat kepatuhan yang besar terjadi pada empat KPP, yaitu KPP Jakarta Tanah Abang Satu, KPP Jakarta Menteng Satu dan KPP Jakarta Gambir Satu serta KPP Jakarta Sawah Besar. Penurunan rata-rata kepatuhan WP dapat disebabkan oleh dua faktor yaitu jumlah WP terdaftar dengan jumlah WP yang melaporkan SPT-nya. Namun kedua faktor ini tidak dapat diungkapkan dalam penelitian ini. Tetapi yang dapat diungkap dalam penelitian adalah keempat KPP mempunyai ciri yang sama, yaitu keempat KPP tersebut merupakan KPP yang mengalami pemecahan wilayah kerja (lihat **Tabel 3.2**), sehingga penurunan kepatuhan WP pada keempat KPP tersebut disebabkan adanya masa proses transisi dalam penyesuaian terhadap sistem yang baru dan perpindahan WP akibat pemecahan wilayah kerja bagi para petugas/aparat pajak dan para Wajib Pajak KPP tersebut.

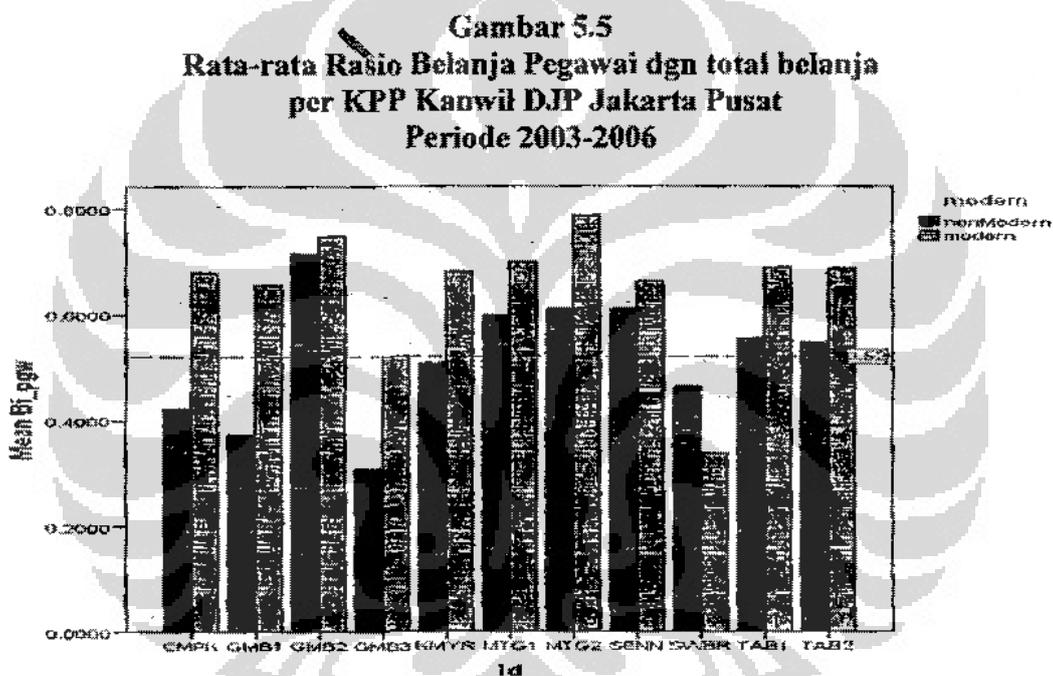
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada beberapa hal yang memungkinkan menyebabkan tingkat kepatuhan WP pada KPP Kanwil DJP Jakarta Pusat menurun setelah melaksanakan modernisasi administrasi perpajakan, yaitu diantaranya disebabkan kurangnya waktu yang cukup bagi WP dan para aparat pajak untuk menyesuaikan dan memahami perubahan struktur, sistem dan prosedur serta aplikasi yang ditawarkan dalam pelaksanaan Modernisasi Administrasi Perpajakan di KPP tersebut.

Selain jumlah wajib pajak yang sangat besar dan kemudahan pendaftaran Wajib Pajak dengan E-Registration menyebabkan meningkat jumlah Wajib Pajak, tetapi belum diimbangi kepatuhan untuk melaporkan kewajibannya sehingga perlu sosialisasi

lebih intensif lagi kepada para Wajib Pajak mengenai kewajiban/konsekuensi perpajakan yang harus mereka penuhi dan meningkatkan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak.

3. Faktor Belanja pegawai.

Berdasarkan hasil uji beda di atas adalah kebijakan administrasi perpajakan memiliki pengaruh signifikan secara rata-rata terhadap rasio belanja pegawai. Artinya secara statistik ada perbedaan rata-rata rasio belanja pegawai terhadap total belanja sebelum dengan sesudah modernisasi.



Dari data statistik pada Tabel 5.1, terlihat bahwa rata-rata rasio belanja pegawai terhadap total belanja pada Kanwil DJP Jakarta Pusat setelah modernisasi lebih besar sebelumnya. Hal ini juga terlihat pada Gambar 5.5, dimana terlihat bahwa hampir secara keseluruhan rata-rata rasio belanja pegawai terhadap total belanja KPP di Kanwil DJP Jakarta pusat setelah modernisasi meningkat dari sebelumnya dan berada di atas garis rata-rata rasio belanja pegawai terhadap total biaya sebelum modern, yaitu 52%. Berdasarkan gambar tersebut juga terlihat

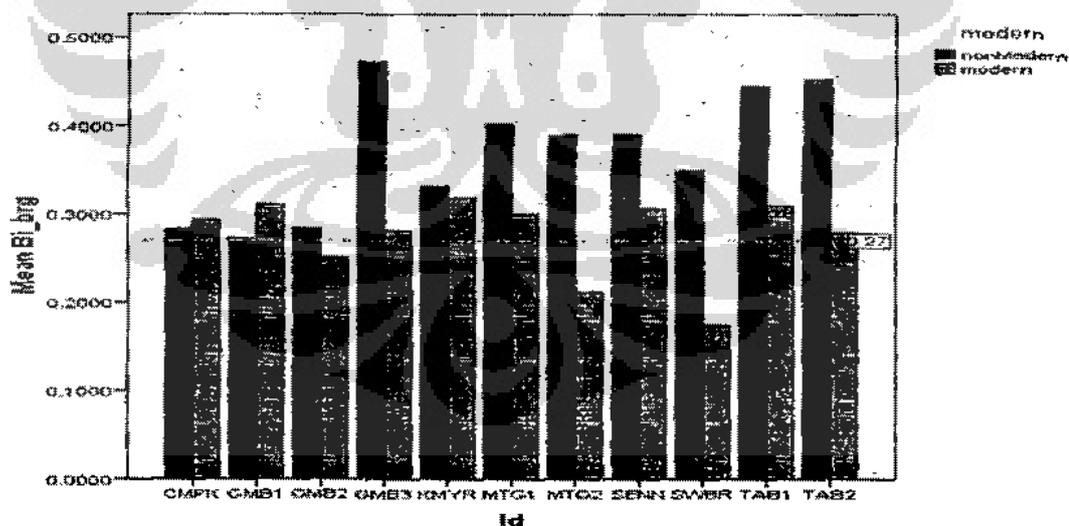
bahwa hanya KPP Jakarta Sawah besar yang memiliki tingkat rasio belanja pegawai terhadap total belanja menurun dan berada dibawah garis rata-rata belanja pegawai.

Peningkatan rasio belanja pegawai pada KPP di Kanwil DJP Jakarta Pusat setelah modernisasi disebabkan adanya pemberian remunerasi lebih besar bagi para pegawai dari sebelumnya. Dengan demikian dapat disimpulkan pemberian remunerasi, sebagai stimulus bagi para pegawai, sangat menyebabkan semakin tingginya total belanja.

4. Faktor Belanja Barang.

Berdasarkan hasil uji beda di atas adalah kebijakan administrasi perpajakan memiliki pengaruh terhadap pengeluaran belanja barang. Artinya secara statistik ada perbedaan rata-rata rasio pengeluaran belanja barang terhadap total belanja pada Kanwil DJP Jakarta Pusat sebelum dengan sesudah modernisasi.

Gambar 5.6
Rata-rata Rasio Belanja Barang dgn total belanja
per KPP Kanwil DJP Jakarta Pusat
Periode 2003-2006



Dari data statistik pada Tabel 5.1 terlihat bahwa rata-rata rasio belanja barang pada Kanwil DJP Jakarta Pusat setelah modern lebih kecil dari sebelumnya. Jika dilihat dari Gambar 5.6, terlihat bahwa setelah

modernisasi terjadi penurunan rasio biaya belanja KPP di Kanwil DJP Jakarta Pusat menurun dibandingkan sebelumnya. Penurunan tingkat rasio belanja barang setelah Modernisasi hingga mendekati garis rata-rata rasio belanja barang terhadap total belanja Kanwil DJP setelah modernisasi, yaitu 27,62%.

Namun berdasarkan **Gambar 5.6** tidak dapat diketahui secara pasti mengapa terjadi penurunan rasio belanja barang. Namun bila dikaitkan dengan variabel rasio belanja pegawai, akan terlihat kaitannya. Jika dikaitkan antara **Gambar 5.5** dengan **Gambar 5.6** maka akan terlihat bahwa kenaikan rasio belanja pegawai dari sebelumnya, akan menyebabkan turunnya rasio belanja barang. Demikian pula sebaliknya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebijakan Modernisasi Administrasi perpajakan pada Kanwil DJP Jakarta Pusat memiliki pengaruh positif terhadap menurunkan belanja barang dibandingkan sebelumnya karena dampak kenaikan belanja pegawai. Selain itu penurunan tingkat rasio belanja barang terhadap total biaya dapat disebabkan berkurangnya belanja barang tiap KPP karena pelaksanaan modernisasi. Perubahan sistem aplikasi yang mengandal teknologi, seperti E-SPT dan E-Registration, memungkinkan untuk mengurangi belanja barang, seperti biaya pencetakan SPT dan biaya surat menyurat serta biaya ATK yang merupakan bagian dari belanja barang. Ditambah lagi konsep Modernisasi terhadap struktur organisasi KPP, yaitu berdasarkan fungsi, dapat meningkatkan efisiensi biaya. Alasan tersebut digunakan karena sebelum modernisasi, satu Wajib Pajak dalam satu KPP akan diawasi minimal dua atau lebih seksi terkait dalam satu KPP sehingga timbul biaya yang sama dari tiap seksi terhadap satu Wajib Pajak dalam mengawasi kewajibannya.

5.1.3. Analisa Regresi Dengan Metode Panel Data

Setelah mengetahui beda rata-rata antara variabel, maka dilakukan analisa dengan regresi linear. Hal ini digunakan untuk mengetahui pengaruh dan hubungan antar variabel realisasi penerimaan (Real) dengan variabel kepatuhan Wajib Pajak (Patuh), biaya gaji (Bi_Pgw) dan belanja barang (Bi_Brg) serta dummy variabel untuk membedakan KPP yang telah melaksanakan modernisasi. Adapun model dalam penelitian adalah sebagai berikut :

$$\text{Real} = \beta_0 + \beta_1 \text{Patuh} + \beta_2 \text{Bi_Pgw} + \beta_3 \text{Bi_Brg} + \beta_4 \text{Modern} + \varepsilon_{it}$$

dimana:

- I = indeks untuk KPP
- T = indeks untuk waktu (2003 s.d 2006)
- Real = Realisasi penerimaan pajak tiap KPP
- Patuh = Perbandingan SPT yang dilapor dengan Jumlah WP
- Bi_Pgw = Perbandingan Belanja Pegawai dengan Total Belanja
- Bi_Brg = Perbandingan Belanja Barang dengan Total Belanja
- Modern = Dummy Variabel, nilai 1 untuk KPP telah Modern dan 0 untuk KPP belum modern.

Berdasarkan model tersebut dan data yang ada maka diketahui bahwa model penelitian adalah model data panel unbalanced. Dengan menggunakan perangkat lunak Eviews 5.1 dan dengan mengikuti prosedur pemilihan metode estimasi data panel serta memenuhi asumsi *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE), diperoleh hasil estimasi terhadap model sebagaimana terlihat pada Tabel 5.5.

Berdasarkan hasil uji Hausmant Test, diperoleh metode estimasi data panel digunakan adalah Fixed Effect. Dari hasil estimasi dengan Fixed Effect pada Tabel 5.5 menunjukkan hubungan dan pengaruh variabel realisasi penerimaan pajak (dependent Variabel) dengan variabel kepatuhan wajib pajak, belanja pegawai dan belanja barang serta modernisasi sebagai dummy variabel dari kebijakan administrasi perpajakan. Hasil ini juga untuk menjawab hipotesa awal dari penelitian ini, yaitu :

Tabel 5.5
Hasil Estimasi Analisa Vertikal
Menggunakan Metode Fixed Effect

Variabel	Parameter	Koefesien	Probabilitas	Kesimpulan	
				Statistik	Ekspetasi
Kepatuhan Wajib Pajak (Patuh)	β_1	0.5708	0.0000	Signifikan***	Sesuai
Belanja Pegawai (Bi_PGW)	β_2	0.1556	0.0000	Signifikan***	Sesuai
Belanja Barang (Bi_BRG)	B_3	-0.1219	0.0000	Signifikan***	Tidak Sesuai
Modernisasi (Modern)	B_4	0.0527	0.0000	Signifikan***	Sesuai
F-statistic		151.049	0.0000	Signifikan***	Sesuai
R-Squared			0.99253		
Adjusted R-Squared			0.98598		

*** signifikan pada taraf $\alpha = 5\%$

- Diduga kepatuhan Wajib Pajak, tingkat biaya pengumpulan dan kebijakan reformasi administrasi memiliki pengaruh positif terhadap realisasi penerimaan pajak. Dirumuskan sebagai berikut :

H_0 : Kepatuhan Wajib Pajak, tingkat biaya pengumpulan dan kebijakan reformasi administrasi tidak memiliki pengaruh positif terhadap realisasi penerimaan pajak.

H_1 : Kepatuhan Wajib Pajak, tingkat biaya pengumpulan dan kebijakan reformasi administrasi memiliki pengaruh positif terhadap realisasi penerimaan pajak.

Dari hasil estimasi tersebut dapat dianalisa sebagai berikut :

1.2 Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak secara statistik mempunyai hubungan positif terhadap realisasi penerimaan pajak. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien sebesar 0,5708. Artinya kenaikan jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT terhadap jumlah Wajib Pajak terdaftar sebesar 1% akan memberikan kontribusi kenaikan realisasi penerimaan pajak sebesar 0,57%. Dengan demikian kebijakan pemerintah untuk melaksanakan

kebijakan administrasi perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib pajak merupakan langkah yang tepat untuk diambil. Namun demikian dalam pelaksanaannya rata-rata kepatuhan WP KPP Kanwil DJP Jakarta Pusat justru menurun dibandingkan sebelumnya.

Hal ini wajar terjadi karena adanya proses transisi dari suatu sistem yang baru. Dimana masyarakat/Wajib Pajak belum memahami secara baik perubahan sistem tersebut. Kondisi tersebut secara ekonomi dalam tahap proses pertumbuhan. Selain itu tujuan, pelaksanaan kebijakan administrasi perpajakan bertujuan untuk memperbaiki image pelayanan perpajakan yang kurang baik di masyarakat/Wajib Pajak. Oleh karena itu perlu proses yang cukup lama untuk memperbaiki image tersebut karena berdasarkan penelitian Tunjung (2004) dengan obyek KPP LTO menyatakan bahwa pelaksanaan modernisasi memberikan tingkat kepuasan yang cukup baik bagi WP dari segi pelayanan, tetapi belum mampu meningkatkan kepatuhan WP. Maksudnya disini adalah pelaksanaan modernisasi pada KPP LTO selama tahun 2002 sampai dengan 2004 belum mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya, dimana Wajib Pajak pada KPP LTO merupakan WP pilihan dan jumlahnya terbatas, yaitu hanya 200 WP. Dengan demikian wajar saja apabila kepatuhan Wajib Pajak di Kanwil DJP Jakarta Pusat belum dapat ditingkatkan karena KPP di Kanwil Jakarta Pusat memiliki WP lebih majemuk dan jumlahnya lebih banyak daripada KPP LTO.

Oleh karena itu diperlukan waktu lebih lama lagi untuk melihat lebih jauh pengaruh kebijakan administrasi perpajakan terhadap peningkatan rata-rata kepatuhan Wajib Pajak dengan berbagai upaya untuk memperbaiki tingkat kepatuhan Wajib Pajak tersebut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh Kanwil DJP Jakarta Pusat dengan mensosialisasikan sistem administrasi tersebut secara continue dan meningkatkan pengawasan kepada para wajib pajak.

2.2 Variabel Belanja Pegawai

Rasio belanja pegawai terhadap total belanja secara statistik mempunyai hubungan positif terhadap realisasi penerimaan pajak. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien sebesar 0,1556. Artinya kenaikan belanja pegawai terhadap total belanja sebesar 1% akan memberikan kontribusi kenaikan realisasi penerimaan pajak sebesar 0,15%.

Dengan demikian kebijakan pemerintah untuk melaksanakan kebijakan administrasi perpajakan pada Kanwil DJP Jakarta Pusat dengan memberikan numerisasi yang lebih baik dari sebelumnya dapat di tolerir karena masih mampu meningkatkan realisasi penerimaan pajak. Namun demikian peningkatan efisiensi belanja pegawai terhadap total belanja harus diperhatikan agar tidak melampaui titik utilitas marginal menurun (*Dimishing Marginal Utility*), yaitu suatu titik dimana penambahan belanja pegawai tidak dapat memberikan kontribusi tambahan kenaikan penerimaan. Jika melewati titik ini, penambahan belanja pegawai tidak lagi memberikan penambahan realisasi penerimaan tetapi memberikan kontribusi negatif pada realisasi penerimaan. Dalam penelitian ini tidak dapat menjelaskan di titik mana terjadi utilitas marginal menurun karena faktor ini dipengaruhi oleh jumlah pegawai dan besaran gaji setiap golongan pegawai.

Selain itu perlu diperhatikan efisiensi tingkat rasio perbandingan antara belanja pegawai terhadap realisasi penerimaan. Berdasarkan data statistik pada Tabel 5.1. terlihat bahwa rata-rata tingkat rasio belanja pegawai terhadap total belanja pada Kanwil DJP Jakarta Pusat hingga mencapai di atas 50%. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran belanja pegawai merupakan pengeluaran yang paling dominan di setiap KPP dibandingkan pengeluaran belanja lainnya. Oleh karena itu efisiensi belanja pegawai terhadap realisasi penerimaan pajak harus diperhatikan. Dengan membandingkan kenaikan rata-rata realisasi penerimaan pajak pada Kanwil DJP Jakarta Pusat setelah modernisasi hanya sebesar 37,41%

(tahun 2005) dan 18,26% (tahun 2006) dengan kenaikan rasio belanja pegawai lebih dari 50% dari sebelumnya, dengan demikian efisiensi rasio belanja pegawai terhadap penerimaan pajak pada Kanwil DJP Jakarta Pusat setelah modernisasi semakin menurun.

Oleh karena itu berdasarkan analisa tersebut, untuk meningkat efisiensi rasio belanja pegawai terhadap realisasi penerimaan pajak adalah dengan meningkatkan kinerja pegawai dalam mencapai realisasi penerimaan. Dengan adanya stimulus pemberian remunerasi yang lebih baik dari sebelumnya, seharusnya dapat meningkatkan kinerja pegawai yang diukur melalui peningkatan realisasi penerimaan pajak, yaitu bahwa persentase kenaikan realisasi penerimaan pajak minimal sebanding dengan persentase kenaikan rasio belanja pegawai terhadap total belanja.

3.2 Variabel Belanja Barang

Rasio belanja barang terhadap total belanja secara statistik mempunyai hubungan negatif terhadap realisasi penerimaan pajak. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien sebesar -0,1219. Artinya kenaikan belanja barang terhadap total belanja sebesar 1% akan mengakibatkan penurunan realisasi penerimaan pajak sebesar 0,12%.

Hasil ini tidak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan sebelumnya dalam penelitian ini. Dimana rasio belanja barang terhadap total belanja diharapkan memberikan kontribusi positif terhadap realisasi penerimaan pajak. Namun demikian kondisi ini dapat dijelaskan.

Kebijakan sistem administrasi perpajakan pada negara sedang berkembang sangat dibutuhkan untuk memastikan terjaminnya terkumpulnya pendapatan negara dari pajak. Hal ini mencegah untuk terjadinya komplikasi yang timbul antara biaya administrasi dengan permasalahan dalam pengamanan tingkat kepatuhan. Hal tersebut sama saja dengan kerugian yang sangat mungkin terjadi (*potential loss*). (Terminassian, 1997). Ada dua tujuan utama dari administrasi perpajakan, yaitu untuk menerapkan peraturan perpajakan secara seragam

untuk mencapai penerimaan negara yang maksimal dengan biaya pengumpulan pajak (collection cost) yang minimal dan untuk mencapai tingkat kepatuhan sukarela (voluntary compliance) dari Wajib Pajak.

Dengan demikian berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa terjadi *Potesial Loss*, yaitu dimana rata-rata rasio belanja barang yang cenderung menurun pada Kanwil DJP Jakarta Pusat setelah modernisasi tidak mampu meningkatkan tingkat rata-rata kepatuhan Wajib Pajak sebelumnya. Dimana tingkat kepatuhan WP memiliki pengaruh positif terhadap realisasi penerimaan pajak. Belum meningkatnya kepatuhan WP pada Kanwil DJP Jakarta Pusat setelah modernisasi karena kurangnya sosialisasi perubahan sistem administrasi tersebut sehingga perlu mensosialisasi yang lebih baik dan kontinyu agar perubahan sistem administrasi perpajakan dapat dipahami oleh WP dan WP dapat merasakan manfaat dari perubahan sistem tersebut sehingga WP secara sukarela mau melaporkan kewajibannya. Namun sosialisasi yang secara kontinyu akan memberikan dampak peningkatan belanja barang secara kontinyu pula dan hal ini memberikan dampak semakin rendahnya tingkat rasio belanja barang terhadap realisasi penerimaan pajak.

Oleh karena itu dapat disimpulkan dalam penelitian bahwa rasio belanja barang memberikan dampak negatif terhadap realisasi penerimaan pajak disebabkan belanja barang yang dikeluarkan oleh tiap KPP pada Kanwil DJP Jakarta Pusat belum mampu meningkatkan kepatuhan WP sehingga realisasi penerimaan pajak belum dapat meningkat. Meskipun perubahan sistem administrasi perpajakan dengan berbasis teknologi dapat menekan beberapa unsur biaya pada belanja barang, seperti biaya cetak SPT karena adanya e-SPT, akan tetapi unsur belanja barang lainnya meningkat, seperti biaya sosialisasi.

4.2 Variabel Modernisasi

Modernisasi merupakan dummy variabel dari kebijakan administrasi perpajakan. Dari hasil estimasi terlihat secara statistik mempunyai hubungan positif terhadap realisasi penerimaan pajak. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien sebesar 0,0527. Artinya pelaksanaan modernisasi pada KPP di Kanwil DJP Jakarta Pusat berdampak pada peningkatan realisasi penerimaan sebesar 0,05%. Hasil ini sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan, yaitu modernisasi memberikan pengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

Dengan demikian, meskipun dari hasil uji beda disimpulkan bahwa kebijakan administrasi perpajakan yang dilaksanakan pada KPP Kanwil DJP Jakarta Pusat tidak memiliki pengaruh dalam meningkatkan rata-rata realisasi penerimaan pajak dari sebelumnya dan dari hasil uji beda tingkat kepatuhan WP terlihat bahwa pelaksanaan modernisasi belum mampu meningkatkan kepatuhan pada Kanwil DJP Jakarta Pusat dibandingkan sebelumnya, tetapi dari hasil ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut memiliki pengaruh positif terhadap realisasi penerimaan pajak.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebijakan modernisasi yang dilaksanakan pada KPP di Kanwil DJP Jakarta Pusat masih dalam masa transisi. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata realisasi penerimaan pajak tidak berbeda dari sebelumnya karena tingkat kepatuhan WP tidak meningkat. Padahal salah tujuan dilaksanakan kebijakan ini adalah tingkat kepatuhan yang semakin tinggi. Selain itu biaya sosialisasi, sebagai salah satu unsur belanja barang, yang cukup besar dalam rangka memperkenalkan kebijakan ini kepada WP menunjukkan masa dari kebijakan ini.

5.2 Analisa Horinzontal Pelaksanaan Kebijakan

Sepertinya yang dikemukakan sebelumnya, bahwa ada dua metode yang digunakan dalam analisis ini. Setelah menganalisa secara vertikal mengenai pelaksanaan kebijakan administrasi perpajakan pada Kanwil DJP Jakarta Pusat, penelitian ini juga akan menganalisa secara horinzontal atas pelaksanaan kebijakan tersebut pada Kanwil DJP Jakarta Pusat terhadap variabel-variabel dalam penelitian ini. tersebut. Analisa horinzontal ini dilakukan untuk membandingkan hasil analisa vertikal dari pelaksanaan kebijakan modernisasi pada Kanwil DJP Jakarta Pusat.

Tujuan dalam analisa ini dilakukan bertujuan sama dengan tujuan analisa vertikal, yaitu untuk menjawab pertanyaan dari permasalahan dalam penelitian ini mengenai pengaruh pelaksanaan kebijakan modernisasi administrasi perpajakan pada Kanwil DJP Jakarta Pusat terhadap variabel-variabel dalam penelitian ini. Analisa horinzontal ini dilakukan dengan membandingkan KPP pada Kanwil DJP Jakarta Pusat, setelah melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang perpajakan, dengan KPP di Kanwil DJP Jakarta lainnya yang belum melaksanakan.

Cara dan metode yang dilakukan dalam analisa ini sama seperti yang dilakukan pada analisa vertikal, yaitu deskriptif data, uji beda secara statistik dan estimasi regresi linear data panel atas data variabel-variabel, yaitu realisasi penerimaan pajak, Kepatuhan Wajib Pajak dan Biaya Pengumpulan Pajak (Tax Collecton Cost) sebelum dan sesudah pelaksanaan kebijakan tersebut. Kemudian melakukan Uji Beda untuk melihat pengaruh implikasi kebijakan terhadap variabel-variabel dalam penelitian serta melakukan regresi untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antar variabel-variabel dalam penelitian ini.

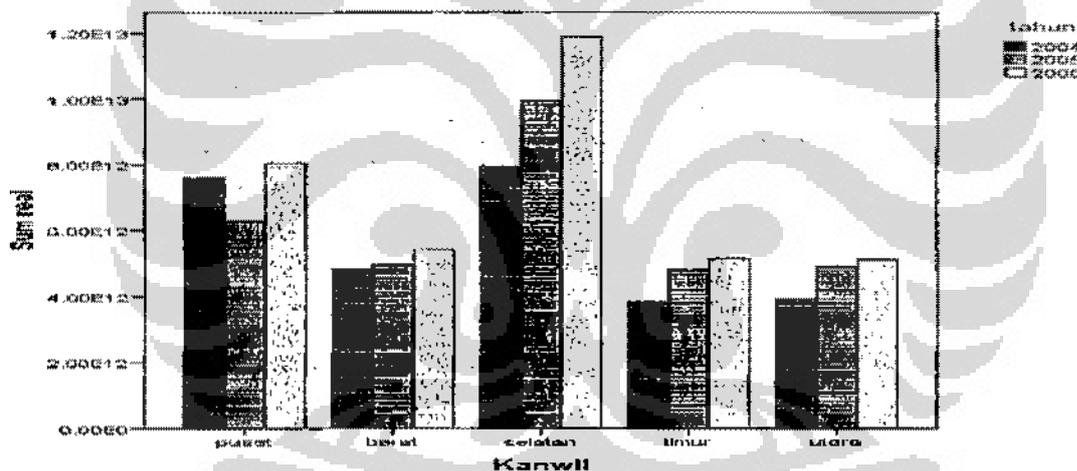
5.2.1. Deskriptif Data

Sebelum melakukan uji beda akan disajikan deskriptif data statistik dari variabel-variabel yang digunakan dalam analisis sebagai terdapat pada Lampiran Tabel.5.6. Berdasarkan tabel tersebut dapat digambarkan, sebagai berikut :

1. Faktor Penerimaan Pajak.

Dilihat dari faktor ini terlihat bahwa total realisasi penerimaan pajak Kanwil DJP Jakarta secara keseluruhan mengalami peningkatan realisasi penerimaan pajak dibandingkan tahun sebelumnya, kecuali realisasi penerimaan pajak Kanwil DJP Jakarta Pusat tahun 2005, sebagaimana terlihat pada Gambar 5.7.

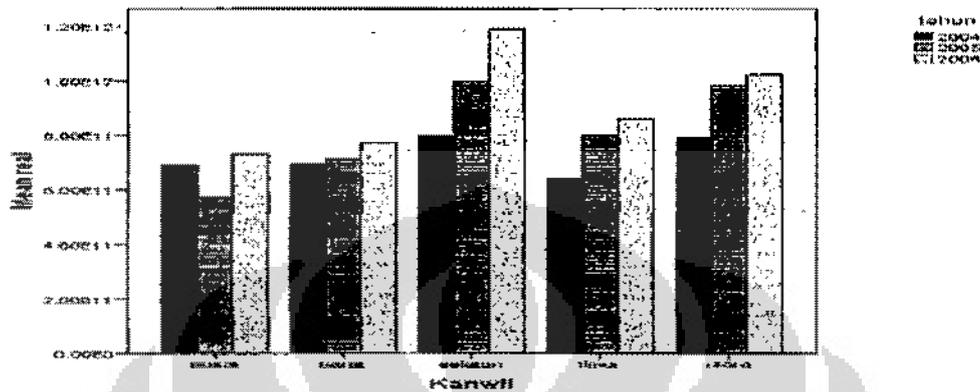
Gambar.5.7
Total Penerimaan Pajak
Kanwil DJP Jakarta Tahun 2004 -2006



Demikian pula jika dilihat dari rata-rata (Mean) realisasi penerimaan pajak dalam Gambar 5.8. Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa rata-rata penerimaan pajak pada Kanwil DJP Jakarta Selatan meningkat setiap tahun, kecuali Kanwil DJP Jakarta Pusat pada tahun 2005. Dimana pada tahun tersebut merupakan awal pelaksanaan kebijakan reformasi administrasi perpajakan pada Kanwil DJP Jakarta Pusat. Dengan demikian penurunan realisasi penerimaan pajak pada Kanwil DJP Jakarta

Pusat pada tahun 2005 disebabkan proses transisi perubahan dari sistem yang lama kepada sistem yang baru.

Gambar.5.8
Rata-rata Penerimaan Pajak
Kanwil DJP Jakarta Tahun 2004 -2006

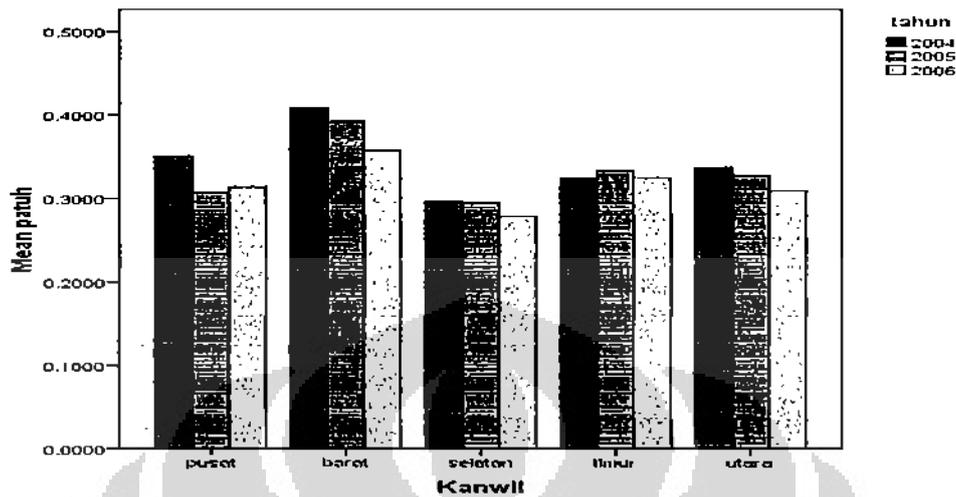


2. Faktor Kepatuhan Wajib Pajak

Dengan mengasumsikan tingkat kepatuhan Wajib Pajak tahun 2004 sebagai tahun dasar, maka berdasarkan faktor ini digambarkan bahwa secara rata-rata tingkat kepatuhan Kanwil DJP Jakarta Pusat tidak terlalu rendah dibandingkan Kanwil Jakarta lainnya. Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 5.9.

Berdasarkan Gambar 5.9, terlihat bahwa rata-rata tingkat kepatuhan Wajib Pajak terendah berada pada Kanwil DJP Jakarta Selatan dan kepatuhan yang tertinggi berada pada Kanwil DJP Jakarta Barat. Tetapi jika dilihat secara keseluruhan, berdasarkan gambar diatas terlihat bahwa rata-rata tingkat kepatuhan Wajib Pajak di kanwil Jakarta cenderung menurun pada tahun 2005 dan 2006 dibandingkan tahun sebelumnya. Hanya Kanwil DJP Jakarta Pusat memiliki tingkat rata-rata kepatuhan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Gambar 5.9
Rata-rata Kepatuhan Wajib Pajak
Kanwil Jakarta Tahun 2004 -2006

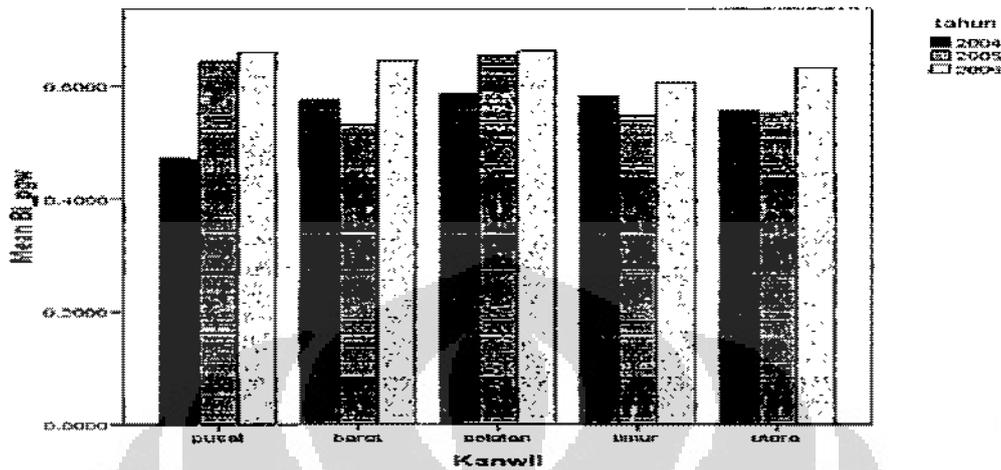


Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan modernisasi pada Kanwil DJP Jakarta Pusat mampu menjaga kestabilan tingkat kepatuhan WP. Terjadi penurunan kepatuhan pada tahun 2005 pada Kanwil tersebut disebabkan proses masa transisi dalam perubahan sistem pada saat itu.

3. Faktor Belanja Pegawai

Berdasarkan faktor ini terlihat bahwa rata-rata tingkat pengeluaran belanja pegawai terhadap total belanja pada Kanwil seluruh Jakarta pada tahun 2004 - 2006 cukup tinggi, yaitu di atas 50% dari total belanja. Berdasarkan **Gambar 5.10**, terlihat bahwa rata-rata kenaikan tingkat rasio belanja pegawai terhadap total belanja pada Kanwil DJP Jakarta Pusat tahun 2005 sangat besar dibandingkan sebelumnya. Hal ini disebabkan ada pemberian remunerasi lebih besar pada pegawai di Kanwil tersebut akibat dari pelaksanaan kebijakan modernisasi. Namun secara keseluruhan, berdasarkan **Gambar 5.10**, terlihat bahwa belanja merupakan pengeluaran yang lebih dominan daripada belanja yang lainnya di Kanwil DJP Jakarta. Hal ini terlihat rasio belanja pegawai berada diatas 50% dari total belanja.

Gambar 5.10
Rata-rata
Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Biaya
Kanwil DJP Jakarta Tahun 2004 -2006



4. Faktor Belanja Barang

Berdasarkan dari faktor ini terlihat bahwa rata-rata rasio belanja barang terhadap total belanja pada Kanwil DJP Jakarta seluruhnya mengalami penurunan, sebagaimana pada Gambar 5.11. Berdasarkan gambar tersebut juga terlihat penurunan rasio belanja terbesar terjadi bukan pada Kanwil DJP Jakarta Pusat, tetapi pada Kanwil DJP Jakarta Timur, yaitu sebesar 10% dari sebelumnya (2005) dan Kanwil DJP Jakarta Selatan, yaitu sebesar 9% dari sebelumnya (2006).

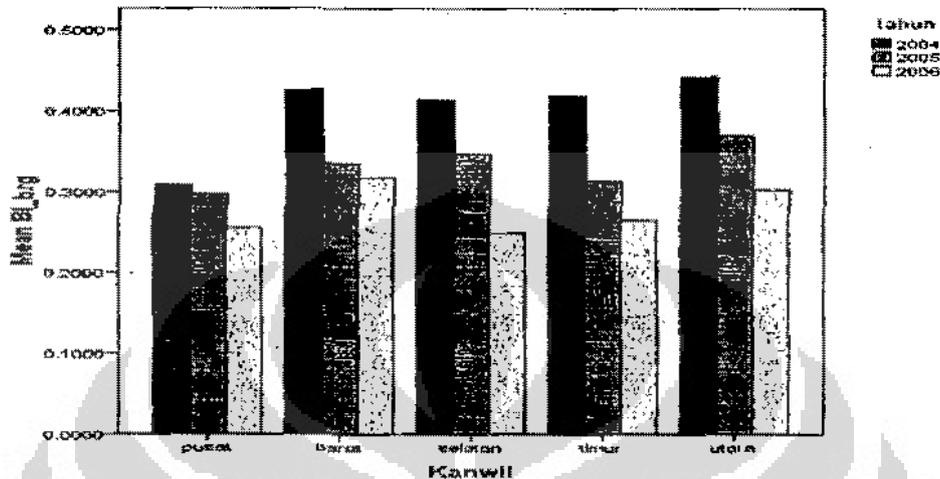
Namun dalam penelitian ini tidak dapat mengungkapkan variabel belanja mana saja yang berkurang pada tiap Kanwil DJP Jakarta sehingga terdapat penurunan rasio belanja tersebut.

5.2.2. Uji Beda Data Secara Statistik

Setelah mengetahui deskriptif variabel data, langkah selanjutnya, seperti langkah sebelum, adalah melakukan uji beda terhadap variabel-variabel tersebut. Uji ini bertujuan untuk melihat apakah terdapat persamaan antara nilai rata-rata variabel bebas suatu kelompok dengan nilai rata-rata variabel bebas kelompok lainnya. Dalam hal ini dilakukan perbandingan variabel bebas antara

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang dikelompokkan berdasarkan sistem administrasi perpajakan sesuai dengan tujuan penelitian ini.

Gambar 5.11
Rata-rata Rasio Belanja Barang terhadap Total Biaya
Kanwil Jakarta tahun 2004-2006



Prosedur pertama adalah melakukan mengidentifikasi apakah data sampel tergolong data yang berdistribusi normal atau tidak dengan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov. Data dikategorikan sebagai data berdistribusi normal bila $p < \alpha 10\%$. Hasil pengujian Kolmogorov Smirnov sebagai berikut :

Tabel.5.7
Hasil Pengujian Kolmogorov Smirnov

Test Statistics^a

	real	patuh	Bi_pgw	Bi_brg	
Most Extreme Differences	Absolute	.254	.320	.408	.425
	Positive	.053	.042	.408	.063
	Negative	-.254	-.320	-.042	-.425
Kolmogorov-Smirnov Z	1.074	1.353	1.723	1.798	
Asymp. Sig. (2-tailed)	.199	.051	.005	.003	

a. Grouping Variable: modern

Dari hasil pengujian pada Tabel 5.7 diperoleh hasil bahwa data variabel realisasi penerimaan (Real) memiliki distribusi normal sehingga uji beda atas variabel ini akan menggunakan uji *Independent Sample T Test*. Sedangkan variabel rasio belanja pegawai (Bi_pgw) dan rasio belanja barang (Bi_brg) serta

kepatuhan WP (patuh) tidak memiliki distribusi normal sehingga uji beda atas variabel tersebut menggunakan uji *Mann-Whitney U test*.

Setelah mengetahui distribusi normal data-data dan metode yang digunakan dalam uji beda tersebut, maka dilakukan uji beda tersebut dengan hasil sebagai berikut :

Tabel.5.8
Hasil Uji beda dengan Mann-Whitney U
Test Statistics^a

	patuh	BI pgw	BI brg
Mann-Whitney U	815.000	641.000	583.000
Wilcoxon W	1068.000	5201.000	836.000
Z	-1.604	-2.818	-3.223
Asymp. Sig. (2-tailed)	.109	.005	.001

a. Grouping Variable: modern

Tabel 5.9
Hasil Uji Beda Dengan Independent Sample T-Test

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-Test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
real	Equal variances assumed	1.516	.221	1.549	115	.124	1.35243E11	1.26103E11	-5.45373E10	4.45074E11
	Equal variances not assumed			2.024	47.374	.046	1.35243E11	9.61758E10	1.25777E9	3.89233E11

Setelah memperoleh hasil uji beda dari variabel realisasi penerimaan, kepatuhan Wajib Pajak, belanja pegawai dan belanja barang. Berdasarkan hasil uji beda pada Tabel 5.8 dan Tabel 5.9 digunakan untuk menjawab hipotesa penelitian ini, yaitu :

- Diduga dengan pelaksanaan kebijakan reformasi administrasi perpajakan pada Kanwil DJP Jakarta Pusat memiliki pengaruh secara signifikan terhadap pencapaian peningkatan realisasi penerimaan pajak, Kepatuhan Wajib Pajak dan biaya pengumpulan pajak (*Cost Collection Tax*)

daripada Kanwil lainnya yang belum melaksanakan. Dirumuskan sebagai berikut :

H_0 : Kebijakan reformasi administrasi perpajakan tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap faktor-faktor tersebut.

H_1 : Kebijakan reformasi administrasi perpajakan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap faktor-faktor tersebut.

Dari hasil statistik tersebut terlihat bahwa signifikansi variabel rasio belanja pegawai (Bi_Pgw) dan rasio belanja barang (Bi_Brg) serta kepatuhan WP (Patuh) lebih kecil dari tingkat kepercayaan α 10%. Hal ini berarti secara statistik menolak H_0 dan menerima H_1 , yaitu kebijakan administrasi perpajakan memiliki pengaruh terhadap faktor-faktor tersebut. Sedangkan untuk realisasi penerimaan (Real) memiliki signifikansi lebih besar dari tingkat kepercayaan α 10%. Dengan demikian menerima H_0 , yaitu kebijakan administrasi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap memiliki pengaruh terhadap faktor tersebut.

Dari hasil uji beda ini dapat disimpulkan, sebagai berikut :

1. Faktor Realisasi Penerimaan Pajak

Pelaksanaan kebijakan administrasi perpajakan pada KPP di Kanwil DJP Jakarta Pusat tidak memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap pencapaian realisasi penerimaan pajak. Hal dapat dilihat pada **Tabel 5.6.** bahwa rata-rata realisasi penerimaan pajak pada Kanwil DJP Jakarta Pusat setelah modernisasi tidak lebih besar daripada rata-rata realisasi penerimaan pajak Kanwil Jakarta lainnya. Selain itu Rata-rata realisasi penerimaan pajak Kanwil DJP Jakarta Pusat mengalami penurunan pada tahun 2005. Dimana pada tahun tersebut merupakan awal pelaksanaan modernisasi.

Dengan demikian terdapat pelaksanaan belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Dimana rata-rata realisasi penerimaannya masih rendah dibandingkan Kanwil DJP Jakarta lainnya. Hal ini disebabkan masa transisi akibat perubahan sistem yang dilaksanakan

sehingga dibutuhkan waktu lagi untuk melihat pengaruh modernisasi terhadap realisasi penerimaan.

2. Faktor Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan hasil uji beda secara statistik terlihat bahwa ada perbedaan secara rata-rata tingkat kepatuhan Wajib Pajak KPP modern dengan KPP belum modern. Dimana rata-rata tingkat kepatuhan KPP modern lebih cenderung stabil dibandingkan KPP belum modern yang cenderung menurun, sebagaimana terlihat pada **Gambar 5.9**.

Dengan demikian pelaksanaan kebijakan modernisasi pada Kanwil DJP Jakarta Pusat dapat menstabilkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dibandingkan Kanwil DJP Jakarta lainnya yang belum melaksanakan.

3. Faktor Belanja pegawai.

Berdasarkan hasil uji beda secara statistik terlihat bahwa ada perbedaan secara rata-rata tingkat rasio belanja pegawai terhadap total belanja antara KPP telah modernisasi dengan KPP belum modernisasi. Terjadinya perbedaan secara rata-rata antara rasio belanja pegawai terhadap total belanja pada Kanwil DJP Jakarta Pusat yang telah di modernisasi dengan Kanwil Jakarta lainnya yang belum dimodernisasi karena adanya remunerasi yang lebih besar

Rasio pengeluaran belanja pegawai pada setiap Kanwil Jakarta sebelum modernisasi dapat mencapai lebih dari 50% dari total belanja yang ada. Namun ketika terjadi pelaksanaan modernisasi, rasio ini meningkat menjadi lebih besar lagi, yaitu 5-10% setiap tahunnya dibandingkan Kanwil Jakarta lainnya.

4. Faktor Belanja Barang.

Berdasarkan hasil uji beda secara statistik terlihat bahwa ada perbedaan secara rata-rata tingkat rasio belanja barang terhadap total belanja. Berdasarkan **Tabel 5.6**, terlihat bahwa tingkat rasio belanja barang terhadap total belanja pada Kanwil DJP Jakarta cenderung

menurun lebih kecil dari tahun sebelumnya. Dengan asumsi rasio belanja barang terhadap total belanja pada tahun 2004 sebagai dasar.

Namun demikian dapat dijelaskan bahwa perubahan bentuk administrasi perpajakan dengan mengandalkan kemajuan teknologi dapat meningkatkan efisiensi belanja barang dibandingkan belanja lainnya.

5.2.3. Analisa Regresi Dengan Metode Panel Data

Seperti halnya pada analisa secara vertikal, setelah mengetahui beda rata-rata antara variabel, maka dilakukan analisa dengan regresi linear. Hal ini digunakan untuk mengetahui pengaruh dan hubungan antara realisasi penerimaan (Real) dengan variabel kepatuhan Wajib Pajak (Patuh), biaya gaji (Bi_Pgw) dan belanja barang (Bi_Brg) serta dummy variabel untuk membedakan KPP yang telah melaksanakan modernisasi.

Dengan model yang sama seperti diatas dan mengikuti prosedur pemilihan metode estimasi data panel serta memenuhi asumsi *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE), diperoleh hasil estimasi terhadap model sebagaimana terlihat pada Tabel 5.10.

Berdasarkan hasil uji Hausmant Test, diperoleh metode estimasi data panel digunakan adalah Random Effect. Dari hasil estimasi dengan Random Effect pada Tabel 5.10 menunjukkan hubungan dan pengaruh variabel realisasi penerimaan pajak (dependent Variabel) dengan variabel kepatuhan wajib pajak, belanja pegawai dan belanja barang serta modernisasi sebagai dummy variabel dari kebijakan administrasi perpajakan. Hasil ini juga untuk menjawab hipotesa awal dari penelitian ini, yaitu :

Tabel 5.10
Hasil Estimasi Data Panel
Menggunakan Metode Random Effect

Variabel	Parameter	Koefisien	Probabilitas	Kesimpulan	
				Statistik	Ekspetasi
C	β_0	26.8675	0.0000	Signifikan***	
Kepatuhan Wajib Pajak (Patuh)	β_1	1.0984	0.0923	Signifikan**	Sesuai
Belanja Pegawai (Bi_PG W)	β_2	0.3018	0.0001	Signifikan***	Sesuai
Belanja Barang (Bi_BRG)	β_3	-0.2447	0.0000	Signifikan***	Tidak Sesuai
Modernisasi (Modern)	β_4	-0.3395	0.1978	Tidak Signifikan	Tidak Sesuai
F-statistic		3.4615	0.0120	Signifikan***	Sesuai
R-Squared			0.159433		
Adjusted R-Squared			0.113375		

*** signifikan pada taraf $\alpha = 5\%$

** signifikan pada taraf $\alpha = 10\%$

1. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak secara statistik mempunyai hubungan positif terhadap realisasi penerimaan pajak. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien sebesar 1.0984. Artinya kenaikan kepatuhan Wajib Pajak sebesar 1% akan memberikan kontribusi kenaikan realisasi penerimaan pajak sebesar 1.09%.

Dengan demikian seperti halnya dengan analisa secara vertikal, bahwa kebijakan pemerintah untuk melaksanakan kebijakan administrasi perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak merupakan langkah yang tepat untuk diambil. Berdasarkan data statistik terlihat bahwa KPP telah melaksanakan modernisasi memiliki tingkat rata-rata kepatuhan lebih tinggi dari KPP yang belum melaksanakan. Selain itu pelaksanaan modernisasi dapat menstabilkan tingkat kepatuhan pada saat tersebut. Oleh karena itu kebijakan administrasi perpajakan dapat dilanjutkan kepada Kanwil-Kanwil Jakarta lainnya.

Selain itu kepatuhan Wajib Pajak dalam penelitian ini adalah rasio antara jumlah WP yang memenuhi kewajibannya untuk melaporkan SPT dibandingkan jumlah Wajib Pajak efektif. Berarti untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dengan cara penambahan jumlah WP yang melaporkan SPT lebih besar daripada jumlah WP yang bertambah. Oleh karena lebih meningkatkan mutu pelayanan bagi Wajib Pajak harus dilaksanakan sehingga keinginan/kemauan dari Wajib Pajak untuk melaporkan pajaknya semakin lebih meningkat.

2. Variabel Belanja Pegawai

Rasio belanja pegawai secara statistik mempunyai hubungan positif terhadap realisasi penerimaan pajak. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien sebesar 0,3018. Artinya kenaikan belanja pegawai sebesar 1% akan memberikan kontribusi kenaikan realisasi penerimaan pajak sebesar 0,3%.

Dengan demikian, seperti yang dijelaskan dalam analisa secara vertikal bahwa kebijakan administrasi perpajakan dengan memberikan numerisasi yang lebih baik masih dapat dilakukan. Namun demikian tetap harus diperhatikan adalah efisiensi rasio belanja pegawai dengan penerimaan pajak. Berdasarkan data statistik terlihat rasio belanja pegawai terhadap total belanja pada Kanwil Jakarta cukup besar, yaitu lebih 50%. Terlebih lagi setelah modernisasi pengeluaran belanja pegawai semakin besar dibandingkan Kanwil Jakarta lainnya.

3. Variabel Belanja Barang

Rasio belanja barang secara statistik mempunyai hubungan negatif terhadap realisasi penerimaan pajak. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien sebesar -0,2447. Artinya kenaikan belanja pegawai sebesar 1% akan mengakibatkan penurunan realisasi penerimaan pajak sebesar 0,24%. Hasil ini tidak sesuai dengan ekspektasi dari penelitian ini.

Hubungan koefisien negatif belanja barang dapat dijelaskan pula dari berdasarkan penelitian dilakukan oleh Shanty Irawaty pada tahun 2007.

Obyek penelitian yang dilakukannya adalah seluruh KPP di Indonesia periode tahun 2006. Penelitian ini bertujuan melihat efisiensi biaya pelaksanaan reformasi administrasi pajak dengan menggunakan metode analistik Stochastic Frontier dan Cost-to-Yield ratio. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil, yaitu Secara keseluruhan KPP di Indonesia memiliki efisiensi yang tinggi. Tetapi secara rata-rata KPP yang memiliki tingkat efisiensi cukup tinggi dipengaruhi reformasi administrasi perpajakan jika dilihat metode Cost-to-Yield ratio. Namun jika dilihat dari metode Stochastic Frontier disimpulkan tidak ada perbedaan antara KPP modern dengan tidak modern dalam pengelolaan biaya.

Pendapat tersebut sesuai dengan penelitian ini, yaitu dari hasil uji beda yang dilakukan, yaitu secara rata-rata ada perbedaan belanja barang pada KPP yang telah modern dengan KPP yang belum modern. Dimana rasio belanja barang terhadap total belanja pada Kanwil DJP Jakarta Pusat lebih rendah dibandingkan dengan Kanwil Jakarta lainnya. Sehingga hal ini akan meningkatkan efisiensi atas tingkat belanja barang terhadap penerimaan pajak.

Belanja Barang pada KPP modern lebih rendah dari KPP yang belum modern, mungkin disebabkan oleh penggunaan komputerisasi yang merupakan salah satu keunggulan dalam modernisasi administrasi perpajakan dan perampingan struktur organisasi pada tingkat KPP dapat menekan biaya-biaya operasional dan meningkatkan efisiensi.

4. Variabel Modernisasi

Modernisasi merupakan dummy variabel dari kebijakan administrasi perpajakan. Dari hasil estimasi terlihat secara statistik mempunyai hubungan negatif terhadap realisasi penerimaan pajak. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien sebesar 0.3395. Artinya perubahan bentuk KPP di Kanwil DJP Jakarta Pusat menjadi modernisasi justru akan mengakibatkan penurunan realisasi penerimaan 0.34%. Hasil ini tidak signifikan dan tidak sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan.

Harapan dari variabel ini adalah modernisasi memberikan dampak positif terhadap realisasi penerimaan pajak KPP di Jakarta sehingga kebijakan pemerintah untuk melaksanakan modernisasi terhadap KPP di Jakarta khususnya di Kanwil DJP Jakarta Pusat boleh dikatakan berhasil. Dengan hasil dari estimasi data yang ada dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan modernisasi pada KPP di Kanwil DJP Jakarta Pusat belum menunjukkan hasil yang diharapkan.

Namun hal tersebut diatas kemungkinan dapat terjadi, karena dalam proses perubahan suatu kebijakan akan mengalami suatu masa transisi. Dimana masyarakat/Wajib Pajak belum memahami secara baik perubahan sistem tersebut. Kondisi tersebut secara ekonomi dalam tahap proses pertumbuhan. Hal ini juga dapat ditunjukkan dengan pengaruh negatif dari belanja barang. Seperti diuraikan diatas bahwa biaya operasional untuk sosialisasi yang dikeluarkan cukup besar tetapi hasil yang diharapkan belum sesuai dengan harapan yang diinginkan.

5.3. Pembahasan Pelaksanaan Kebijakan Secara Keseluruhan

Dalam sub bab ini akan menjelaskan kaitan hasil analisa vertikal dan analisa horinzontal dari pelaksanaan kebijakan reformasi administrasi modern pada KPP di Kanwil DJP Jakarta Pusat secara keseluruhan dari tiap variabel dalam penelitian ini. Hasil tersebut telah diringkas dalam Tabel 5.11. Penjelasan dari tabel tersebut sebagai berikut :

1. Faktor Realisasi Penerimaan Pajak.

Berdasarkan faktor ini, dari analisa vertikal dan horizontal yang telah dilakukan terlihat bahwa realisasi penerimaan pajak sangat dipengaruhi oleh faktor kepatuhan Wajib Pajak dan Belanja pegawai dilakukan tiap KPP, baik yang telah modernisasi maupun yang belum modernisasi. Realisasi penerimaan pajak pada KPP modern, yaitu Kanwil DJP Jakarta Pusat, secara total meningkat dari sebelumnya dan lebih besar dibandingkan dengan Kanwil DJP Jakarta lainnya. Jika dikaitkan dengan

faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak, dapat disimpulkan bahwa kenaikan penerimaan pajak pada Kanwil Jakarta Pusat lebih dipengaruhi oleh kenaikan belanja pegawai. Hal ini dapat ditunjukkan dari hasil uji beda dari kedua analisa dan data statistik, dimana secara rata-rata belanja pegawai Kanwil DJP Jakarta Pusat lebih besar dibandingkan sebelumnya.

Tabel 5.11
Hasil ringkasan analisa vertikal dan horizontal

No.	Uraian	Analisa Vertikal		Analisa Horizontal	
		Sebelum Modernisasi	Setelah Modernisasi	Sebelum Modernisasi	Telah Modernisasi
1	Deskripsi Data				
	1 Realisasi Penerimaan Pajak	Rata-rata lebih rendah	Rata-rata lebih tinggi	Rata-rata lebih tinggi	Rata-rata lebih rendah
	2 Kepatuhan Wajib Pajak	Rata-rata lebih tinggi, cenderung menurun	Rata-rata lebih rendah, ada peningkatan	Rata-rata lebih tinggi, cenderung menurun	Rata-rata lebih rendah, lebih stabil
	3 Rasio Belanja Pegawai	Rata-rata lebih rendah	Rata-rata lebih tinggi	Rata-rata lebih rendah	Rata-rata lebih tinggi
	4 Rasio Belanja Barang	Rata-rata lebih tinggi	Rata-rata lebih rendah	Rata-rata lebih tinggi	Rata-rata lebih rendah
2	Uji Beda				
	1 Realisasi Penerimaan Pajak	Secara rata-rata tidak ada perbedaan		Secara rata-rata tidak ada perbedaan	
	2 Kepatuhan Wajib Pajak	Secara rata-rata ada perbedaan		Secara rata-rata tidak ada perbedaan	
	3 Rasio Belanja Pegawai	Secara rata-rata ada perbedaan		Secara rata-rata ada perbedaan	
	4 Rasio Belanja Barang	Secara rata-rata ada perbedaan		Secara rata-rata ada perbedaan	
3	Hasil Regresi				
	Metode	Fixed Effect		Random Effect	
	1 Kepatuhan Wajib Pajak	Positif; 0,5708; signifikan; sesuai		Positif; 1,0984; signifikan; sesuai	
	2 Rasio Belanja Pegawai	Positif; 0,1556; signifikan; sesuai		Positif; 0,3018; signifikan; sesuai	
	3 Rasio Belanja Barang	Negatif; -0,1219; signifikan; tidak sesuai		Negatif; -0,2447; signifikan; tidak sesuai	
	4 Modernisasi	Positif; 0,0527; signifikan; sesuai		Negatif; -0,3395; tidak signifikan; tidak sesuai	

2. Faktor Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan hasil estimasi analisa vertikal dan horizontal, terlihat bahwa faktor ini mempunyai pengaruh positif yang cukup besar terhadap realisasi penerimaan daripada variabel lainnya dalam penelitian ini. Dengan demikian pelaksanaan kebijakan reformasi administrasi modern dengan tujuan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak adalah sangat tepat. Akan tetapi dari analisa secara vertikal, terlihat bahwa rata-rata kepatuhan KPP di Kanwil DJP Jakarta Pusat belum ditingkatkan dari sebelumnya

karena dari hasil uji beda secara rata-rata tidak ada perbedaan dari sebelumnya. Hal ini sangat dipengaruhi adanya pemecahan wilayah kerja KPP yang dilakukan pada Kanwil DJP Jakarta Pusat, sebagaimana terlihat pada **Gambar 5.3** dan **Gambar 5.4**. Dari gambar tersebut terlihat bahwa tingkat kepatuhan WP turun hingga dibawah garis rata-rata kepatuhan WP sebelum modern pada hampir semua KPP. Terjadi peningkatan tingkat kepatuhan WP. Namun jika dilihat secara horizontal, rata-rata tingkat kepatuhan KPP modern lebih baik daripada KPP yang melaksanakan. Hal ini dapat dilihat dalam **Gambar 5.6.**, dimana tingkat kepatuhan KPP Modern lebih stabil dibandingkan KPP yang belum modern.

Dengan demikian jangka waktu dua tahun pelaksanaan modernisasi terasa belum cukup untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak pada KPP yang mengalami pemecahan wilayah kerja. Akan tetapi secara keseluruhan pelaksanaan modernisasi mampu menjaga kestabilan tingkat kepatuhan sehingga perlu waktu lebih panjang untuk dapat melihat betul-betul pengaruh modernisasi tersebut.

3. **Faktor Belanja Pegawai.**

Berdasarkan hasil estimasi analisa vertikal dan horizontal, terlihat bahwa faktor ini memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan data statistik dari kedua analisa, terlihat bahwa pengeluaran belanja pegawai pada KPP yang telah modernisasi lebih besar daripada sebelum dan KPP lainnya yang belum modernisasi. Besar pengeluaran KPP modernisasi disebabkan bertambahnya jumlah KPP sehingga jumlah pegawai juga bertambah dan ditambah adanya pemberian remunerasi yang lebih besar terhadap pegawai. Dengan demikian pengeluaran yang cukup besar ini dapat mempengaruhi realisasi penerimaan pajak.

Hal ini dapat terjadi karena belanja pegawai merupakan obyek penerimaan pajak, yaitu PPh pasal 21. Dengan demikian semakin besar belanja pegawai KPP, semakin meningkatkan realisasi penerimaan pajak.

Akan tetapi harus diperhatikan bahwa pengeluaran belanja yang besar akan menyebabkan tingkat rasio belanja pegawai terhadap penerimaan pajak semakin buruk dan effect marginal utility semakin menurun, yaitu ketika persentase pertambahan belanja lebih besar dibandingkan persentase pertambahan realisasi penerimaannya.

4. Faktor Belanja Barang.

Berdasarkan hasil estimasi analisa vertikal dan horizontal, terlihat bahwa faktor ini memiliki pengaruh negatif terhadap realisasi penerimaan pajak. Dari hasil uji beda yang dilakukan dalam kedua analisa terlihat bahwa ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata belanja barang yang dilakukan KPP modern dengan KPP yang belum modern. Dimana secara rata-rata, belanja KPP modern lebih kecil dari pada KPP belum modern.

Dengan demikian kebijakan administrasi perpajakan meningkatkan efisiensi belanja barang. Perubahan sistem administrasi perpajakan lebih modern dan menggunakan berbasis teknologi, seperti e-SPT dan e-Registration, dapat menekan pengeluaran belanja barang, seperti biaya cetak SPT.

Namun hasil estimasi variabel ini tidak sesuai dengan ekspektasi dari penelitian ini. Hal ini berarti terjadi *Potensial Loss*, yaitu rasio belanja barang yang dibelanjakan tidak mampu meningkatkan tingkat kepatuhan WP. Hal ini dapat dilihat dengan membandingkan Gambar 5.2 dengan Gambar 5.4. Dari kedua gambar terlihat bahwa hampir semua KPP yang KPP yang mengalami pemecahan wilayah terjadi penurunan rasio belanja barang dari sebelumnya, tetapi dampaknya terjadi penurunan tingkat kepatuhan WP. Berbeda dengan KPP yang tidak mengalami pemecahan wilayah kerja terjadi penurunan rasio belanja barang dari sebelumnya tetapi tingkat kepatuhannya meningkat. Hal ini berarti efisiensi belanja barang pada KPP yang mengalami pemecahan wilayah kerja lebih disebabkan berkurangnya jumlah WP, seperti biaya surat menyurat.

Sebaliknya pada KPP yang baru terbentuk akibat modernisasi, berdampak pada tingginya rasio belanja, yaitu diatas rata-rata rasio belanja barang, tetapi tingkat kepatuhan WP masih rendah, yaitu dibawah rata-rata tingkat kepatuhan WP sebelum modernisasi. Dengan demikian disinilah terjadi *Potensial Loss*, yaitu dimana belanja barang pada KPP yang baru terbentuk lebih besar daripada tingkat kepatuhannya.

5. Faktor Modernisasi.

Berdasarkan hasil estimasi kedua analisa, yaitu vertikal dan horizontal, ada perbedaan hasil, baik koefisien dan signifikansi. Variabel ini digunakan untuk memisahkan antara KPP yang telah modernisasi dengan yang belum modernisasi. Berdasarkan hasil tersebut maka penelitian mengambil hasil dari analisa secara vertikal karena dilihat dari koefisien dan signifikansi sesuai dengan ekspektasi dari penelitian ini. Berdasarkan analisa tersebut disimpulkan bahwa meskipun pelaksanaan kebijakan administrasi perpajakan pada Kanwil DJP Jakarta Pusat memberikan pengaruh positif terhadap realisasi penerimaan, tetapi kenaikan tersebut belum mampu memberikan meningkatkan secara rata-rata realisasi penerimaan KPP secara keseluruhan. Hal ini menggambarkan bahwa pelaksanaan kebijakan administrasi perpajakan di Kanwil Jakarta Pusat secara ekonomi masih pada masa transisi. Untuk mencapai fase lebih tinggi lagi yaitu pertumbuhan dibutuhkan sosialisasi yang lebih baik terhadap kebijakan ini kepada para Wajib Pajak dan para aparat pajak. Dengan demikian diharapkan kepatuhan Wajib Pajak dapat meningkat dan kinerja para aparat pajak juga meningkat sehingga realisasi penerimaan dapat ikut meningkat.

BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Pada bagian akhir penelitian ini, Penulis akan memberikan kesimpulan atas pembahasan yang dilakukan untuk menjawab permasalahan dari penelitian ini. Berdasarkan hasil empiris dan analisis yang telah dilakukan diambil beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

Tabel 6.1
Hasil ringkasan analisa vertikal dan horizontal

No.	Uraian	Analisa Vertikal		Analisa Horizontal	
		Sebelum Modernisasi	Setelah Modernisasi	Belum Modernisasi	Telah Modernisasi
1	Deskripsi Data				
	1 Realisasi Penerimaan Pajak	Rata-rata lebih rendah	Rata-rata lebih tinggi	Rata-rata lebih tinggi	Rata-rata lebih rendah
	2 Kepatuhan Wajib Pajak	Rata-rata lebih tinggi, cenderung menurun	Rata-rata lebih rendah, ada peningkatan	Rata-rata lebih tinggi, cenderung menurun	Rata-rata lebih rendah, lebih stabil
	3 Rasio Belanja Pegawai	Rata-rata lebih rendah	Rata-rata lebih tinggi	Rata-rata lebih rendah	Rata-rata lebih tinggi
	4 Rasio Belanja Barang	Rata-rata lebih tinggi	Rata-rata lebih rendah	Rata-rata lebih tinggi	Rata-rata lebih rendah
2	Uji Beda				
	1 Realisasi Penerimaan Pajak	Secara rata-rata tidak ada perbedaan		Secara rata-rata tidak ada perbedaan	
	2 Kepatuhan Wajib Pajak	Secara rata-rata ada perbedaan		Secara rata-rata tidak ada perbedaan	
	3 Rasio Belanja Pegawai	Secara rata-rata ada perbedaan		Secara rata-rata ada perbedaan	
	4 Rasio Belanja Barang	Secara rata-rata ada perbedaan		Secara rata-rata ada perbedaan	
3	Hasil Regresi				
	Metode	Fixed Effect		Random Effect	
	1 Kepatuhan Wajib Pajak	Positif; 0,5708; signifikan; sesuai		Positif; 1,0984; signifikan; sesuai	
	2 Rasio Belanja Pegawai	Positif; 0,1556; signifikan; sesuai		Positif; 0,3018; signifikan; sesuai	
	3 Rasio Belanja Barang	Negatif; -0,1219; signifikan; tidak sesuai		Negatif; -0,2447; signifikan; tidak sesuai	
	4 Modernisasi	Positif; 0,0577; signifikan; sesuai		Negatif; -0,3395; tidak signifikan; tidak sesuai	

1. Analisa Vertikal

Berdasarkan analisa ini diperoleh kesimpulan, yaitu secara rata-rata tidak ada perbedaan yang signifikan antara realisasi penerimaan pajak dan kepatuhan pajak pada KPP di Kanwil DJP Jakarta pusat setelah modernisasi dibandingkan sebelumnya. Secara rata-rata terjadi perbedaan yang signifikan pada belanja pegawai dan belanja barang. Hal ini

disebabkan adanya pemberian remunerasi lebih besar kepada pegawai setelah pelaksanaan modernisasi sehingga menyebabkan tingkat rasio belanja pegawai menjadi meningkat lebih tinggi. Tetapi berbeda dengan belanja barang, setelah modernisasi belanja barang lebih rendah sehingga rasio perbandingan belanja barang terhadap realisasi penerimaan lebih rendah.

Berdasarkan hasil estimasi regresi data panel dengan Fixed Effect yang dilakukan diketahui bahwa peningkatan realisasi penerimaan pajak pada Kanwil DJP Jakarta Pusat sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan Belanja Pegawai, sedangkan belanja barang memberikan pengaruh negatif terhadap penerimaan pajak. Selain itu variabel modernisasi sebagai dummy variabel menunjukkan pengaruh positif terhadap realisasi penerimaan.

2. Analisa Horizontal

Berdasarkan analisa ini diperoleh kesimpulan yang berbeda dari analisa vertikal, yaitu secara rata-rata ada perbedaan yang signifikan antara realisasi penerimaan pajak, kepatuhan pajak dan pengeluaran belanja barang pada KPP yang telah modernisasi dibandingkan KPP yang belum modernisasi, kecuali belanja pegawai. Secara rata-rata penerimaan pajak di Kanwil DJP Jakarta Pusat (bentuk KPP Modern) lebih rendah dibandingkan rata-rata penerimaan pajak seluruh kanwil Jakarta. Tetapi dilihat dari rata-rata rasio belanja pegawai, secara statistik rata-rata kedua variabel tersebut pada KPP Modern lebih besar dibandingkan KPP belum modern.

Berdasarkan hasil estimasi regresi data panel dengan Random Effect yang dilakukan, hasil yang diperoleh hampir sama dengan analisa vertikal, yaitu peningkatan realisasi penerimaan pajak pada KPP di Jakarta sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan Belanja pegawai. Sedangkan variabel belanja barang dan modernisasi memberikan pengaruh negatif terhadap realisasi penerimaan pajak.

Universitas Indonesia

3. **Faktor Realisasi Penerimaan Pajak.**

Berdasarkan analisa secara keseluruhan disimpulkan bahwa realisasi penerimaan pajak sangat dipengaruhi oleh faktor kepatuhan Wajib Pajak dan Belanja pegawai dilakukan tiap KPP, baik yang telah modernisasi maupun yang belum modernisasi. Total realisasi penerimaan pajak pada KPP modern, yaitu Kanwil DJP Jakarta Pusat, yang meningkat cukup besar dibandingkan KPP di Kanwil DJP Jakarta lainnya, sangat dipengaruhi tingginya kedua faktor ini, terutama tingginya rasio belanja pegawai. Namun demikian rasio belanja pegawai yang tinggi harus diwaspadai karena akan menyebabkan tingkat rasio antara belanja pegawai terhadap realisasi penerimaan tidak baik dan terjadi penurunan tingkat marginal utility sehingga faktor ini justru akan memberikan efek sebaliknya, yaitu memiliki pengaruh negatif pada realisasi penerimaan.

4. **Faktor Kepatuhan Wajib Pajak.**

Berdasarkan analisa secara keseluruhan, terlihat bahwa faktor ini mempunyai pengaruh positif yang cukup besar terhadap realisasi penerimaan daripada variabel lainnya dalam penelitian ini. Dengan demikian pelaksanaan kebijakan reformasi administrasi modern dengan tujuan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak adalah sangat tepat.

Reformasi administrasi perpajakan dengan konsep pemberian pelayanan yang lebih baik kepada Wajib Pajak dan didukung sarana dan prasarana yang lebih baik seharusnya dapat memberikan dampak terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Akan tetapi dilihat secara analisa vertikal dampak ini belum terlihat, tetapi secara horizontal dampak itu dapat terlihat. Dengan demikian masih dibutuhkan waktu untuk mensosialisasikan kebijakan administrasi perpajakan ini kepada Wajib Pajak di Kanwil DJP Jakarta Pusat.

5. **Faktor Belanja Pegawai.**

Berdasarkan hasil estimasi analisa vertikal dan horizontal, terlihat bahwa faktor ini memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

Berdasarkan data statistik dari kedua analisa, terlihat bahwa rasio belanja pegawai pada KPP yang telah modernisasi lebih besar daripada sebelum dan KPP lainnya yang belum modernisasi. Besar pengeluaran KPP modernisasi disebabkan bertambahnya jumlah KPP sehingga jumlah pegawai juga bertambah dan ditambah adanya pemberian remunerasi yang lebih besar terhadap pegawai. Dengan demikian pengeluaran yang cukup besar ini dapat mempengaruhi realisasi penerimaan pajak. Hal ini dapat terjadi karena dari jumlah belanja pegawai terdapat unsur pajak, yaitu PPh pasal 21. Dengan demikian semakin besar rasio belanja pegawai KPP tersebut, terdapat sebagian penerimaan pajak. Akan tetapi harus diperhatikan bahwa pengeluaran rasio belanja yang besar akan menyebabkan tingkat *cost collection tax ratio* semakin buruk dan *effect marginal utility* semakin menurun, yaitu penambahan belanja lebih besar dibandingkan penambahan realisasi penerimaannya.

6. **Faktor Belanja Barang.**

Berdasarkan hasil estimasi analisa vertikal dan horizontal, terlihat bahwa faktor ini memiliki pengaruh negatif terhadap realisasi penerimaan pajak. Dari hasil uji beda yang dilakukan dalam kedua analisa terlihat bahwa ada perbedaan yang signifikan antara belanja barang yang dilakukan KPP modern dengan KPP yang belum modern. Dimana secara rata-rata, belanja KPP modern lebih kecil dari pada KPP belum modern. Dengan demikian kebijakan administrasi perpajakan meningkatkan efisiensi belanja barang. Perubahan sistem administrasi perpajakan lebih modern dan menggunakan berbasis teknologi, seperti e-SPT dan e-Registration, dapat menekan pengeluaran belanja barang, yaitu biaya cetak SPT.

7. **Faktor Modernisasi.**

8. Berdasarkan hasil estimasi kedua analisa, yaitu vertikal dan horizontal, ada perbedaan hasil, baik koefisien dan signifikansi. Variabel ini digunakan untuk memisahkan antara KPP yang telah modernisasi dengan yang belum

modernisasi. Berdasarkan hasil tersebut maka penelitian mengambil hasil dari analisa secara vertikal karena dilihat dari koefisien dan signifikansi sesuai dengan ekspektasi dari penelitian ini. Berdasarkan analisa tersebut disimpulkan bahwa meskipun pelaksanaan kebijakan administrasi perpajakan pada Kanwil DJP Jakarta Pusat memberikan pengaruh positif terhadap realisasi penerimaan, tetapi kenaikan tersebut belum mampu memberikan meningkatkan secara rata-rata realisasi penerimaan KPP secara keseluruhan. Hal ini menggambarkan bahwa pelaksanaan kebijakan administrasi perpajakan di Kanwil Jakarta Pusat secara ekonomi masih pada masa transisi. Untuk mencapai fase lebih tinggi lagi yaitu pertumbuhan dibutuhkan sosialisasi yang lebih baik terhadap kebijakan ini kepada para Wajib Pajak dan para aparat pajak. Dengan demikian diharapkan kepatuhan Wajib Pajak dapat meningkat dan kinerja para aparat pajak juga meningkat sehingga realisasi penerimaan dapat ikut meningkat.

6.1. Saran

Berdasarkan analisis dan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis memberikan beberapa rekomendasi terkait dengan kebijakan pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak dan mengkaitkan kebijakan pemerintah berupa reformasi administrasi perpajakan. Adapun rekomendasi yang dapat diberikan sesuai dengan hasil penelitian ini, sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kebijakan reformasi administrasi perpajakan masih dapat dilanjutkan pada KPP di Kanwil DJP Jakarta Pusat, namun perlu mengkaji ulang tentang belanja pegawai. Hal ini terkait adanya rencana pelaksanaan modernisasi diterapkan kepada seluruh KPP di Kanwil Jakarta. Belanja pegawai harus dikaji ulang karena dari penelitian ini terlihat bahwa secara rata-rata belanja pegawai meningkat tetapi penerimaan pajak secara rata-rata tidak meningkat.

Saran penulis untuk mengkaji ulang belanja pegawai, ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu efektifitas jumlah pegawai dan besaran remunerasi tiap pegawai. Tidak adanya data dalam penelitian mengenai

jumlah pegawai maka efektifitas jumlah pegawai tidak bisa dihitung. Sedang untuk besarnya remunerasi pegawai di KPP ditentukan secara tetap tanpa melihat efektifitas atau kinerja pegawai atau kantor. Cara ini harus di ubah, yaitu remunerasi ditetapkan berdasarkan kinerja kantor. Ukuran kinerja kantor yang digunakan sebagai adalah besarnya penerimaan pajak KPP dibandingkan KPP lainnya dalam satu Kanwil.

2. Kepatuhan Wajib Pajak yang masih rendah pada KPP modern dibandingkan sebelumnya dapat disebabkan oleh kurangnya sosialisasi secara intensif dan kontinyu kepada Wajib Pajak mengenai sistem administrasi modern. Oleh karena itu sosialisasi harus dilanjutkan secara kontinyu dan efektif dengan menjelaskan perbedaan sistem sebelumnya dengan yang baru tentang manfaat dan kemudahan yang diberikan sistem yang baru dalam hal pelayanan.
3. Dari hasil penelitian masih terdapat ekspektasi yang kurang sesuai dari yang penulis harapkan, yaitu faktor modernisasi. Hal ini kemungkinan disebabkan kurangnya waktu dan data dalam penelitian sehingga perlu kelanjutan dari penelitian dalam pelaksanaan Kebijakan Modernisasi di Kanwil DJP Jakarta Pusat dalam kurun waktu minimal 10 tahun (analisa vertika) atau 5 tahun setelah rencana modernisasi telah dilaksanakan menyeluruh (analisa Horizontal).

DAFTAR PUSTAKA

- Bird, Richard M. Tax Policy and Economic Development. John Hopkins University Press Baltimore & London; 1992
- Bird, Richard M and Milka Casanegra de Jantscher. Improving Tax Administration In Developing Countries, International Monetary Fund, 1992
- Mansyuri,R. Pajak Penghasilan Lanjutan Pasca Reformasi 2000, Jakarta, YP4:2002
- Gujarati, Damodar N. Basic Econometrics. Edisi ke-4. Mc Graw-Hill Education, Singapore, 2003.
- Irawaty, Shanty. Tesis berjudul "Pengukuran Efisiensi Biaya Administrasi Pajak Pada Kantor-Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia Tahun 2006". FEUI,Depok:2007
- Mankiw,N.Gregory. Teori Makro Ekonomi edisi lima. Jakarta, Erlangga:2003
- Mansury, R. Pajak Penghasilan Lanjutan Pasca Reformasi 2000. Yayasan Pengembangan Dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan, Jakarta, 2002.
- Musgrave, Richard A. dan Peggy B. Musgrave. Public Finance In Theory And Practice. Edisi ke-5. Mcgraw-Hill Book Company, USA, 1989.
- Nachrowi, Djalal Nachrowi. Ekonometrika Untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan. Jakarta, LP-FEUI: 2006
- Pandiangan,Liberti. Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan. Jakarta, Gramedia:2008
- Pindyck, Robert S dan Daniel L. Rubinfeld. Mikroekonomi. edisi ke-4. Pearson Education Asia Pte.Ltd dan PT Prehallindo, Jakarta, 1999.
- Purnomo, Hadi. "Reformasi Administrasi Perpajakan". Kebijakan Fiskal : Pemikiran, Konsep dan Implementasi. Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2004.
- Safri Nurmanto. Pengantar Perpajakan. Jakarta, Kelompok Yayasan Obor:2003
- Shome, Parthasarathi. Tax Policy Handbook. International Monetary Fund, Washington, D.C., 1995.
- Sofyan, Marcus Taufan. Skripsi berjudul "Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Tahun 2004". STAN, Jakarta:2005

Sommerfeld, Ray.M, Hershel M. Anderson, dan Horace R. Brock. An Introduction To Taxation. Harcourt Brace Jovanovich, inc., 1980.

Tait, Alan A. Value Added Tax, International Practise and Problems. IMF, Washington D.C.;1988

Ter-Minassian, Teresa; Fiscal Federalism in Theory and Practise, Charles L. Vehorn And Ehtisham Ahmad, Tax Administration, IMF, Washington D.C.

Tunjung, M. Tesis berjudul "Analisis Efektifitas dan Efisiensi atas kebijakan pembentukan Kantor Pelayanan Wajib Pajak Besar (LTO) sebagai upaya peningkatan kinerja DJP tahun 2002-2003". FEUI, Depok:2004

Zain, Moh dan Kustadi Arinta. Pembaruan Perpajakan Nasional. Bandung, Citra Aditya Bakti:1990



Lampiran 1.

Tabel 5.6
Deskriptif Data Analisa Horizontal
***) Milyar Rupiah**

Kanwil tahun modern				real ^{*)}	patuh	Bi_pgw	Bi_brg
pusat	2004	non modern	Sum	7.595,86			
			Mean	690,51	35,11%	47,14%	30,84%
			Median	671,50	32,19%	54,75%	34,37%
			Std. Deviation	377,84	11,77%	20,36%	11,40%
			N	11	11	11	11
	2005	modern	Sum	6.299,88			
			Mean	572,72	30,76%	64,25%	29,67%
			Median	455,40	29,50%	67,09%	31,25%
			Std. Deviation	310,85	6,16%	13,86%	6,61%
			N	11	11	11	11
	2006	modern	Sum	8.040,37			
			Mean	730,94	31,36%	65,88%	26,57%
			Median	559,06	29,14%	69,01%	25,61%
			Std. Deviation	406,01	8,41%	13,05%	4,77%
			N	11	11	11	11
barat	2004	non modern	Sum	4.855,85			
			Mean	693,69	40,92%	57,38%	42,62%
			Median	579,25	40,02%	55,75%	44,25%
			Std. Deviation	300,99	4,57%	6,85%	6,85%
			N	7	7	7	7
	2005	non modern	Sum	4.988,49			
			Mean	712,64	39,21%	53,29%	33,47%
			Median	643,61	39,41%	59,31%	34,90%
			Std. Deviation	294,48	3,78%	21,64%	14,82%
			N	7	7	7	7
	2006	non modern	Sum	5.420,79			
			Mean	774,40	35,73%	64,49%	31,73%
			Median	643,58	36,12%	71,30%	27,91%
			Std. Deviation	367,45	3,32%	14,83%	14,06%
			N	7	7	7	7
selatan	2004	non modern	Sum	7.957,32			
			Mean	795,73	29,62%	58,60%	41,40%
			Median	673,38	29,21%	56,24%	43,76%
			Std. Deviation	609,11	4,08%	7,80%	7,80%
			N	10	10	10	10
	2005	non modern	Sum	9.974,31			
			Mean	997,43	29,47%	65,33%	34,67%
			Median	823,41	30,45%	64,89%	35,11%
			Std. Deviation	736,80	3,61%	4,60%	4,60%
			N	10	10	10	10
	2006	non modern	Sum	11.886,66			
			Mean	1.188,67	27,83%	66,21%	24,87%
			Median	910,27	26,21%	71,80%	26,16%
			Std. Deviation	822,75	3,85%	13,05%	5,23%
			N	10	10	10	10

timur	2004	non modern	Sum	3.859,71			
			Mean	643,28	32,38%	58,17%	41,83%
			Median	448,94	31,86%	55,42%	44,58%
			Std. Deviation	483,34	5,96%	6,36%	6,36%
	N		6	6	6	6	
	2005	non modern	Sum	4.806,11			
			Mean	801,02	33,33%	54,75%	31,33%
			Median	508,73	31,97%	61,48%	37,73%
			Std. Deviation	635,30	6,95%	22,40%	13,76%
	N		6	6	6	6	
	2006	non modern	Sum	5.154,32			
			Mean	859,05	32,46%	60,64%	26,50%
Median			579,50	29,96%	64,58%	28,07%	
Std. Deviation			649,10	10,57%	8,87%	7,26%	
N		6	6	6	6		
utara	2004	non modern	Sum	3.843,36			
			Mean	788,67	33,75%	55,77%	44,23%
			Median	623,37	33,48%	57,03%	42,97%
			Std. Deviation	538,85	9,60%	3,65%	3,65%
	N		5	5	5	5	
	2005	non modern	Sum	4.917,78			
			Mean	983,56	32,78%	55,34%	36,88%
			Median	840,34	32,85%	57,93%	39,16%
			Std. Deviation	657,52	8,66%	9,80%	8,05%
	N		5	5	5	5	
	2006	non modern	Sum	5.112,03			
			Mean	1.022,41	30,87%	63,18%	30,16%
Median			806,71	31,66%	61,33%	31,64%	
Std. Deviation			626,20	7,41%	6,97%	3,80%	
N		5	5	5	5		
Total	2004	non modern	Sum	28.211,90			
			Mean	723,38	34,15%	54,72%	39,07%
			Median	623,37	33,48%	55,92%	42,75%
			Std. Deviation	452,19	8,53%	12,71%	9,53%
	N		39	39	39	39	
	2005	non modern	Sum	24.686,69			
			Mean	881,67	33,32%	56,27%	34,05%
			Median	694,70	32,94%	62,39%	36,59%
			Std. Deviation	595,61	6,49%	15,73%	10,19%
		N		28	28	28	
		modern	Sum	6.299,88			
			Mean	572,72	30,76%	64,25%	29,67%
Median			455,40	29,50%	67,09%	31,25%	
Std. Deviation	310,85		6,16%	13,86%	6,61%		
N		11	11	11			
2006	non modern	Sum	27.573,80				
		Mean	984,78	31,34%	64,05%	27,68%	
		Median	795,55	31,84%	67,34%	27,04%	
		Std. Deviation	649,93	6,79%	11,48%	8,58%	
	N		28	28	28		
	modern	Sum	8.040,37				
		Mean	730,94	31,36%	65,88%	25,57%	
		Median	555,06	29,14%	69,01%	25,61%	
Std. Deviation		406,01	8,41%	13,05%	4,77%		
N		11	11	11			

Lampiran 2.**Common Effect**

Dependent Variable: LOG(REAL?)
 Method: Pooled Least Squares
 Date: 07/22/09 Time: 22:24
 Sample: 2003 2006
 Included observations: 4
 Number of cross-sections used: 11
 Total panel (balanced) observations: 44

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PATUH?	37.07926	5.690806	6.515643	0.0000
LOG(PGW?)	0.860926	2.780292	0.309653	0.7584
LOG(BRG?)	-11.52871	2.376190	-4.851761	0.0000
MODERN?	0.817146	2.028495	0.402834	0.6892
R-squared	-72.467956	Mean dependent var		26.99314
Adjusted R-squared	-77.978053	S.D. dependent var		0.586122
S.E. of regression	5.208838	Sum squared resid		1085.280
Durbin-Watson stat	1.433484			

Fixed Effect

Dependent Variable: LOG(REAL?)
 Method: Pooled Least Squares
 Date: 07/22/09 Time: 22:27
 Sample: 2003 2006
 Included observations: 4
 Number of cross-sections used: 11

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PATUH?	0.525236	0.405498	1.295286	0.2054
LOG(PGW?)	-0.038913	0.159157	-0.244494	0.8086
LOG(BRG?)	-0.361685	0.145833	-2.480136	0.0192
MODERN?	0.063005	0.098876	0.637212	0.5290
Fixed Effects				
_CMPK—C	25.41387			
_GMB1—C	26.77454			
_GMB3—C	26.06045			
_KMYR—C	26.24053			
_MTG2—C	25.99807			
_MTG1—C	26.60341			
_SWBR—C	26.79002			
_SENN—C	25.83815			
_TAB2—C	25.92051			
_TAB1—C	27.15373			
_GMB2—C	26.88381			
R-squared	0.920252	Mean dependent var		26.99314

Universitas Indonesia

Adjusted R-squared	0.881753	S.D. dependent var	0.586122
S.E. of regression	0.201550	Sum squared resid	1.178052
F-statistic	23.90318	Durbin-Watson stat	2.769224
Prob(F-statistic)	0.000000		

H1 : individual effect

$$F = \frac{(RSS1 - RSS2)/m}{(RSS2)/(n-k)}$$

m=jumlah restriksi=	10
n=jumlah observasi=	44
k=jml parameter dim fixed=	4

RSS1=RSS common 11,8678

RSS2=RSS fixed 1,1667

(F tabel (10,40,5%) = 2,08

F stat = 36,69

menolak Ho atau individual effect

Hausman Test

Correlated Random Effects - Hausman Test

Pool: VERTIKAL

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	8.415665	4	0.0357

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
PATUH?	0.525236	0.637391	0.005978	0.1469
LOG(PGW?)	-0.038913	-0.036172	0.001348	0.9405
LOG(BRG?)	-0.361685	-0.367142	0.000713	0.8381
MODERN?	0.063005	0.066953	0.000369	0.8371

Kesimpulan : Pilih Fixed Effect

UJI BLUE

1. Multikolinearitas

Variable	VIF	1/VIF
Imodern	1.80	0.554602
lbrg	1.52	0.658578
lpgw	1.48	0.675628
lpatuh	1.15	0.866711
Mean VIF	1.49	

Kesimpulan : Tidak ada Multikolinearitas.

2. Heterokedastifis

SSR fixed effect (d)= 1,1669

	di	(di/d)-1	[(di/d)-1] ²
CMPK	0,02198	-0,98116	0,96268
GMB1	0,01480	-0,98732	0,97479
GMB3	0,00918	-0,99213	0,98433
KMYR	0,02199	-0,98115	0,96265
MTG2	-0,01035	-1,00887	1,01782
MTG1	-0,00818	-1,00701	1,01407
SWBR	-0,00197	-1,00169	1,00339
SENN	-0,00752	-1,00645	1,01293
TAB2	0,00441	-0,99622	0,99245
TAB1	0,01316	-0,98872	0,97756
GMB2	0,02347	-0,97988	0,96017
			10,86284

$$LM = NT/2 * \sum ((di/d) - 1)^2$$

Chi-stat 238,9825

chi sq tabel (44,4,5%)= 11,0705

Kesimpulan : **Heterokedastisitas**

Model Setelah Uji BLUE

Dependent Variable: LOG(REAL?)
 Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)
 Date: 07/22/09 Time: 23:34
 Sample (adjusted): 2004 2006
 Included observations: 3 after adjustments
 Cross-sections included: 11
 Total pool (balanced) observations: 33
 Iterate coefficients after one-step weighting matrix
 White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	26.75329	0.034471	776.1149	0.0000
PATUH?	0.570809	0.065279	8.744204	0.0000
LOG(PGW?)	0.155609	0.020292	7.668492	0.0000
LOG(BRG?)	-0.121925	0.005659	-21.54601	0.0000
MODERN?	0.052753	0.006986	7.550965	0.0000
AR(1)	-0.503415	0.014087	-35.73656	0.0000
Fixed Effects (Cross)				
_CMPK-C	-0.849716			
_GMB1-C	0.524586			
_GMB3-C	-0.191883			
_KMYR-C	-0.051129			
_MTG2-C	-0.385785			
_MTG1-C	0.151807			
_SWBR-C	0.601625			
_SENN-C	-0.574230			
_TAB2-C	-0.508370			
_TAB1-C	0.754571			
_GMB2-C	0.528524			

Weighted Statistics

R-squared	0.992553	Mean dependent var	43.70153
Adjusted R-squared	0.985982	S.D. dependent var	26.97479
S.E. of regression	0.121959	Sum squared resid	0.252860
F-statistic	151.0491	Durbin-Watson stat	2.340701
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics

R-squared	0.990956	Mean dependent var	27.07432
Sum squared resid	0.307061	Durbin-Watson stat	2.473195

Lampiran 3.**Common Effect**

Dependent Variable: LOG(REAL?)

Method: Pooled Least Squares

Date: 07/23/09 Time: 11:39

Sample: 2005 2006

Included observations: 2

Cross-sections included: 39

Total pool (balanced) observations: 78

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PATUH?	59.19458	4.219150	14.02998	0.0000
LOG(BI_PGW?)	5.893249	1.907292	3.089851	0.0028
LOG(BI_BRG?)	-8.302851	1.425327	-5.825225	0.0000
MODERN?	0.472349	1.190321	0.396825	0.6926
R-squared	-49.3175	Mean dependent var		27.27657
Adjusted R-squared	-51.3573	S.D. dependent var		0.639834
S.E. of regression	4.629748	Akaike info criterion		5.952803
Sum squared resid	1586.158	Schwarz criterion		6.073659
Log likelihood	-228.1593	Durbin-Watson stat		0.634373

Fixed Effect

Dependent Variable: LOG(REAL?)

Method: Pooled Least Squares

Date: 07/23/09 Time: 11:43

Sample: 2005 2006

Included observations: 2

Cross-sections included: 39

Total pool (balanced) observations: 78

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	26.76639	0.314345	85.14968	0.0000
PATUH?	1.096227	0.928337	1.180850	0.2454
LOG(BI_PGW?)	0.324515	0.094289	3.441712	0.0015
LOG(BI_BRG?)	-0.258863	0.076165	-3.398688	0.0017
Fixed Effects (Cross)				

Effects Specification**Universitas Indonesia**

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.978786	Mean dependent var	27.27657
Adjusted R-squared	0.954625	S.D. dependent var	0.639834
S.E. of regression	0.136293	Akaike info criterion	-0.844286
Sum squared resid	0.668729	Schwarz criterion	0.424711
Log likelihood	74.92715	F-statistic	40.51184
Durbin-Watson stat	3.900000	Prob(F-statistic)	0.000000

Catatan : tidak digunakan dummy modern karena membentuk matrix singular

H1 : individual effect

$$F = \frac{(RSS1 - RSS2)/m}{(RSS2)/(n-k)}$$

m = jumlah restriksi = 10
 n = jumlah observasi = 44
 k = jumlah parameter di dalam fixed = 4

RSS1 = RSS common = 11,8678

RSS2 = RSS fixed = 1,1667

(F tabel (10,40,5%) = 2,08

F stat = 36,69

menolak Ho atau individual effect

Hausman Test

Correlated Random Effects - Hausman Test

Pool: HORIO506

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.	
Cross-section random	1.220847	3	0.7480	
Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
(PATUH?)	1.096227	1.098493	0.238533	0.9963
LOG(BI_PGW?)	0.324515	0.301887	0.000728	0.4018
LOG(BI_BRG?)	-0.258863	-0.244792	0.000402	0.4828

Kesimpulan : Random Effect

UJI BLUE**1. Multikolinearitas**

Variable	VIF	1/VIF
lmodem	1,07	0,595944
lbrg	1,41	0,706718
lpgw	1,31	0,762646
lpatuh	1,68	0,934303
Mean VIF	1.37	

2. Heterokedastis

SSR Random effect (d)=	di	(di/d)-1	0,678876	[(di/d)-1] ²
_BARAT_CKG	0,02526	-0,96279		0,92697
_BARAT_GPT	0,00182	-0,99732		0,99464
_BARAT_KBJ	0,30840	-0,54573		0,29782
_BARAT_PLM	0,05452	-0,91969		0,84583
_BARAT_TM2	0,05782	-0,91484		0,83693
_BARAT_TM1	0,30115	-0,55639		0,30957
_BARAT_TMB	0,21203	-0,68767		0,47289
_PUSAT_CMPK	0,69903	0,02969		0,00088
_PUSAT_GMB1	0,29315	-0,56819		0,32284
_PUSAT_GMB3	0,05891	-0,91322		0,83397
_PUSAT_KMYR	0,01585	-0,97666		0,95386
_PUSAT_MTG2	0,33882	-0,50091		0,25092
_PUSAT_MTG1	0,03685	-0,94572		0,89439
_PUSAT_SWBR	0,42177	-0,37872		0,14343
_PUSAT_SENN	0,38891	-0,42713		0,18244
_PUSAT_TAB2	0,21554	-0,68250		0,46581
_PUSAT_TAB1	0,65575	-0,03407		0,00116
_PUSAT_GMB2	0,41900	-0,38281		0,14654
_SELATAN_CLDK	0,04314	-0,93646		0,87696
_SELATAN_KB2	0,38080	-0,43907		0,19278
_SELATAN_KB1	0,67257	-0,00928		0,00009
_SELATAN_KBL	0,00957	-0,98591		0,97202
_SELATAN_MPM	0,02286	-0,96632		0,93378
_SELATAN_PNC	0,17244	-0,74599		0,55651
_SELATAN_PMG	0,00776	-0,98856		0,97726

Universitas Indonesia

_SELATAN_STB2	0,00191	-0,99719	0,99439
_SELATAN_STB1	1,94188	1,86044	3,46123
_SELATAN_TBT	0,20687	-0,69527	0,48341
_TIMUR_CKG2	0,24918	-0,63295	0,40062
_TIMUR_CKG1	0,50746	-0,25250	0,06376
_TIMUR_JTNG	0,14123	-0,79197	0,62722
_TIMUR_KRJT	0,88052	0,29702	0,08822
_TIMUR_MTRM	2,50364	2,68793	7,22494
_TIMUR_PLGD	0,17086	-0,74832	0,55998
_UTARA_KLGD	0,01956	-0,97118	0,94320
_UTARA_KOJA	1,55591	1,29189	1,66899
_UTARA_PDMG	0,00846	-0,98754	0,97523
_UTARA_PNJR	0,36067	-0,46872	0,21970
_UTARA_TJPR	0,79601	0,17254	0,02977
			31,13093

$$LM = NT/2 * \sum((di/d) - 1)^2$$

Chi-stat 1369,7611

chi sq tabel (88,4,5%)= 11,0705

Kesimpulan : **tolak Ho (Heterokedastisitas)**

3. Autokorelasi

Dependent Variable: LOG(REAL?)

Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)

Date: 06/24/09 Time: 13:11

Sample: 2005 2006

Included observations: 2

Cross-sections included: 39

Total pool (balanced) observations: 78

Swamy and Arora estimator of component variances

Cross-section SUR (PCSE) standard errors & covariance (d.f. corrected)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	26.86752	0.375830	71.48842	0.0000
PATUH?	1.098493	0.644036	1.705638	0.0923
LOG(BI_PGW?)	0.301887	0.073316	4.117641	0.0001
LOG(BI_BRG?)	-0.244792	0.033935	-7.213641	0.0000
MODERN?	-0.339585	0.261301	-1.299597	0.1978

Universitas Indonesia

Random Effects (Cross)	
_BARAT_CKG-C	-0.154286
_BARAT_GPT-C	0.015258
_BARAT_KBJ-C	0.538166
_BARAT_PLM-C	-0.195730
_BARAT_TM2-C	-0.217471
_BARAT_TM1-C	-0.505198
_BARAT_TMB-C	-0.449035
_PUSAT_CMPK-C	-0.805835
_PUSAT_GMB1-C	0.532396
_PUSAT_GMB3-C	-0.253498
_PUSAT_KMYR-C	-0.060019
_PUSAT_MTG2-C	-0.561250
_PUSAT_MTG1-C	0.123919
_PUSAT_SWBR-C	0.640633
_PUSAT_SENN-C	-0.600924
_PUSAT_TAB2-C	-0.422991
_PUSAT_TAB1-C	0.792586
_PUSAT_GMB2-C	0.614982
_SELATAN_CLDK-C	0.195495
_SELATAN_KB2-C	-0.594875
_SELATAN_KB1-C	0.796797
_SELATAN_KBL-C	0.086925
_SELATAN_MPM-C	-0.103914
_SELATAN_PNC-C	-0.400339
_SELATAN_PMG-C	0.082776
_SELATAN_STB2-C	0.016704
_SELATAN_STB1-C	1.367419
_SELATAN_TBT-C	0.423915
_TIMUR_CKG2-C	-0.478434
_TIMUR_CKG1-C	0.698146
_TIMUR_JTNG-C	-0.400155
_TIMUR_KRJT-C	0.920055
_TIMUR_MTRM-C	-1.539450
_TIMUR_PLGD-C	-0.397934
_UTARA_KLGD-C	0.133956
_UTARA_KOJA-C	-1.205522
_UTARA_PDMG-C	-0.083360
_UTARA_PNJR-C	0.572284
_UTARA_TJPR-C	0.877809

Effects Specification	S.D.	Rho
Cross-section random	0.632117	0.9556

Universitas Indonesia

Idiosyncratic random	0.136293	0.0444
----------------------	----------	--------

Weighted Statistics

R-squared	0.164726	Mean dependent var	4.111128
Adjusted R-squared	0.118958	S.D. dependent var	0.144723
S.E. of regression	0.135843	Sum squared resid	1.347085
F-statistic	3.599129	Durbin-Watson stat	1.939719
Prob(F-statistic)	0.009832		

Unweighted Statistics

R-squared	0.033203	Mean dependent var	27.27657
Sum squared resid	30.47618	Durbin-Watson stat	0.085738

**Kesimpulan : Tidak ada autokorelasi
Dengan demikian hasil tersebut telah memenuhi asumsi BLUE.**

